



**RESHUFFLE KABINET  
AKAN BERLANJUT  
BUDI ARIE HARUSNYA  
SUDAH LAMA JADI  
TERSANGKA  
BBM SWASTA  
LANGKA HARUS BELI  
KE PERTAMINA  
JUAL PROYEK  
RAKSASA KE CHINA**

**PROVINSI DENGAN  
INFRASTRUKTUR  
TERBAIK KEDUA DI  
SUMATERA  
SALAH URUS  
BERAS PREMIUM**

# **KOBOI INI SIAP BENAHI EKONOMI INDONESIA**



Rp75.000,-

**ILMUWAN INDONESIA  
DI BALIK GOOGLE  
PREMIUM**



# info indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

## Network



**INFO PASANG**  
NUR AISAH  
+ 62 815-1157-6312  
**IKLAN**



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



 info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

*Selamat Hari*

**KESAKTIAN  
PANCASILA**



EDISI  
BULAN  
SEPTEMBER  
2025

# DAFTAR ISI



7

## INFO UTAMA

Bagaimana memahami rangkaian unjuk rasa yang berlangsung justru dalam konteks peringatan 80 tahun proklamasi kemerdekaan? Masalah ekonomi dan politik memang jalin berkelindan.



22

## INFO SUMSEL

Sumatera Selatan berupaya memperluas keterampilan warganya di bidang teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang mengimitasi bahkan dapat melebihi kemampuan fisik manusia. Rekor dunia Guinness World Records menjadi bonusnya.



32

## INFO DAERAH

Besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, nilai tunjangan tersebut dinilai terlalu fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan.



50

## INFO TEKNOLOGI

Adhiguna Kuncoro, seorang ilmuwan peneliti senior di Google DeepMind London, merupakan salah satu talenta Indonesia yang bersinar di kancah global. Sebagai satu-satunya peneliti asal Indonesia di tim DeepMind, ia memainkan peran penting dalam pengembangan beberapa teknologi kecerdasan buatan (AI) terdepan di dunia.



## 68

### INFO ISTANA

Memasuki bulan ke-11 pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. Lima tokoh dilantik menjadi menteri baru pada Senin, 8 September 2025. Perombakan susunan kabinet ini diprediksi bakal berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.



## 74

### INFO NASIONAL

Sejumlah anggota DPR mengklaim siap membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, agar pembahasan ini bisa segera dimulai, Presiden Prabowo Subianto diharapkan juga ikut mendorong para ketua umum partai politik di koalisinya yang sangat dominan di DPR. Jika tidak, Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.



## 87

### INFO KHUSUS

Menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa banyak mendapat sorotan dari berbagai sisi. Bagaimana kebijakan fiskal (anggaran) sebagai Menkeu baru?

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

44 INFO WISATA

46 INFO KESEHATAN

48 INFO OLAHRAGA

86 KAJI

## 52

### INFO EKONOMI

Sejumlah stasiun bahan bakar umum (SPBU) milik perusahaan swasta, seperti BP-AKR dan Shell Indonesia, mengalami kekosongan stok atau pasokan bahan bakar minyak (BBM) mulai akhir Agustus.



## UJIAN

**D**inamika politik dalam negeri pada akhir Agustus 2025 menjadi bagian penting dalam perjalanan 80 tahun bangsa kita. Akan lebih mudah menyimpulkan dinamika –yang diwarnai unjuk rasa, kekerasan, dan korban nyawa maupun harta benda, sebagai ujian bagi kelangsungan bangsa ini ke depan.

Toh sejauh ini, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa kita berkali-kali keluar dari dinamika politik dalam negeri untuk menjadi lebih baik. Namun, perlu diakui bahwa dinamika politik yang diwarnai konflik fisik memerlukan waktu lebih panjang untuk mencapai atau mendekati tujuan kita berbangsa melalui penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana telah tersusun dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tersirat dari Pembukaan UUD bahwa setiap pemerintahan yang menyelenggarakan negara akan menghadapi tantangan dan ujiannya sendiri-sendiri sesuai dengan perkembangan politik dalam negeri maupun konteks dinamika global yang menyertainya. Pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pun demikian. Begitu juga dengan pemerintahan di masa-masa sebelumnya.

Persoalan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah urusan dalam negeri. Sedangkan melaksanakan ketertiban dunia, berkaitan dengan hubungan internasional. Namun, sulit mengelakkan bahwa urusan dalam dan luar negeri tak terpisahkan satu sama lain. Juga ujiannya.

Maka, dinamika politik di akhir Agustus 2025 hendaknya dimaknai sebagai ujian yang telah selesai. Sedikit banyak, Indonesia tak akan lagi sama seperti sebelum 17 Agustus 2025. Idealnya, kita menyelesaikan ujian dengan kesanggupan lebih baik untuk melanjutkan kesinambungan bangsa ini.

Bentuk kesanggupan lebih baik itu antara lain mampu mengantisipasi potensi konflik frontal yang saling melukai. Juga mencegahnya sebelum terjadi.

Nah, bentuk kesanggupan yang lebih baik lainnya adalah kesiapan untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali ujian yang materi maupun substansinya masih sulit dipahami oleh kebanyakan saudara kita yang beragam pemahamannya. Kita dapat menyebut misalnya, upaya pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam menerbitkan Patriot Bond, surat utang, atau obligasi khusus bagi para pengusaha besar nasional.

Jadi, kita melihat penerbitan Patriot Bond pun merupakan ujian bagi penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Kita berharap penerbitan Patriot Bond mencapai hasil optimal. Setelah itu kita akan menghadapi ujian lagi dalam pengelolaannya. ●



### ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,  
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

**Twitter** : @Infoindonesia

**Facebook** : infoindonesia.id

**Instagram** : @infoindonesia.idn

**Email** : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH  
PT Wahana Multimedia  
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH  
PT Dua Satu Pro

**PENDIRI:** Usman Rizal

**DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM:** Rusdiyono

**PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Nur Aisah

**PEMIMPIN REDAKSI:** Gunawan Effendi

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:** Rahmad Romli

**REDAKTUR PELAKSANA:** Irma Yani

**REDAKTUR :** Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

**REPORTER:** Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri

**EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

**KEUANGAN:** Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah

**PENGEMBANGAN BISNIS:** Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

**BANK ACCOUNT:** A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



# DARI AGUSTUSAN HINGGA 17 + 8 TUNTUTAN

Bagaimana memahami rangkaian unjuk rasa yang berlangsung justru dalam konteks peringatan 80 tahun proklamasi kemerdekaan? Masalah ekonomi dan politik memang jalin berkelindan.

Unjuk rasa sebenarnya soal biasa, terlebih dalam konteks politik demokrasi. Dari bahasa Yunani *demos* (rakyat), *kratos* (daulat atau kuasa), demokrasi tentulah daulat rakyat. Unjuk rasa adalah ungkapan nyata kondisi rakyat, meskipun mungkin hanya sebagian saja. Katakanlah warga kota atau warga desa; rakyat lapisan menengah-bawah atau kategori lainnya, tak terkecuali yang berlatar suku, agama, ras, maupun golongan.

Namun yang menjadi catatan awal pemicu unjuk rasa bukan rakyat, melainkan wakilnya di parlemen. Menyusul viralnya rekaman video sejumlah

Detik-Detik Proklamasi di lapangan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025.

Dua momen joget itu sebenarnya kontekstual, wajar, dalam peringatan HUT Proklamasi. Bangsa yang mencapai usia 80 tahun bersatu berdaulat sangat pantas merayakannya dengan kegembiraan dan berjoget dengan suasana bahagia. Meskipun, misalnya, situasi ekonomi dan politik kurang menggembirakan.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyebut para anggota DPR berjoget setelah acara inti selesai. Dia juga mengatakan tiap tahun selalu ada musik selepas sidang tahunan. "Ya di masa

Toh Adies memastikan sidang tetap berjalan khidmat dan lancar. Hal yang sama pun, kata Adies, berlaku usai upacara HUT RI ke-80 di Istana. Dia mengatakan pihak-pihak yang berjoget tak hanya dari pejabat, tapi juga tamu undangan dan masyarakat.

"Saya rasa ini ungkapan rasa sukacita, rasa gembira, bahwa Indonesia telah mencapai usia kemerdekaan yang ke-80 dan harus dihadapi dengan optimis, sukacita, dan juga kerja keras yang sangat maksimal," katanya.

Sedangkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, para anggota DPR melakukan relaksasi dengan berjoget di akhir acara sidang tahunan.



anggota DPR RI berjoget di sela rangkaian Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025, viral pula reaksi warga di ranah digital, terutama media sosial. Dalam video itu, para wakil rakyat itu terlihat asyik menari mengikuti irama lagu Sajjo dan Fa Mi Re. Momen joget kembali muncul dalam acara kenegaraan dua hari kemudian, yaitu Peringatan

sidang kemarin kan di akhir acara ya. Kebetulan pas acara inti sudah selesai, pidato-pidato kenegaraan sudah selesai," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

"Mungkin saat itu lagu-lagunya cukup bersemangat, membuat kawan-kawan terbawa emosinya dengan lagu tersebut," tambahnya.

"Ya, saya kira karena lagu itu kan upaya untuk merelaksasi suasana, baik pada saat di sidang paripurna, DPR ataupun MPR, ataupun pada saat setelah selesainya upacara detik-detik proklamasi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

Menurut dia, lagu merupakan upaya merelaksasi suasana dan keadaan. Dia

pun menilai tak ada masalah dengan hal tersebut. "Menurut kami itu sesuatu yang tidak ada masalah, karena peletakannya di luar acara formal," ujarnya.

Toh reaksi warga yang aktif di media sosial justru banyak yang berseberangan. Ada yang menilai aksi joget para wakil rakyat tidak mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat. "Bahagia banget bikin rakyatnya sengsara," tulis akun @ran\\*\\*\\*\\*\\*\\*\\* yang mendapat banyak tanda suka dari pengguna lainnya.

Nah, joget dalam rangkaian peringatan proklamasi kemerdekaan bukan terjadi kali ini saja. Pada 2022 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

luar kebiasaan, karena lagu-lagu yang dibawakan biasanya lagu mars atau pop bernuansa nasionalisme.

Lagu "Ojo Dibandingke" bertema kegagalan dalam percintaan karena dibandingkan dengan sosok lain yang lebih baik, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan peringatan kemerdekaan.

Ketika beberapa pengamat menilai acara joget-joget tersebut merupakan bagian dari politik pencitraan Jokowi, yang dicitrakan sebagai sosok presiden merakyat, sederhana, dan jauh dari kesan keprotokoleran ketat. Namun, ekspresi joget dalam konteks merayakan kemerdekaan sejak 2022

anto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Puan melontarkan sindiran tajam terkait dinamika pengelolaan anggaran kementerian dan lembaga.

Dengan gaya khasnya, Puan menyebut adanya "cinta segitiga" anggaran di kalangan kementerian-lembaga. Ungkapan itu merujuk pada tarik-menarik antara program prioritas, kebutuhan tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi yang sedang berjalan.

"Bapak Presiden yang terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, kementerian dan lembaga selalu curhat ke komisi-komisi mitranya. Curhat



pada upacara peringatan HUT ke-77 Proklamasi di istana, di penghujung upacara berlangsung konser dangdut koplo dengan lagu 'Ojo Dibandingke' yang sedang viral, dibawakan penyanyi Farel Prayoga yang ketika itu berusia 12 tahun.

Ketika itu Ibu Negara Iriana, para menteri, hingga masyarakat pun ikut berjoget. Konser dangdut koplo itu di

itu sangat boleh jadi ditafsirkan berbeda oleh sebagian warga yang menghadapi masalah ekonomi sehari-hari.

Sedangkan dalam konteks parlemen, panggung resmi sidang tahunan DPR pada Jumat, 15 Agustus 2025 itu, suasana serius tapi santai itu pun sudah bermula dengan pidato pembukaan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Di hadapan Presiden Prabowo Subi-

masalah cinta segitiga juga, Bapak Presiden, terkait program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung," ucap Puan disambut tawa ringan hadirin.

Namun, di balik sindiran bernada jenaka itu, Puan menyampaikan pesan serius: rakyat tidak boleh jadi korban. Menurutnya, semua pihak harus memahami kepentingan bersama dan

## • INFO UTAMA

menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. "Cinta segitiga itu tidak harus berakhir patah hati. Semua pihak harus saling memahami dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai yang utama," tegas Puan.

Pidato Puan sekaligus menjadi pengantar bagi agenda utama sidang paripurna, yakni penyampaian RUU

tersembunyi harapan rakyat: apakah anak mereka bisa terus sekolah, apakah rakyat bisa berobat, apakah ada lapangan kerja, dan bagaimana nasib petani, nelayan, serta buruh," ujar Puan.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Puan meminta pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.



APBN 2026 dan Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa APBN bukan sekadar hitungan teknis, tetapi menyangkut keadilan dan keberpihakan negara terhadap jutaan rakyat Indonesia.

"Di balik setiap pos anggaran APBN

la menekankan, keterbatasan ruang fiskal jangan sampai menjadi alasan lemahnya perlindungan sosial atau minimnya pembangunan daerah.

Puan juga menegaskan DPR akan mengawal pembahasan RAPBN 2026 agar setiap rupiah benar-benar mem-

beri manfaat bagi rakyat. Menurutnya, belanja negara harus selalu berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat, dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

"Penyusunan dan pembahasan APBN bukan urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan. RAPBN 2026 diharapkan semakin memudahkan hidup rakyat," tandasnya.

Toh pidato pembukaan sidang ternyata berujung joget-joget. Dari sudut pandang komunikasi politik, para wakil rakyat itu boleh jadi keliru mengelola panggung depan (front stage) dan back stage (belakang panggung). Panggung depan adalah pentas tempat publik menyimak semua ucapan dan tindakan politisi itu, sedangkan belakang panggung adalah yang tak terlihat oleh publik, boleh untuk persiapan



**Ya, saya kira karena lagu itu kan upaya untuk merelaksasi suasana, baik pada saat di sidang paripurna, DPR ataupun MPR, ataupun pada saat setelah selesainya upacara detik-detik proklamasi.**

atau mengelola apa yang akan tampil di front stage.

Dalam kaitan itu, Gun Gun Heryanto (Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dalam bukunya *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer* (2022), menyebutkan komunikasi politik idealnya berfungsi sebagai "jembatan makna" atau bridge of meaning yang menghubungkan realitas masyarakat dengan kebijakan publik. Dari sisi ini, joget-joget di pentas sidang tahunan DPR itu dapat

menimbulkan tafsiran macam-macam.

Nah, pengamat budaya Hikmat Darmawan mengemukakan, persoalan utama bukan sekadar soal pantas atau tidak berjoget dalam forum resmi negara. Itu harus dilihat konteks politik yang melingkupinya.

Dia menjelaskan terutama sejak dua tahun terakhir, politik Indonesia makin berbasis pada populisme, dengan strategi komunikasi yang dikemas dalam bentuk hiburan populer seperti joget gemoy dan sejenisnya. Penekanannya pada emosi, bukan

diakses, serta jaminan pekerjaan yang layak.” jelasnya.

Mantan Wakil Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) ini lalu mencontohkan RAPBN 2026 sebagai bentuk keterputusan dari realitas sosial itu. Dia menjelaskan RAPBN 2026 itu banyak dikritik karena ada pemangkasan pelayanan publik, sementara belanja militer dan polisi tetap tinggi. Parahnya lagi ada kenaikan tunjangan anggota DPR. “Jadi kalau dirayakan dengan joget, seakan-akan mereka merayakan [tunjangan naik], bukan menjawab ke-

seharusnya menjadi perhatian serius. “Betapa jauhnya jarak antara pejabat dan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga terjadilah tone deaf itu,” jelasnya.

Alhasil, lanjut Hikmat, kita diajak halusinasi beramai-ramai. “Sementara kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari adalah lapar, menganggur, dan masa depan suram,” ungkapnya.

Toh jarak halusinasi dan kenyataan belum cukup menjadi aksi langsung yang menjadi bagian dari perilaku kolektif massa berupa unjuk rasa. Band-



substansi. “Orang diajak joget-joget, tidak membicarakan substansi atau kebijakan,” katanya sebagaimana dikutip media alternatif The Stance.id

Risiko pendekatan itu, kata Hikmat, politik pun berubah menjadi semacam ‘panggung’ yang hanya bermain di ranah citra dan emosi, hingga lama-lama terputus dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Politisi pun menjadi tone deaf (tuli ketukan nada), tidak peka dengan situasi masyarakat.

“Padahal rakyat tidak sedang mencari hiburan murah di layar politik. Mereka butuh kepastian hidup. Mulai dari harga pangan yang terjangkau, pendidikan dan kesehatan yang bisa

butuhan masyarakat,” katanya.

Wakil Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode 2021-2023 ini menilai sikap tersebut menunjukkan keterputusan elite dari kenyataan sosial. APBN yang seharusnya menjadi cermin keprihatinan di tengah kesulitan ekonomi justru diperlakukan sebagai pesta. “Jadi mereka menari diatas bangkai masyarakat itu namanya,” kritik Hikmat.

Dia mencontohkan hal lain lagi, yaitu program makanan bergizi gratis. Ketika muncul laporan kasus keracunan, respons pejabat cenderung meremehkan dengan alasan manfaat program yang lebih besar. Padahal, kata Hikmat, satu kasus keracunan pun sudah

ingin saja misalnya dengan perilaku mengibarkan bendera one piece masalah yang akhirnya mereda dan seakan terlupakan.

Sedangkan unjuk rasa yang dimulai pada Senin, 25 Agustus 2025 berlangsung sepekan setelah joget-joget. Joget-joget saja dapat dianggap sebagai situasi kondusif yang mendorong ketegangan (structural strain) hingga akhirnya ikut berpentas di panggung depan. Sebagaimana dikemukakan oleh akun media sosial @doy\\*\\*\\*\\* yang melontarkan sindiran singkat: “Rakyatnya kejang, pejabatnya goyang.” Baru Agustusan, belum sampai ke 17 + 8 tuntutan. • Editor: GE



# DEMOKRASI BERGERAK DI DUNIA MAYA TAK TERBENDUNG

**Bukan hanya di Indonesia. Peran media sosial yang baru dikenal pada Abad XXI menjadi unsur baru yang memicu aksi unjuk rasa di mana-mana. Namun, peran media sosial memang tak terelakkan, seiring revolusi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan.**

**A**nalisis wacana di media sosial Drone Emprit, misalnya, mencatat seruan aksi membubarkan parlemen mengemuka di media sosial X dan YouTube pada Jumat, 15 Agustus 2025, hari yang sama dengan berlangsungnya sidang tahunan DPR. Toh aksi unjuk rasa masal baru terjadi sepekan setelah itu.

Dalam konteks itulah muncul pula unjuk rasa kelompok pengemudi ojek online yang cara kerjanya mengandalkan dukungan TIK. Hingga akhirnya jatuh korban salah satu pengemudi ojek online Affan Kurniawan pada Kamis, 28 Agustus 2025 meskipun dari berbagai catatan ia tak berniat terlibat dalam rangkaian unjuk rasa.

Sebelumnya, unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen Senayan Jakarta

sudah berlangsung sejak Senin, 25 Agustus 2025. Unjuk rasa disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, namun dalam skala relatif terkendali dibandingkan dengan setelah Affan menjadi korban yang memicu ketegangan yang di luar kendali: Termasuk aksi penjarahan hingga ke rumah-rumah kediaman sejumlah anggota DPR dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Masalah tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa tunjangan perumahan, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa wilayah, hingga ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup berkecamuk di sini.



Masih media sosial, seruan unjuk rasa pada 25 Agustus muncul di forum percakapan WhatsApp maupun platform lainnya. Salah satunya malah datang melalui hashtag atau tagar di media sosial (terutama X/Twitter, Instagram, dan WhatsApp) sebagai hashtag dan slogan yang memobilisasi massa.

Sebagaimana dikutip dari Mekari Community di laman web, gerakan ini dipicu oleh kemarahan publik terhadap DPR, terutama karena wacana kenaikan tunjangan perumahan Rp 50 juta/bulan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Istilah “revolusi” di sini bukan dalam arti kudeta, tapi lebih sebagai simbol kemarahan, perlawanan, dan keinginan perubahan.

Viral lewat hashtag #RevolusiRakyatIndonesia, konten berupa ajakan, meme, video kritik, hingga poster digital tersebar di media sosial. Gerakan ini cepat menjangkau kalangan mahasiswa, pelajar, pekerja transportasi online, dan aktivis.

Nah, hingga tibalah Kamis, 28 Agustus saat ribuan pengunjuk rasa, terutama mahasiswa, aktivis politik, siswa

SMA/SMK, dan anggota serikat buruh, bentrok dengan polisi di Jakarta di luar Gedung DPR. Protes yang dipimpin oleh kelompok buruh seperti Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) memulai aksinya dengan enam tuntutan utama, yaitu mengakhiri alih daya, menaikkan upah minimum, menghentikan PHK massal, dan mereformasi pajak ketenagakerjaan. Aksi protes buruh ini menghasilkan kesepakatan pemerintah untuk membentuk satuan tugas dalam menangani PHK massal serta sebuah badan baru bernama Dewan Kesejahteraan Buruh. Meskipun protes buruh awalnya berakhir damai, demonstrasi mahasiswa kemudian meningkat menjadi kekerasan.

Ketegangan kian meningkat ketika beberapa mahasiswa mencoba memanjat pagar gedung DPR dan melemparkan benda-benda ke dalam kompleks gedung, yang mendorong polisi mengerahkan gas air mata dan meriam air bertekanan tinggi. Bentrokan menyebar dari kompleks DPR ke kawasan perbelanjaan di dekatnya dan bahkan ke jalan tol utama dan jalur kereta api,

mengganggu transportasi umum dan menyebabkan penutupan Stasiun Palmerah dan Tanah Abang.

Kekerasan memuncak pada malam hari ketika sebuah kendaraan lapis baja polisi menabrak dan menewaskan seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun bernama Affan Kurniawan di kawasan Pejompongan, beberapa kilometer dari Gerbang DPR. Insiden tragis ini, yang terekam dalam video dan menjadi viral, memicu kemarahan dan menyebabkan kerusuhan lebih lanjut. Sebagai tanggapan, kerumunan pengunjuk rasa, termasuk rekan-rekan ojek Kurniawan, berkumpul di Markas Brimob, membakar mobil dan melemparkan batu.

Setelah Affan menjadi korban, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengunjungi rumah duka Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis milik Brimob saat terjadi keributan dalam aksi unjuk rasa.

Kedatangan Presiden Prabowo di kediaman Affan yang berlokasi di Jalan

## • INFO UTAMA

Blora, Jakarta Pusat, berlangsung pada Jumat malam, 29 Agustus 2025 sekitar pukul 21.50 WIB. Presiden datang mengenakan peci hitam dan langsung menyalami warga sekitar yang menyambutnya.

Selama kurang lebih 20 menit, Presiden menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga Affan. "Saya ikut berduka cita. Semoga semuanya baik-baik," ucap Presiden Prabowo kepada ayah mendiang Affan.

"Kami percaya kepada Bapak," balas sang ayah.

Kepada ibu Affan, Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa duka dan penyesalannya atas kejadian terse-

kan aparat yang dinilai berlebihan.

"Saya kecewa dan terkejut atas perlakuan aparat yang berlebihan. Saya sudah memerintahkan agar insiden tersebut diusut secara menyeluruh dan terbuka, serta memastikan para petugas yang terlibat bertanggung jawab," tegas Presiden Prabowo.

"Kami akan mengambil langkah hukum sekeras-kerasnya sesuai aturan yang berlaku," lanjutnya.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian penuh kepada keluarga Affan. "Pemerintah akan memastikan kehidupan keluarga korban terjamin, serta memberikan perhatian khusus kepada orang tua, adik, dan kakaknya," ujar

menekankan perlunya evaluasi kebijakan dan sikap pemerintah.

Menurut dia, semua harus ditempatkan pada kepentingan rakyat. "Legislatif dan yudikatif juga jangan jadi institusi yang pro-kekuasaan," tandasnya

Sedangkan ekonom Bhima Yudhistira memperingatkan, jika ketidakstabilan sosial politik berlanjut, dampaknya tidak hanya terasa di pasar saham, tetapi juga pada nilai tukar rupiah dan iklim investasi. Menurut Bhima, krisis politik bertemu dengan masalah ekonomi bisa menjadi pra-krisis yang multi sektor dan multi dimensi. "Ini bisa saja sama buruknya dengan krisis 1998," kata dia.

Nah, seiring itu, pada Minggu siang, 31 Agustus 2025 Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Negara.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Najamudin. Dari unsur partai politik tampak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Bahliil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Dalam pidatonya sesuai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, ia menekankan bahwa segala bentuk aksi anarkis, penjarahan, maupun perusakan fasilitas umum tidak akan diberi toleransi. "Aspirasi rakyat harus dihormati. Kebebasan untuk berkumpul secara damai dijamin konstitusi. Tetapi jika ada tindakan melawan hukum, terlebih yang mengarah pada makar atau terorisme, aparat negara wajib bertindak tegas," ujar Prabowo.

Presiden memastikan TNI dan Polri diperintahkan untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus menindak tegas siapa pun yang merusak fasilitas publik atau mengambil keuntungan dari situasi krisis. Prabowo juga menyampaikan kesepakatan para pimpinan partai politik terkait langkah



but. "Saya turut berduka cita, saya benar-benar menyesalkan kejadian ini," ujarnya sambil menggenggam tangan ibunda Affan.

"Kami tidak menyangka Bapak akan datang," kata ayah Affan.

Dalam suasana haru, Presiden Prabowo memeluk ibu dan adik-adik almarhum. Pihak keluarga turut menyampaikan harapan agar proses hukum terhadap insiden ini dilakukan secara tuntas.

"Ini sudah menjadi takdir, tapi kami sebagai keluarga berharap keadilan tetap ditegakkan," ujar perwakilan keluarga.

"Pasti. Itu pasti," jawab Presiden.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Presiden mengaku kecewa dan terkejut atas tinda-

Presiden Prabowo.

Setelah kunjungan Presiden Prabowo ke keluarga duka Affan Kurniawan, unjuk rasa masih berlangsung sehari-hari kemudian namun boleh dibilang mulai surut dari jumlah massa maupun bentrokan dengan aparat. Tak urung yang mencolok adalah aksi penjarahan. Antara lain rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang diserbu massa, pada Minggu, 31 Agustus 2025 dini hari. Rekaman video aksi massa itu pun beredar di media sosial.

Pada jam-jam sebelumnya, rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya juga dijarah massa. Pengamat politik dan sosial, Vidhyandika Djati Perkasa, menilai bahwa "sumber kekacauan" ini adalah kevakuman kepemimpinan. Meskipun tidak membenarkan penjarahan, Vidhyandika

disiplin bagi anggota DPR yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

"Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR yang menyampaikan pernyataan tidak tepat di tengah krisis akan diberhentikan dari keanggotaannya," tegasnya.

Selain itu, pimpinan DPR sepakat melakukan evaluasi kebijakan internal, termasuk pengurangan tunjangan serta penghentian sementara perjalanan dinas ke luar negeri.

Pada kesempatan itu presiden menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR akan membuka kanal dialog seluas-luasnya dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga tokoh masyarakat, agar aspirasi rakyat dapat didengar langsung dan ditindaklanjuti. "Saya minta seluruh kementerian dan lembaga membuka pintu bagi masukan rakyat. Kritik yang membangun adalah bahan penting bagi perbaikan negara," kata Prabowo.

Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo menyerukan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha mengancam stabilitas nasional.

"Indonesia sedang berada di jalur kebangkitan. Mari kita suarkan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, dan tanpa merusak fasilitas umum," ujarnya.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok kecil dan tertinggal. "Warisan nenek moyang kita adalah semangat gotong royong. Mari kita rawat semangat itu demi menjaga negeri yang kita cintai," tutupnya.

Sedangkan reaksi di media sosial adalah kemunculan Tuntutan 17 + 8 Rakyat yang menjadi himpunan berbagai aspirasi dan desakan rakyat yang beredar pada unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus 2025. Tuntutan tersebut terdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dan delapan tuntutan jangka panjang kepada pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

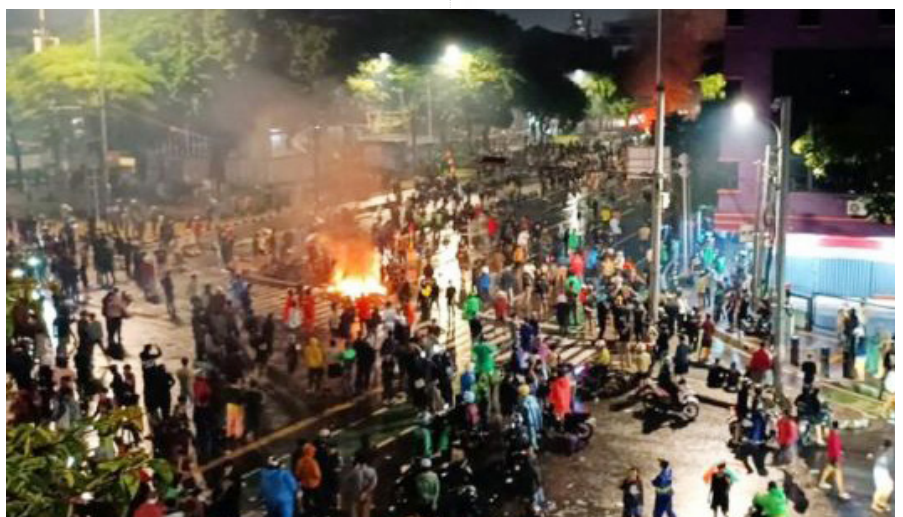
Sejumlah pemengaruh yang menggugah postingan tersebut antara lain Jerome Polin, Andovi da Lopez, JS

Khairan, Cania Citta, Fathia Izzati, Salsa Erwina Hutagalung dan Abigail Limuria. Tuntutan tersebut merangkum desakan yang datang dari 211 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam YLBHI, serta siaran pers yang dikeluarkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

Menanggapi tuntutan itu, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sebagian tuntutan 17+8 yang dikemukakan warga masyarakat setelah demon-

spons positif mengenai desakan membentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, sopir ojek daring yang dilindas kendaraan taktis polisi. "Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak gimana," kata dia.

Sementara untuk tuntutan menarik militer dari pengamanan sipil, Prabowo hanya menjelaskan tugas



strasi akhir Agustus lalu masuk akal, dan sebagian lain perlu dirundingkan. "Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik," kata Prabowo di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Secara khusus, Prabowo mere-

TNI yang satu di antaranya untuk menjaga masyarakat dari ancaman apa pun. Kata dia, tuntutan tersebut masih diperdebatkan. "Jadi, terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya," tukasnya. ●

# DEMO BERKURANG RESHUFFLE TERBILANG

**Rangkaian unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September 2025 di Indonesia mulai reda setelah tuntutan 17 + 8 mendapat tanggapan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menyusul kemudian perombakan kabinet menteri.**

Unjuk rasa yang juga meminta korban jiwa, selain penjarahan, tampak mulai reda di pekan pertama September 2025. Beriringan dengan itu, Presiden Prabowo mengumumkan perombakan (reshuffle) kabinet.

Presiden RI Prabowo Subianto merombak atau reshuffle di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih, pada Senin, 8 September 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, mengemukakan reshuffle kali ini terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Yang pertama sesuai dengan pembahasan oleh DPR, berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian Pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sekaligus menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umrah yang rencananya akan dilakukan pelantikan sore hari ini,” katanya.

Yang kedua, lanjut Prasetyo, “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus, maka Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” ungkapnya didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.



Selanjutnya, di kompleks Istana Kepresidenan sejumlah tokoh tampak hadir di gerbang pilar menuju Istana Negara pada pukul 14.30 WIB. Tampak Anggota DPR RI Mukhtarudin, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

Alhasil, lima menteri yang diganti adalah Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam, Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/ Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga

Sedangkan empat menteri baru dan satu wakil menteri adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/ Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil

Menteri Haji dan Umrah

Ini adalah reshuffle kedua setelah yang pertama pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam reshuffle pertama, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Jabatannya digantikan oleh Brian Yulianto, yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB). Presiden juga melantik Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Pejabat selanjutnya yang dilantik yaitu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widayanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Sedangkan reshuffle kedua dipandang sebagai upaya Presiden Prabowo memperkuat kinerja pemerintah sekaligus menyesuaikan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Toh pada reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025, Prabowo belum menyebutkan siapa pengganti Budi Gunawan untuk meng-

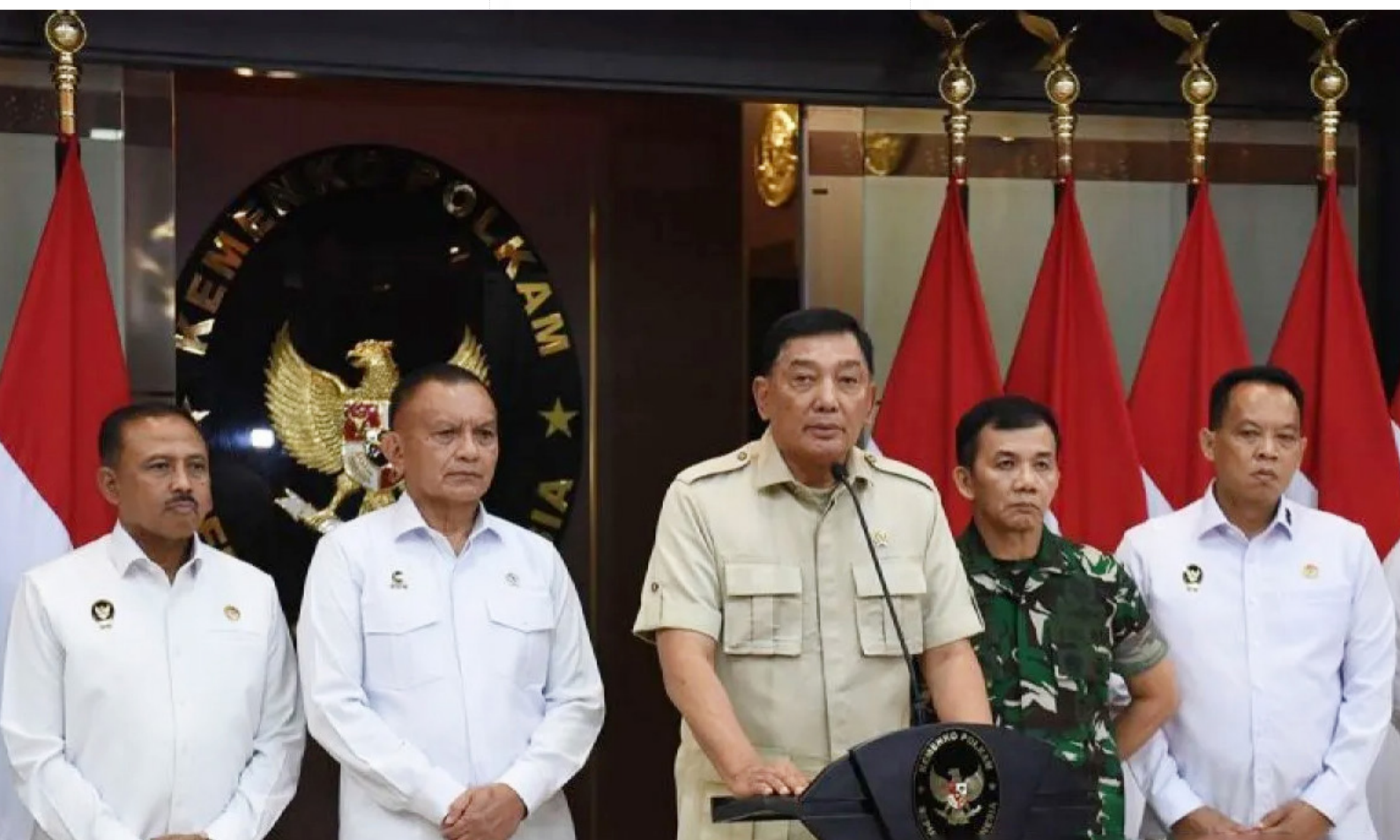
isi posisi Menko Polkam.

"Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam. Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam," kata Prasetyo

Begitu pula Dito Ariotedjo yang semula Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), belum diumumkan penggantinya. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutkan pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora belum dilantik karena calon menteri tersebut masih berada di luar kota.

"Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya," kata dia.

Pergantian posisi Menko Polhukam dan Menteri Keuangan menjadi sorotan utama karena keduanya memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas politik



## • INFO UTAMA

dan ekonomi nasional. Sementara ini jabatan Menko Polkam diamanatkan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim menggantikan Budi Gunawan. Sjafrie Sjamsoeddin merupakan salah satu orang terdekat Prabowo Subianto. Kedekatan itu terjalin sejak Sjafrie dan Prabowo mengenyam bangku pendidikan akademi militer pada 1974.

Dalam rapat perdana di Kantor Menko Polhukam, Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi Menko Polkam sebelumnya, Budi Gunawan karena telah memberikan kontribusi terbaik untuk negara. "Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko

tugas, dan fungsi dari para deputy yang ada di Kementerian Koordinator untuk fokus dan giat bekerja sama, sama-sama bekerja dalam rangka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas masing-masing," kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, seluruh deputy harus menerapkan sistem kerja yang efektif dan efisien agar upaya pengamanan negara dapat berjalan dengan maksimal. Dia juga meminta setiap pihak yang ada di dalam Kemenko Polkam untuk memperkuat koordinasi agar pekerjaannya tidak saling tumpang tindih.

Tidak hanya untuk internal Kemenko Polkam saja, Sjafrie juga meminta agar seluruh kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam untuk bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan

pemerintah membutuhkan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang kuat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. "Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik," kata Fahmi sebagaimana dikutip LKBN Antara, Kamis, 11 September 2025.

Kuat menurut Fahmi yakni memiliki posisi politik yang kuat agar dapat menciptakan suasana kondusif di dalam kabinet, parlemen dan masyarakat. Selain itu, sosok tersebut juga harus diterima khalayak agar masyarakat dapat merasa tenang dan aman di bawah perlindungan Menko Polkam.



Polkam," kata Sjafrie di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa, 9 September 2025.

Tidak hanya kepada Budi Gunawan saja, Sjafrie juga berterima kasih kepada jajaran deputy di Kemenko Polkam yang telah membantu Budi Gunawan dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polkam. Selanjutnya ia berharap para jajaran deputinya juga dapat memberikan kinerja terbaik di bawah naungannya sebagai pimpinan baru di Kemenko Polkam.

"Saya kembali menegaskan peran,

permasalahan di tingkat lembaga. "Hal-hal yang menyangkut permasalahan Kementerian dan Lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sjafrie.

"Namun, apabila ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga, maka Kementerian Koordinator Polkan akan menjalankan tugasnya," tambah Sjafrie.

Di mata pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi,

Menurut Fahmi, Menko Polkam merupakan jabatan sipil yang strategis karena memainkan peran penting dalam menstabilkan keamanan negara. "Jabatan ini secara tradisi diisi figur senior, kuat secara politik, dekat dengan presiden, dan punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus," jelas Fahmi.

Fahmi pun menyoroti beberapa nama yang diperbincangkan masyarakat karena dianggap layak menjadi Menko Polkam setelah Budi Gunawan. Salah satunya yakni Sjafrie Sjamsoeddin yang saat ini menjadi Menhan sekaligus Men-

ko Polkam ad interim.

"Pak Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pertahanan saat ini, adalah figur senior yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, dan sedang diberi kepercayaan menjabat ad interim," kata Fahmi.

Fahmi menilai semua modal yang dimiliki Sjafrie dari mulai pengalaman di bidang pertahanan dan kedekatan dengan Prabowo sangat mendukung untuk menjadikan dirinya sebagai Menko Polkam definitif. Dia juga menanggapi nama lain seperti Marsyal TNI (purn) Hadi Tjahjanto yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Panglima TNI dan Menko Polkam era Presiden Joko Widodo.

"Beliau mantan Panglima TNI sekaligus mantan Menteri ATR/BPN era Presiden Jokowi, bahkan pernah menjabat Menko Polhukam. Artinya, beliau sudah

memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi Menko Polkam. "Siapa pun yang dipilih nanti, kriterianya jelas, yakni harus kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik yang memberi otoritas penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik di bidang politik dan keamanan," terang Fahmi.

Nah, bagaimana dengan Menteri Keuangan? Di acara serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan penggantinya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia selama menjabat posisi itu. "Tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kekhilafan," kata Sri Mulyani dalam pidato perpisahan sekaligus menyerahkan jabatannya kepada Menteri Keuan-

gu kondisi, limitasi sistem keuangan kita," sambung Purbaya.

"Kita gak akan memotongkan lagi," kata Purbaya saat menjawab pertanyaan mengenai dana transfer ke daerah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI.

Purbaya menekankan pula, kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kita akan cenderung memberi, menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Menkeu Purbaya.

Dia menambahkan, strategi yang dikedepankan ialah penyerapan anggaran yang lebih baik, dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik. "Yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik sehingga tidak menggangu



## Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan.

sangat memahami ritme kerja dan koordinasi di pos ini," terang Fahmi.

Yang terakhir ada nama Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Karirnya yang cemerlang sebagai Kapolri membuat pria kelahiran Palembang ini dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri era Presiden Joko Widodo. "Pak Tito Karnavian yang kini menjalani periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri, jelas punya pengalaman mendalam di bidang politik dalam negeri, birokrasi, dan keamanan," ujar Fahmi.

Terlepas dari nama-nama besar yang muncul di permukaan, Fahmi berharap Presiden dapat memilih sosok yang me-

gan Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Sri Mulyani kemudian berujar agar penggantinya dan seluruh jajaran kementerian menjaga keuangan negara. Pada akhir pidatonya, Sri Mulyani berpamitan untuk undur diri. Dia pun meminta agar privasinya sebagai warga negara biasa dihormati.

Sedangkan pada Rabu malam, 10 September 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2026. Sedangkan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerin-



# KETIKA ANGKA BICARA

**D**ata adalah bahasa kekuasaan. Jika bahasa ini dimanipulasi, kebenaran menjadi sandera, dan rakyat hidup dalam cerita yang dipikirkan untuk mereka.

Di dunia modern, data telah menjadi salah satu aset strategis paling penting bagi sebuah negara. Ia menentukan arah kebijakan, memengaruhi persepsi pasar, dan membentuk narasi yang dibangun pemerintah kepada rakyatnya maupun dunia.

Angka-angka statistik, yang seharusnya netral dan obyektif, kini kian sering berada di persimpangan antara fakta

dan narasi, antara akurasi dan propaganda. Peristiwa yang meletup pada Agustus 2025, sebuah surat resmi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi contoh nyata betapa data dapat menjadi medan pertempuran.

Surat itu mempertanyakan kebenaran data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Bukan sekadar kritik akademis, langkah Celios ini memindahkan perdebatan dari ruang domestik ke panggung diplomasi internasional.

## Mengundang Tanda Tanya

Kronologinya dimulai awal Agustus 2025. BPS merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,12 persen (yoy). Di dalamnya disebutkan bahwa sektor manufaktur tumbuh 5,68 persen. Sebuah pencapaian yang, di tengah kondisi ekonomi global yang lesu, terdengar menggembirakan. Namun, bagi sebagian pengamat, termasuk Celios, angka ini memunculkan tanda tanya besar.

Celios mencatat bahwa indikator lain, seperti Purchasing Managers' Index (PMI) yang hanya di level 48,2 (menunjukkan kontraksi), justru memberi sinyal berlawanan. Pangsa sektor manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) menurun, dan industri padat karya mengalami peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kontradiksi seperti ini terlalu mencolok untuk diabaikan. Alih-alih sekadar mengeluarkan siaran pers, Celios memilih jalur yang jarang ditempuh: mengirimkan surat resmi ke UN Statistical Commission.

Surat itu diterima langsung oleh ketuanya, Georges-Simon Ulrich, yang kemudian menyatakan akan membawa keluhan tersebut ke UN Statistics Division, lembaga yang berwenang memastikan negara anggota mematuhi Fundamental Principles of Official Statistics.

Lebih mengejutkan lagi, Ulrich memuji langkah Celios sebagai



**OLEH: SETIAWAN BUDI UTOMO**  
**-Direktur Peneliti Eksekutif**  
**Senior OJK**  
**-Pemerhati Keuangan dan Kebijakan Publik**

bertuk keberanian dalam membela integritas data, sebuah pengakuan yang datang dari luar, di tengah retaknya kepercayaan publik di dalam negeri.

Bagi masyarakat awam, pertumbuhan 5,12 persen mungkin terdengar seperti bukti bahwa perekonomian berjalan baik-baik saja. Namun, para ekonom tahu angka tunggal ini hanyalah puncak dari gunung es, yang sisanya tersembunyi di balik metodologi perhitungan.

Jika kita membandingkan data BPS dengan indikator-indikator lain, gambaran yang muncul justru jauh lebih kompleks. Bagaimana mungkin suatu sektor mencatat pertumbuhan begitu tinggi, sementara kapasitas produksinya menurun,

pangsanya terhadap PDB menyusut, dan pasar tenaga kerjanya melemah? Dalam disiplin statistik ekonomi, perbedaan sebesar ini adalah red flag.

Celios menilai angka BPS lebih mencerminkan narasi politik ketimbang kondisi riil. "Jika angka pertumbuhan tidak selaras dengan denyut ekonomi rakyat, maka kita sedang berbicara tentang cerita, bukan realitas," kata salah satu analis Celios dalam wawancara.

## Politik di Balik Statistik

Sejarah menunjukkan, statistik seringkali dijadikan alat kekuasaan. Di berbagai negara, dari rezim otoriter hingga demokrasi rapuh, angka PDB, inflasi, dan pengangguran dipakai untuk menciptakan citra stabilitas dan kemakmuran.

Indonesia pun pernah melewati periode di mana data ekonomi dijadikan alat legitimasi politik. Dalam konteks tahun politik, angka pertumbuhan yang manis dapat menjadi vitamin bagi narasi keberhasilan pemerintah.

Namun, seperti vitamin yang salah dosis, efeknya bisa menjadi racun bila tidak didukung fondasi yang kuat.

Kebeneran tidak takut akan pertanyaan; hanya kebohongan yang takut diperiksa. Bahaya terbesar dari manipulasi data bukan hanya hilangnya kepercayaan publik, tetapi juga risiko kebijakan salah sasaran.

Jika pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan tak akurat, maka kebijakan fiskal dan moneter akan diarahkan ke sektor yang salah, stimulus akan salah target, dan alokasi anggaran menjadi tidak efektif.

Tanggapan cepat UN Statistical Commission menunjukkan kasus ini tak bisa dianggap sepele. Integritas data ekonomi adalah isu global karena berdampak pada perdagangan internasional, aliran investasi, dan kerja sama pembangunan.

Pujian PBB terhadap Celios menjadi ironi tersendiri. Di dalam negeri, kritik terhadap data resmi sering dianggap subversif atau merusak citra negara. Namun di forum internasional, tindakan

yang sama dilihat sebagai kontribusi bagi good governance.

Dalam dunia diplomasi ekonomi, reputasi sebuah negara dibangun di atas tiga pilar: stabilitas politik, keandalan institusi, dan kredibilitas data. Jika salah satu pilar runtuh, kepercayaan mitra internasional akan ikut goyah.

### Dampak Ekonomi

Distorsi data statistik memiliki efek domino yang luas. Pertama, ke pasar modal. Investor mengandalkan data resmi untuk membuat keputusan. Jika data dianggap tidak kredibel, risiko pelarian modal (capital flight) meningkat.

Kedua, investasi asing langsung (FDI). Perusahaan multinasional menilai risiko negara berdasarkan indikator makro. Data

dini bahwa reputasi bisa runtuh bukan karena resesi, melainkan karena hilangnya kepercayaan pada data.

Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi PBB pada 2014 menegaskan bahwa statistik resmi harus: (1) relevan dan tidak bias, (2) berdasarkan metodologi ilmiah, (3) bebas dari intervensi politik, dan (4) dapat diverifikasi oleh pihak independen.

Jika prinsip-prinsip ini dilanggar, bukan hanya angka yang tercemar, melainkan juga legitimasi kebijakan publik.

Krisis kepercayaan ini harus dijadikan momentum untuk reformasi. Pertama, perlu audit independen, dengan melibatkan universitas, asosiasi profesi, dan lembaga internasional untuk menguji data BPS.



yang diragukan dapat menurunkan minat investasi.

Ketiga, peringkat kredit. Lembaga pemeringkat seperti S&P atau Moody's dapat menurunkan outlook jika transparansi data menurun.

Dampak domestiknya pun signifikan. Pelaku usaha, terutama UMKM, bisa mengambil keputusan yang salah jika mereka mendasarkan strategi mereka pada data yang tidak sesuai realitas. Dalam jangka panjang, ini akan memperlambat pemulihan ekonomi.

Kredibilitas statistik adalah modal diplomasi yang sering dia-baikan. Negara yang datanya dapat dipercaya cenderung lebih mudah dapat pembiayaan murah, memenangi kepercayaan investor, dan memperkuat posisinya di forum global.

Kasus ini memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di Yunani pada awal krisis utang 2009, ketika terungkap bahwa defisit fiskal telah direkayasa selama bertahun-tahun. Dampaknya dramatis: pasar panik, obligasi dijual besar-besaran, dan Yunani kehilangan akses ke pembiayaan murah.

Intervensi PBB dalam kasus Indonesia ini menjadi peringatan

Kedua, transparansi metodologi, dengan membuka formula penghitungan, bobot, dan sumber data kepada publik.

Ketiga, perlindungan hukum bagi BPS, dengan memberi otonomi penuh agar bebas dari tekanan politik. Keempat, pentingnya pendidikan literasi data, dengan mengajarkan masyarakat membaca data secara kritis agar tidak mudah terjebak narasi.

Kasus Celios vs BPS bukan sekadar perdebatan angka pertumbuhan. Ia adalah cermin yang memantulkan kondisi integritas kita sebagai bangsa.

Apakah kita berani menghadapi kenyataan yang mungkin pahit ataukah kita akan terus nyaman dengan cerita indah yang kebenaran dan kenyataannya diragukan.

Bangsa yang besar bukan hanya yang ekonominya tumbuh, tetapi yang rakyatnya percaya pada kebenaran yang disampaikan pemimpinnya.

Pada akhirnya, kita harus ingat: pertumbuhan ekonomi hanyalah satu indikator. Kepercayaan publik, integritas institusi, dan kemampuan mengatakan kebenaran, itulah fondasi sejati bagi masa depan yang berkelanjutan. ●



Sumsel Mengguncang Dunia!

# HERMAN DERU PIMPIN 25.000 GURU MENUJU ERA KECERDASAN BUATAN

**Sumatera Selatan berupaya memperluas keterampilan warganya di bidang teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang mengimitasi bahkan dapat melebihi kemampuan fisik manusia. Rekor dunia Guinness World Records menjadi bonusnya.**

**P**elatihan memahami kecerdasan buatan atau imitasi (artificial intelligence, AI) dengan kemasan seminar dalam jaringan internet (webinar), mengantar Sumatera Selatan memecahkan rekor dunia Guinness World Records untuk jumlah kepesertaan. Begitulah, di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru, provinsi ini menyiapkan sumber daya manusia untuk segera menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang.

Dengan jumlah partisipan (peserta) mencapai 25.000 orang guru, sebagian besar dari berbagai kota dan kabupaten di Sumsel plus beberapa lagi daerah lain, Webinar Internasional dan Pemecahan Rekor Dunia Guinness World Record berlangsung pada Sabtu, 20 September

2025 di Pendopo Griya Agung Palembang. Kegiatan berlangsung secara hybrid, menghadirkan peserta secara langsung maupun melalui platform Zoom Meeting.

Gubernur Herman Deru menegaskan

bahwa pelatihan AI menjadi tonggak penting dalam revolusi pendidikan. Menurutnya, guru tidak boleh tertinggal dari murid yang semakin akrab dengan teknologi sejak dini. "Hari ini kita tidak hanya mendengar soal AI, tetapi benar-benar mempel-



jarinya. Guru harus jadi pengendali teknologi, bukan korban,” ujarnya.

Kegiatan ini juga turut dihadiri Kapolda Sumsel diwakili Dirbinmas Kombes Pol Hari Purnomo, S.IK, SH. MH, M.Han, Kajati Sumsel diwakili Asintel Totok Bambang Twidjo, SH. MH, Danrem 044/Gapo diwakili Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf. Jauhari, Danlanal Palembang diwakili Pasmilog, Mayor Laut (P) Wagio, Narasumber Indonesia's Favorite Trainer and Speaker Motivator Indonesia, James Gwee, Entrepreneurship Education and Learning Design Specialist Universitas Ciputra Dwi Sunu Pebrunto, S.Pd, M.Ed, Ph.D, Head Teaching and Learning Innovation Center Universitas Ciputra, Dr Benny Irawan S.Pd, M.Ed.

Sebagai puncak acara, Guinness World Records melalui Mr. Austin Clark Herzog Johnson menyerahkan sertifikat penghargaan kepada perwakilan Pemprov Sumsel, yakni Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Pendidikan. Penyerahan ini menandai pengakuan resmi dunia terhadap prestasi Sumsel. Hadir dalam acara ini antara lain unsur Forkopimda, termasuk perwakilan Kapolda, Kajati, Danrem, dan Danlanal. Selain itu, narasumber nasional seperti James Gwee dan akademisi Universitas Ciputra turut memberikan materi tentang inovasi pembelajaran berbasis AI.

Keberhasilan ini menambah deretan prestasi Sumsel di tingkat dunia. Gubernur Herman Deru menegaskan, Sumsel bukan hanya bagian dari Indonesia, tetapi juga bagian dari peta prestasi global yang membawa nama baik bangsa. Lebih jauh, Herman Deru menyampaikan bahwa pemahaman AI bukan sekadar untuk kebutuhan administrasi, melainkan juga untuk membentuk ekosistem pendidikan yang kreatif dan aman. “Kalau guru tidak paham teknologi, mereka bisa terjebak manipulasi. Kita harus menguasai, bukan dikuasai,” tambahnya.

Nah, pada pelaksanaannya, pelatihan ini terbagi dalam tiga sesi utama. Pertama, pemahaman dasar AI dan tantangannya dalam pendidikan. Kedua, penerapan aplikasi AI untuk administrasi, penilaian, dan media belajar. Ketiga, integrasi AI dalam perangkat ajar dengan memperhatikan etika digital.

Johannes Agus Taruna, salah satu inisiator sekaligus praktisi pendidikan,

menyebut kegiatan ini sebagai “legacy (warisan) besar” bagi dunia pendidikan Indonesia. Ia menilai dukungan penuh Gubernur Herman Deru menjadi faktor penting terwujudnya acara monumental ini di Sumsel.

“Antusias peserta luar biasa. Bahkan banyak guru tidak kebagian kuota karena Zoom hanya menampung 25.000 orang. Dari awal memang direncanakan di kota lain, tapi Gubernur Deru langsung menyambut inisiatif agar ini digelar di Sumsel,” ungkap Johannes.

Momentum ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas Indonesia melalui transformasi pendidikan berbasis teknologi. Jika seluruh peserta mampu mengaplikasikan AI dalam pembelajaran, dampaknya akan dirasakan secara nasional.

Rekor sudah tercatat di Guinness World Record untuk para guru. Akan lebih bermanfaat lagi jika keterampilan AI juga menjadi legacy besar bagi para siswa melalui para gurunya. Gubernur Deru insya Allah setuju. •ADV





# PROVINSI DENGAN INFRASTRUKTUR TERBAIK KEDUA DI SUMATERA

**Prestasi membanggakan kembali diraih Sumatera Selatan. Good Stats, lembaga pemeringkat nasional berbasis data, menempatkan Sumsel pada posisi ke-7 dalam daftar provinsi dengan kualitas pembangunan infrastruktur terbaik 2025.**

Sumsel bersanding dengan provinsi-provinsi maju lainnya, seperti Jawa Timur yang menempati peringkat pertama (4,51), DKI Jakarta di posisi kedua (4,37), serta Jawa Barat di posisi ketiga (4,07). Jateng (4,06) di peringkat empat.

Selanjutnya Sumatera Utara (3,92) posisi ke lima, Banten (3,71) posisi ke enam. Kemudian Sumatera Selatan (3,63) posisi ketujuh. Sumsel (3,52) posisi kedelapan. Bali (3,39) posisi sembilan dan posisi sepuluh Provinsi Lampung (3,34).

Keberhasilan ini menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang mampu mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan nilai 3,63%, Sumsel berhasil menjadi provinsi dengan kualitas infrastruktur terbaik kedua di Pulau Sumatera, hanya berselisih dengan Sumatera Utara yang berada di atasnya. Capaian ini terasa istimewa karena sebagian besar posisi teratas didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa.

Menurut Herman Deru, pembangunan infrastruktur adalah fondasi dalam mempercepat roda perekonomian dan meningkatkan pelayanan publik.

"Kita membangun infrastruktur bukan hanya untuk estetika, tetapi untuk membuka akses, memperkuat konektivitas, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah," ujarnya.

Data Bappeda Sumsel menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Jalan mantap provinsi naik dari 61,22%

menjadi 93,94% hanya dalam kurun waktu tiga tahun. Angka tersebut mencerminkan konsistensi pembangunan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Meski pandemi Covid-19 sempat menekan perekonomian, pembangunan infrastruktur di Sumsel tidak berhenti. Pada 2022, Pemprov Sumsel tetap melanjutkan pemantapan jalan di berbagai kabupaten/kota. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan di Sumsel berjalan berkesinambungan meski dalam situasi sulit.

Salah satu terobosan penting adalah pembangunan jalan yang memperpendek waktu tempuh Musi Rawas-Lubuklinggau-Muratara (MLM) menuju Palembang. Dari sebelumnya 7-8 jam, kini perjalanan dapat ditempuh hanya

dalam 4 jam.

Peresmian ruas jalan Simpang Semambang – Cecar SP 9 – Simpang Kulim pada 2023 menjadi tonggak sejarah. Infrastruktur ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah tersebut sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah.

Good Stats menilai kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya berdasarkan panjang jalan, tetapi juga efektifitasnya dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, capaian Sumsel dianggap sebagai representasi keberhasilan program pembangunan merata.

Infrastruktur yang baik terbukti menjadi katalisator pertumbuhan daerah. Pergerakan barang dan jasa lebih lancar, akses pendidikan dan kesehatan lebih mudah, serta investasi lebih tertarik masuk ke Sumsel.

Ke depan, Pemprov Sumsel bertekad mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui program "Infrastruktur Tuntas Merata". Pembangunan yang dilakukan diarahkan tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pelosok desa dan wilayah perbatasan.

Dengan masuknya Sumsel dalam jajaran provinsi dengan infrastruktur terbaik nasional, Herman Deru membuktikan kepemimpinannya mampu mengangkat daya saing Sumsel sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Jembatan Muara Lawai Dibangun Ulang

Salah satu pembangunan infrastruktur yang akan dipercepat yakni Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Dalam acara penandatanganan berita acara kesepakatan dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Sabtu (30/8/2025), Herman Deru menyebut rekonstruksi ini menjadi bukti kolaborasi positif antara pemerintah dan swasta.

"Jembatan ini ambruk karena usia dan beban kendaraan berat. Syukur alhamdulillah, Asosiasi Pertambangan Ba-



tubara langsung menyatakan kesediaannya membangun ulang. Ini bukti kepedulian dan rasa tanggung jawab yang besar," kata Herman Deru.

Ia menegaskan, proyek ini tidak boleh dipandang sebagai kewajiban sepihak, melainkan kerja sama yang saling menguntungkan. Jembatan tersebut akan memberi manfaat besar, baik untuk masyarakat maupun untuk kelancaran distribusi sektor pertambangan.

Dengan anggaran sebesar Rp 20 miliar yang sepenuhnya ditanggung oleh asosiasi, Herman Deru berharap pembangunan bisa selesai dalam waktu 210 hari.

"Saya harap tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat," ucapnya.

Gubernur juga meminta agar konstruksi modern yang digunakan benar-benar memperhatikan faktor ketahanan. Ia mengingatkan agar kualitasnya lebih baik daripada jembatan lama yang dibangun sejak tahun 1980-an.

"Pekerjaan ini harus diawasi ketat. Saya minta BPJN bersama OPD terkait memastikan setiap tahap sesuai standar," tambahnya.

Kepala BPJN Sumsel Panji Krisna Wardana menyambut baik komitmen seluruh pihak. Ia menilai, kerjasama semacam ini menjadi model ideal dalam pembangunan infrastruktur.

"Kalau semua pihak kompak, maka hasilnya akan maksimal. Jembatan bukan sekadar penghubung, tapi juga roda penggerak ekonomi masyarakat," jelas Panji. • ADV



## KARANG ASAM FESTIVAL JADI BENTENG KEARIFAN LOKAL BUDAYA

**Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan pentingnya Karang Asam Festival sebagai ajang menjaga dan mengembangkan kearifan lokal. Festival yang digelar di Alun-Alun Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim tersebut, menurutnya bukan hanya sekedar hiburan, melainkan wadah pelestarian budaya.**

Herman Deru menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia dan masyarakat yang berhasil menyelenggarakan festival tersebut dengan meriah. Ia mengaku sengaja hadir untuk pertama kalinya agar dapat melihat langsung kemegahan acara yang kini masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN).

"Saya ingin membuktikan sendiri bagaimana festival ini bisa tumbuh dari tingkat kelurahan hingga masuk KEN. Ini bukti bahwa budaya kita memiliki daya tarik nasional," ujar Herman Deru.

Menurutnya, Karang Asam Festival telah berhasil mempertahankan jati diri masyarakat Muara Enim. Berbagai tradisi lokal, seperti adat Mandi Kupek ke Ayek, kembali ditampilkan dalam suasana penuh kekeluargaan dan kegembiraan.

"Budaya adalah identitas kita. Kita wa-

jib menjaga dan menghormati kearifan lokal agar generasi mendatang tetap mengenalnya," jelasnya.

Selain sebagai ruang pelestarian budaya, festival ini juga memberi ruang bagi pelaku seni lokal untuk berkarya.

Pentas tari, musik tradisional, hingga atraksi budaya khas Muara Enim ditampilkan dengan kemasan menarik sehingga menjadi tontonan sekaligus tuntunan.

Herman Deru menyebut Karang



Asam Festival juga menjadi kebanggaan bagi Sumsel. Masuknya ke daftar Karisma Event Nusantara menjadi pengakuan bahwa event lokal pun bisa memiliki daya saing nasional.

“Bagi saya, ini adalah prestasi luar biasa. Mari kita terus jaga dan kembangkan bersama,” tegasnya.

Asisten Deputi Event Daerah Kementerian Pariwisata RI, Reza Fahlevi, turut memberikan apresiasi. Ia menyebut Karang Asam Festival sebagai salah satu event budaya terbaik di Indonesia.

“Event ini bukan hanya milik Muara Enim, tetapi juga milik bangsa. Karena itu, pemerintah pusat mendukung penuh agar bisa terus berkembang,” ujarnya.

Bupati Muara Enim, Edison, menambahkan festival ini berlangsung selama sepekan, 1-7 September 2025. Menurutnya, kegiatan ini lahir dari inisiatif warga yang ingin melestarikan budaya dengan cara kreatif dan profesional.

“Festival ini adalah cerminan kebersamaan masyarakat. Budaya, seni, dan ekonomi dipadukan menjadi satu kekuatan,” katanya.

Ia berharap Karang Asam Festival terus menjadi ikon budaya Muara Enim yang membanggakan sekaligus memperkuat identitas daerah.

### Ajak Masyarakat Aktif dalam Pelestarian Warisan Budaya

Sementara secara terpisah Pemprov Sumsel juga terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya bangsa. Hal ini diwujudkan dengan digelarnya Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno bertema “Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Menyelamatkan Naskah Kuno melalui Konservasi dan Alih Media” di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Drs H. Edward Candra MH secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kebesaran suatu bangsa bukan hanya diukur dari kemajuan ekonomi dan teknologi, melainkan juga dari keberhasilan menjaga sejarah, budaya, serta peradaban yang diwariskan para pendahulu.

“Bangsa kita memiliki keragaman budaya yang merupakan aset tak ternilai. Salah satunya adalah naskah kuno yang menyimpan pengetahuan, nilai



luhur, dan identitas bangsa. Tugas kita adalah melestarikan agar tidak punah,” ujar Edward.

Menurutnya, tantangan dalam pelestarian naskah kuno tidaklah ringan. Banyak naskah yang kini rapuh dimakan usia, kertas menguning, tinta memudar, bahkan sebagian terancam hilang karena minimnya perawatan dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumsel telah melakukan berbagai upaya pelestarian. Program ini sejalan dengan Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel ke-8, yakni mewujudkan Sumsel yang religius, toleran, serta berbudaya melalui pelestarian Aksara Ulu dan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal.

“Pelestarian naskah kuno adalah kontribusi strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang religius, berbudaya, dan berkarakter. Ini harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan

Provinsi Sumsel, M. Zaki Aslam, menjelaskan bahwa tema sosialisasi dipilih untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, naskah kuno merupakan warisan yang sangat berharga, namun kondisinya semakin rentan jika tidak segera dilakukan konservasi dan alih media.

Zaki menuturkan, konservasi berarti menjaga dan merawat naskah kuno agar tetap lestari secara fisik. Sementara alih media bertujuan memindahkan isi naskah ke bentuk digital sehingga lebih tahan lama, mudah dipelajari, dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

Ia menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, memberikan pengetahuan teknis tentang konservasi, serta mendorong alih media digital.

“Harapannya, terbentuk jejaring kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat sehingga warisan berharga ini dapat lestari sepanjang masa,” pungkas Zaki. ●



# PERTANIAN SUMSEL MASUK LIMA BESAR NASIONAL

**Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal ini ia sampaikan dalam acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, yang juga dihadiri pejabat Kementerian Pertanian.**

Usai meninjau lokasi penanaman padi apung, Herman Deru mengaku bangga dengan capaian hasil uji coba yang dikelola berbagai lembaga.

"Ini hasilnya membanggakan. Artinya kalau diimplementasikan dengan kondisi seadanya saja bisa berhasil, tentu di lapangan juga akan sukses," ujarnya.

Herman Deru menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dan stakeholder terkait untuk mendorong petani memanfaatkan varietas baru yang tersedia.

Menurutnya, benih unggul hasil inovasi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh petani.

Selain soal benih, ia juga menggarisbawahi pentingnya disiplin petani dalam memanfaatkan fasilitas yang su-

dah tersedia. Ia mencontohkan kemudahan akses pupuk yang kini diberikan pemerintah pusat. "Kemudahan ini jangan disia-siakan. Disiplin menjadi kunci," tegasnya.

Herman Deru juga menyoroti strategi peningkatan produksi dengan intensifikasi. Setelah keberhasilan program cetak sawah 48 ribu hektar, kini Sumsel diarahkan pada peningkatan indeks pertanaman. Dengan demikian, produktivitas lahan bisa meningkat tanpa perlu memperluas areal.

"Kita bisa bayangkan kalau bisa panen dua kali dalam setahun, maka kita bisa mengejar capaian provinsi di Jawa. Apalagi saat ini indeks pertanaman kita baru 1,1 kali setahun, tapi sudah masuk lima besar nasional," jelasnya.

Selain itu, ia memberi perhatian khu-

sus terhadap masalah "loosis", yakni kehilangan hasil pasca panen akibat cara tradisional yang tidak efisien. Menurutnya, efisiensi harus ditingkatkan agar produksi benar-benar maksimal.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyampaikan visinya agar lokasi pengembangan inovasi pertanian bisa sekaligus menjadi tujuan agrowisata. Hal ini dinilai dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pujian dari Kementan atas langkah Sumsel dalam inovasi padi apung dan gerakan mandiri benih juga disambut optimis oleh Gubernur. Menurutnya, capaian ini bukan hanya kebanggaan Sumsel, tetapi juga kontribusi nyata bagi Indonesia.

"Dengan kerja sama semua pihak, kita



optimis swasembada pangan dapat terwujud sesuai target nasional,” tutup Herman Deru.

### Tembus 8 Ton per Hektar

Upaya Pemprov Sumsel dalam mewujudkan kedaulatan pangan membuahakan hasil. Bahkan Gubernur Herman Deru memimpin panen raya Padi IP 200 di Desa Majuria, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin bersama Staf Khusus Menteri Pertanian RI, Prof. Herodian.

Panen ini menjadi tonggak penting keberhasilan pertanian Sumsel. Dengan produktivitas rata-rata 7,8-8 ton per hektar, Banyuasin kembali menunjukkan potensinya sebagai lumbung pangan nasional.

“Ini hasil luar biasa, tapi jangan puas dulu. Konsistensi harus dijaga,” tegas Herman Deru.

Ia menekankan, produktivitas tinggi tak hanya ditentukan oleh benih dan pupuk, tapi juga disiplin petani. Tanpa pemantauan pH, waktu tanam dan pemupukan yang tepat, hasil panen akan stagnan atau bahkan menurun.

Herman Deru juga mengingatkan bahwa program nasional untuk menghentikan impor pangan harus dibarengi dengan peningkatan produksi di dalam negeri. Menurutnya, kemampuan men-

cukupi kebutuhan sendiri adalah bentuk harga diri bangsa.

“Jangan sampai kita gagah tolak impor, tapi kekurangan stok. Kita harus jadi negara yang bisa produksi sendiri,” seru Herman Deru.

Kabupaten Banyuasin sebagai produsen padi terbesar keempat nasional menunjukkan peran strategisnya dalam rantai ketahanan pangan. Bersama Kabupaten OKU Timur dan OKI, ketiganya menjadi tulang punggung produksi padi di Sumsel.

Tak hanya menghadiri panen, Herman Deru membuka ruang dialog dengan petani. Ia merespons langsung berbagai aspirasi, termasuk pengadaan alat pertanian dan pembangunan infrastruk-

tur pendukung.

Untuk mendukung produktivitas, Sumsel telah menyalurkan bantuan benih untuk lebih dari 100.000 hektare lahan, melakukan cetak sawah rakyat dan mengalokasikan alsintan melalui Brigade Pangan.

Prof. Herodian menambahkan, Kementerian RI juga akan memperluas area sawah hingga 100 ribu hektare di Sumsel dan mendorong Pertamina membuka jaringan distribusi di Karang Agung Ilir agar petani bisa menikmati subsidi bahan bakar.

“Target kami jelas, Banyuasin sebagai penghasil beras terbesar keempat harus bisa membawa Sumsel jadi nomor satu,” tandasnya. •ADV



# PERTUMBUHAN EKONOMI TERTINGGI KEDUA DI SUMATERA

**Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang ekonomi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI), Amalia Adininggar Widyasanti secara langsung menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Sumsel yang menempati posisi kedua tertinggi di Pulau Sumatera pada triwulan II tahun 2025.**

**D**alam acara penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Sumsel dengan BPS RI serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumsel di Griya Agung, Jumat (12/9/2025), Amalia menyebut capaian ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Sumsel mencatat pertumbuhan

menunjukkan kekuatan ekonomi Sumsel yang terus berkembang, meski masih menyisakan tantangan pemerataan.

Amalia mengingatkan bahwa masih terdapat ketimpangan antar wilayah, seperti perbedaan PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim yang jauh di atas rata-rata provinsi dibandingkan dengan Kabupaten Empat Lawang.

masyarakat secara lebih merata.

Amalia juga menekankan pentingnya sektor pariwisata. Menurutnya, Sumsel memiliki potensi wisata budaya dan alam yang jika dikelola secara berkualitas, akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, ia turut meminta dukungan seluruh kepala daerah untuk menyukseskan agenda



ekonomi 5,42 persen, hanya kalah dari Kepulauan Riau. Ini prestasi luar biasa," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Sumsel juga menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua di Sumatera dengan kontribusi mencapai 13,82 persen. Menurutnya, angka tersebut

"Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian ke depan," ujarnya.

Selain itu, ia menilai hilirisasi berbasis pertanian dan perkebunan harus menjadi motor penggerak baru ekonomi Sumsel. Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, nilai tambah dari sektor ini diyakini mampu mendorong kesejahteraan

sensus dan pemutakhiran data statistik. Kolaborasi dengan BPS disebut penting agar kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menyambut baik apresiasi Kepala BPS RI tersebut. Ia menyatakan komitmennya bahwa setiap program pembangunan di Sumsel

akan berbasis pada data akurat. "Kita tidak boleh lagi membangun dengan asumsi, tapi harus berdasarkan data," tegasnya.

Herman Deru juga menegaskan, integrasi data melalui Data Terpadu Statistik dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi pedoman utama. Sumsel bahkan menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Riau yang menandatangani kesepakatan lengkap bersama bupati/wali kota dan BPS.

"Ini bukti nyata bahwa kita semua satu suara untuk menjadikan data sebagai landasan pembangunan," kata Herman Deru. Ia pun mengapresiasi seluruh kepala daerah di Sumsel yang sudah menunjukkan komitmen terhadap agenda besar ini.

Kepala Diskominfo Sumsel, Rika Efianti, menambahkan, penandatanganan ini akan memperkuat kerjasama strategis dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik. "Bagi pemerintah daerah, ini sangat membantu dalam pengambilan kebijakan yang tepat," jelasnya.

### Wujudkan Data Tunggal Percepatan Pembangunan

Sebelumnya Gubernur Herman Deru bersama Kepala BPS RI Dr. Amalia Adininggar Widyasanti sepakat memperkuat kerja sama dalam penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel berkomitmen mendukung penuh kebijakan nasional terkait penguatan data. Ia menyebut, DTSEN akan menjadi pondasi penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.

"Sumsel siap menjadi daerah yang responsif terhadap data. Kami mendukung DTSEN sebagai dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran," ujar Gubernur Herman Deru.

Gubernur Herman Deru menilai kerja sama ini sebagai peluang besar bagi Sumsel. Dengan data tunggal, ia optimistis kebijakan pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga penurunan stunting dapat lebih efektif.

Ia juga menekankan tantangan geografis Sumsel yang luas dan be-

ragam. Dengan data detail, program pembangunan bisa lebih tepat menjangkau daerah terpencil.

Sementara itu, Amalia menjelaskan bahwa DTSEN merupakan amanat Presiden RI. Data berbasis by name by address ini menjadi instrumen penting dalam memastikan program bantuan sosial dan pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

"DTSEN menuntut kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah harus aktif menyampaikan data awal yang kemudian diverifikasi oleh BPS," jelas Amalia.

Ia menegaskan, data mikro dan makro yang dikelola BPS akan menjadi pelengkap DTSEN. Dengan kombinasi tersebut, pemerintah memiliki gambaran utuh kondisi sosial ekonomi masyarakat. ●





# TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD JABAR HARUS DIHAPUS

**Besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, nilai tunjangan tersebut dinilai terlalu fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan.**

Berdasarkan data, tunjangan perumahan DPRD Jabar saat ini mencapai Rp62 juta per bulan untuk anggota, Rp65 juta untuk wakil ketua dan Rp71 juta untuk ketua DPRD.

Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan lain seperti komunikasi, transportasi, reles, jabatan, hingga paket penunjang kegiatan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa besaran tunjangan tersebut bukanlah kebijakan yang lahir di masa kepemimpinannya.

Menurut Dedi, regulasi mengenai tunjangan DPRD Jabar merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 189 Tahun 2021 yang ditetapkan saat Ridwan Kamil masih menjabat.

"Pergub itu terbit pada 2021 di era Gubernur Ridwan Kamil. Sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025, tidak ada peningkatan tunjangan perumahan DPRD," ujar Dedi Mulyadi, Minggu 7 September 2025.

Dedi juga menekankan bahwa dirinya terbuka terhadap opsi evaluasi, bahkan penghapusan tunjangan, apabila dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan menyinggung rasa keadilan publik.

"Kalau tunjangan jabatan yang diterima penyelenggara negara melukai hati masyarakat, tidak masalah kalau dihapus," tegasnya.

Dedi Mulyadi menyebut dirinya telah lebih dulu memberi contoh dengan memangkas fasilitas dan tunjangan gubernur.

"Tunjangan perjalanan dinas Gubernur dari Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp100 juta. Tidak ada lagi fasilitas baju dinas baru, kendaraan dinas baru, dan berbagai pengeluaran seremonial lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, langkah ini diambil untuk menunjukkan komitmen efisiensi anggaran sekaligus solidaritas terhadap kondisi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana menegaskan, tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan bagi anggota DPRD sejak 2021.

"Tidak ada kenaikan (gaji dan tunjangan). Semua masih sesuai Pergub 189/2021," kata Dodi, Sabtu 6 September 2025.

Dodi menjelaskan, rata-rata total penghasilan anggota DPRD Jabar, termasuk gaji dan seluruh tunjangan, mencapai sekitar Rp90 juta per bulan.

"Kalau ditotal, sekitar Rp90 jutaan, di bawah Rp100 juta," jelasnya.

Ia menambahkan, komponen penghasilan DPRD Jabar meliputi gaji pokok, tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, tunjangan reles, transportasi, hingga dana operasional yang semuanya diatur secara resmi



dalam Pergub.

Isu tunjangan besar untuk pejabat kembali menjadi bahan kritik publik, terutama di saat banyak masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Sejumlah pihak menilai, besarnya fasilitas tersebut menunjukkan kesenjangan dengan realitas kehidupan warga.

Dedi Mulyadi sendiri menyatakan akan mengkaji ulang seluruh komponen tunjangan, termasuk bagi DPRD, agar lebih sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Sementara, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai tunjangan yang diterima pimpinan dan anggota DPRD Jabar terlalu besar. Karenanya, jumlah itu harus dirasionalisasi.

Kristian mengatakan, rasionalisasi tunjangan pimpinan dan anggota dewan harus mempertimbangkan kepatutan secara etis terhadap kondisi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

“Tentunya dalam sudut pandang tata kelola urusan publik, perlunya melakukan efisiensi guna mengurangi beban anggaran pemerintah daerah,” ujar Kristian, Sabtu 6 September 2025.

Kata dia, jika dibuat skala prioritas antara tunjangan perumahan bagi anggota DPRD dengan alokasi dana pembangunan untuk kepentingan publik, secara etis dan rasional, prioritas anggaran untuk tunjangan perumahan bagi DPRD sama sekali tidak perlu dan tidak mendesak.

“Jika pun dihapuskan, maka lebih baik,” katanya.

Selain itu, kata dia, pimpinan dan anggota dewan yang saat ini duduk di kursi parlemen merupakan orang-orang yang sudah selesai dalam urusan pemenuhan kebutuhan pribadinya, termasuk kendaraan dan rumah.

“Secara etis dan moral tidak pantas bagi mereka melakukan pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah dari anggaran publik yang sumbernya diperoleh dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat,” ucapnya.

Kinerja dari pimpinan dan anggota DPRD Jabar kata dia, seharusnya datang dari kesadaran diri, bukan dari in-

sentif tunjangan.

Maka, menurutnya, sebaiknya tunjangan perumahan bagi anggota DPR dan DPRD dihapuskan. Selanjutnya pangkas selisih antara akumulasi hak-hak keuangan anggota DPRD dengan upah minimum provinsi (UMP) dan gaji

guru honorer yang terendah.

Berdasarkan data yang dimiliki Kristian, UMP Jawa Barat pada 2025 berada di kisaran Rp 2,1 juta per bulan.

“Artinya, gaji anggota DPRD Jawa Barat sebenarnya Rp 4,2 juta per bulan juga sudah cukup besar,” ucapnya. ●



**Berikut adalah rincian pendapatan anggota DPRD Jabar per bulan sebelum dipotong pajak:**

<b>ANGGOTA DPRD JABAR</b>	
• Gaji:	Rp2.250.000
• Uang paket:	Rp225.000
• Tunjangan jabatan:	Rp3.262.500
• Tunjangan AKD:	Rp130.500
• Tunjangan komunikasi:	Rp21.000.000
• Tunjangan reses:	Rp21.000.000
• Tunjangan perumahan:	Rp62.000.000
• Tunjangan transportasi:	Rp17.500.000
• Pelaksanaan reses:	Rp18.987.500 (3 kali setahun)
• Jaminan kesehatan termasuk keluarga:	Rp4.000.000
<b>KETUA DPRD JABAR</b>	
• Gaji :	Rp3.000.000
• Uang paket:	Rp300.000
• Tunjangan jabatan :	Rp4.350.000
• Tunjangan AKD:	Rp326.250
• Tunjangan komunikasi:	Rp21.000.000
• Tunjangan reses:	Rp21.000.000
• Tunjangan perumahan:	Rp71.000.000
• Tunjangan transportasi:	Rp17.500.000
• Pelaksanaan reses:	Rp18.987.500 (3 kali se tahun)
• Pemeliharaan kendaraan:	Rp34.992.000
• Jaminan kesehatan termasuk keluarga:	Rp4.000.000
• Dana operasional:	Rp18.000.000
<b>WAKIL KETUA DPRD JABAR</b>	
• Gaji:	Rp2.400.000
• Uang paket:	Rp240.000
• Tunjangan jabatan:	Rp3.480.000
• Tunjangan AKD:	Rp217.500
• Tunjangan komunikasi:	Rp21.000.000
• Tunjangan reses:	Rp21.000.000
• Tunjangan perumahan:	Rp65.000.000
• Tunjangan transportasi:	Rp17.500.000
• Pelaksanaan reses:	Rp18.987.500 (3 kali setahun)
• Pemeliharaan kendaraan:	Rp32.481.000
• Jaminan kesehatan termasuk keluarga:	Rp4.000.000
• Dana operasional:	Rp9.600.000

# FOKUS PENGUATAN DESA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

**Karang Taruna sebagai garda terdepan di desa dan kelurahan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.**

**B**erdasarkan data terbaru, di Jawa Tengah tingkat kemiskinan berhasil turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai peran Karang Taruna belum optimal dalam mendorong penurunan tersebut.

Karena itu, ia berharap organisasi kepemudaan ini bisa lebih terlibat secara langsung dalam setiap program pembangunan desa.

“Penguatan basis desa adalah kunci. Jika Karang Taruna aktif di 8.760 desa dan kelurahan di Jawa Tengah, maka mereka akan menjadi tulang punggung keberhasilan pembangunan. Dengan begitu, penurunan angka kemiskinan akan lebih terasa

dampaknya bagi masyarakat,” tegas Luthfi.

Ahmad Luthfi sendiri secara resmi mengukuhkan Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2030 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin 8 September 2025.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan peran strategis karang taruna sebagai garda terdepan di desa dan kelurahan.

“Hari ini kita lakukan pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah sekaligus ka-



bupaten/kota, yang nantinya akan kita turunkan sampai tingkat desa dan kelurahan,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pengurus Karang Taruna saat ini cukup besar, terutama dalam memperkuat posisinya sebagai tulang punggung kegiatan sosial masyarakat di tingkat akar rumput.

Di Jawa Tengah, terdapat 5.960 organisasi Karang Taruna yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah tersebut, kata Luthfi, merupakan potensi besar untuk membangun desa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

“Karang Taruna harus bisa hadir untuk mendukung perkembangan ekonomi, memaksimalkan potensi desa, sekaligus membantu penurunan angka kemiskinan. Inilah peran nyata Karang Taruna dalam pamban-

gunan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, I Gede Ananta Wijaya Putra, menyatakan siap melaksanakan arahan Gubernur.

Menurutnya, langkah pertama yang akan ditempuh adalah melakukan konsolidasi menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan.

“Setelah konsolidasi, kita akan lakukan sosialisasi program prioritas sesuai arahan Gubernur, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah sosial di desa,”

kata Ananta.

la menambahkan, pada Oktober 2025 mendatang, Forum Karang Taruna Jateng juga akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang akan merumuskan program kerja terarah dan berjenjang hingga ke tingkat desa/kelurahan.

“Karang Taruna hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial di Jawa Tengah, agar masyarakat semakin sejahtera. Kami siap bekerja bersama Gubernur Ahmad Luthfi untuk mewujudkan Jawa Tengah yang lebih maju dan berdaya,” pungkasnya. ●



# Geopark Kaldera Toba PERTAHANKAN STATUS GREEN CARD UNESCO GLOBAL

**Geopark Kaldera Toba (GKT) kembali mengukir prestasi di kancah internasional dengan mempertahankan status Green Card (kartu hijau) dalam keanggotaannya di UNESCO Global Geopark (UGGp).**

Status tertinggi dalam keanggotaan Global Geoparks Network (GGN) tersebut ditetapkan pada Sidang Komite Eksekutif ke-11 Konferensi Internasional GGN yang digelar di Kutrakura UNESCO Global Geopark, La Araucania, Chile, Sabtu 6 September 2025.

General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UGGp Azizul Kholis, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian ini.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan kartu hijau tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, terutama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang dinilai konsisten memberikan perhatian penuh

terhadap pengelolaan Kaldera Toba.

"Capaian ini adalah momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan Kaldera Toba ke arah yang lebih berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya di kawasan Danau Toba," ujar Azizul.

Azizul juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota di kawasan Danau Toba, hingga pemerintah pusat yang ikut mendorong pemenuhan seluruh rekomendasi UNESCO. Tanpa dukungan lintas sektor, status bergengsi ini dinilai sulit diraih kembali.

Pada kesempatan yang sama, Azizul menyerahkan plakat kenang-kenangan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution kepada Zouros Nikolaos, President of The Executive Board of The Global Geoparks Network, sebagai simbol penghargaan dan ucapan terima kasih.

Sebelumnya, UNESCO memberikan sejumlah rekomendasi kepada Geopark Kaldera Toba agar bisa terus memenuhi standar UGGp. Beberapa di antaranya, warisan geologi dan interpretasi yang lebih terstruktur. Identifikasi warisan alam, budaya, dan warisan tak benda, peningkatan visibilitas, promosi, dan kemitraan strategis dan penguatan jejaring, pelatihan, serta pengembangan kapasitas SDM lokal.



Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti secara konsisten, sehingga GKT berhasil mempertahankan status kartu hijau.

Relawan Barisan Bobby Nasution (BBN) Indonesia memberikan apresiasi atas capaian membanggakan GKT yang berhasil meraih status Green Card atau Kartu Hijau dalam keanggotaan UGGp.

Pencapaian ini menandai keberhasilan pengelolaan kawasan Danau Toba yang sebelumnya sempat mendapat status Yellow Card (Kartu Kuning) akibat sejumlah catatan evaluasi dari UNESCO.

Ketua Relawan BBN Indonesia, Ricky Rizaldi Rangkuti, menilai capaian ini merupakan buah dari konsep Kolaborasi Sumut Berkah, visi yang diusung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur H. Surya.

Menurut Ricky, visi tersebut mampu mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha, untuk bahu-membahu memperbaiki tata kelola kawasan Geopark Kaldera Toba.

"Kita telah menyaksikan bagaimana

semangat kolaborasi yang dibangun oleh Pak Bobby Nasution dan H. Surya memberi dampak nyata. Semua pihak bersinergi, melakukan evaluasi, dan memperbaiki pengelolaan kawasan Geopark Kaldera Toba. Hasilnya, kerja keras itu membuahkan status Green Card yang kini menjadi kebanggaan bersama," ujar Ricky, Minggu 7 September 2025.

Ricky menambahkan, pencapaian ini seharusnya tidak berhenti sebagai simbol prestasi semata, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh pe-

mangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya menjaga standar pengelolaan sesuai penilaian UGGp, termasuk dalam aspek pelestarian lingkungan, adat budaya, sejarah, serta kekayaan alam yang ada di sekitar Danau Toba.

"Ke depan, status ini harus dijaga. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten se-kawasan Danau Toba perlu terus konsisten agar pengelolaan geopark tidak hanya mempertahankan status Green Card, tetapi juga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal," tegasnya. ●



# KOLABORASI KEMENTERIAN PU PERBAIKI KERUSAKAN FASILITAS UMUM

**Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum memperbaiki berbagai fasilitas umum di Jakarta yang mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan.**

**T**otal kerugian kerusakan fasilitas umum yang awalnya diperkirakan Rp51,1 miliar, kini membengkak menjadi Rp81,1 miliar.

Penambahan jumlah kerugian ini disebabkan adanya kerusakan pada dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yaitu di Senen dan depan Polda Metro Jaya yang diperkirakan sekitar Rp19 miliar.

Selain itu, ada kerusakan pada CCTV dan 18 lampu lalu lintas, di mana 17 di antaranya telah selesai diperbaiki.

"Kemarin saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa jumlah kerugiannya Rp 51 M, ternyata setelah dihitung kembali ada dua JPO

yaitu di Senen dan juga di depan Polda yang mengalami kerusakan serius dan ternyata baru dihitung oleh Dinas Bina Marga," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota, Selasa 2 September 2025.

Untuk mempercepat perbaikan, Pemprov DKI Jakarta akan fokus memperbaiki infrastruktur MRT, Transjakarta, Bank Jakarta, dan sejumlah lampu lalu lintas.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengerjakan perbaikan dua JPO yang mengalami kerusakan

"Saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan

juga JPO di Polda untuk dibantu oleh Pemerintah Pusat," kata Pramono.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo pun menyanggupi permintaan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki dua JPO yang mengalami kerusakan.

Dody menargetkan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tujuh hari dan secara fungsional bisa segera dioperasikan kembali.

Dody menambahkan, biaya perbaikan akan diambil dari pagu anggaran sebesar Rp900 miliar yang dialokasikan untuk penanganan perbaikan infrastruktur yang rusak di seluruh Indonesia pasca-aksi unjuk rasa.

"Itu masih dalam pagu anggaran



yang sudah kami hitung di awal, dari seluruh provinsi seluruh Indonesia itu kami sudah menganggarkan sekitar Rp900 miliar. Salah satunya nanti adalah yang kita pakai di dua JPO ini," tegas Dody.

Diketahui, pemerintah menanggung biaya perbaikan fasilitas umum imbas demo ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa kementerian teknis bersama dengan pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh demo dan menyiapkan langkah-langkah pemulihan agar layanan publik dapat segera kembali normal.

Menko AHY menjelaskan bahwa bersama dengan Kementerian PU, mereka tidak hanya memantau situasi di lapangan, tetapi juga melakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung pemerintahan, kantor DPRD, serta fasilitas umum.

"Contohnya adalah JPO yang mengalami kerusakan atau kebakaran. Dari Kementerian PU, nanti Pak Menteri akan menjelaskan lebih rinci bahwa anggaran telah dialokasikan untuk memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tersebut. Selain itu, pemerintah daerah, termasuk Transjarkarta, telah merencanakan langkah-langkah cepat agar operasional dapat kembali seperti semula," ungkap Menko AHY kepada media sebelum Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Senin 8 September 2025.

Pemerintah mencatat bahwa kerusakan tersebut tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan nilai kerusakan diperkirakan mencapai Rp 900-950 miliar. Namun, angka ini masih dapat berubah seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan di lapangan.

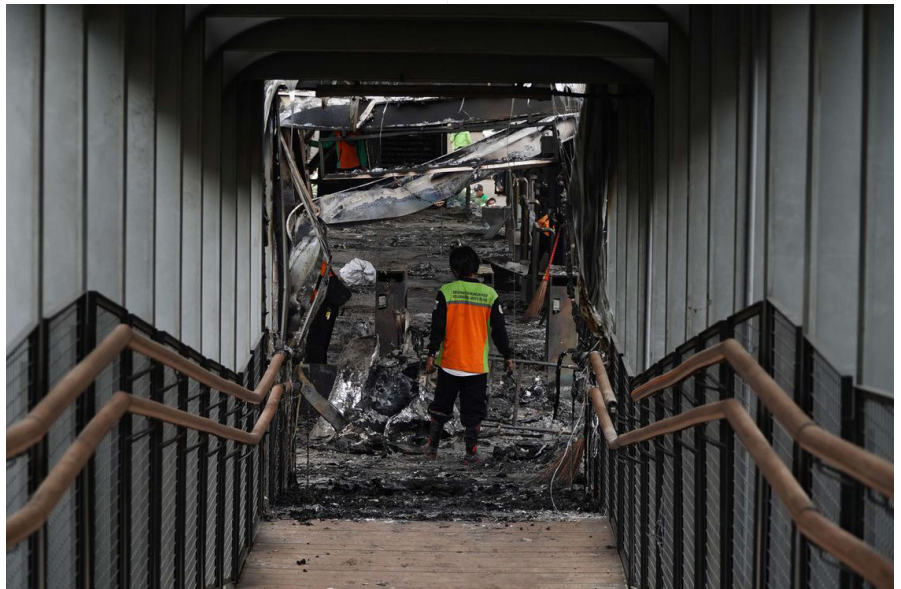
Menko AHY menjelaskan bahwa anggaran untuk pemulihan akan didukung oleh pos kedaruratan dalam APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ya, tadi kami berbicara, sudah teri-

dentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan nilai sekitar Rp900 hingga Rp950 miliar. Angka ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail. Itu dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Biasanya memang ada anggaran untuk kedaruratan, dan pos itu yang digunakan," kata Menko AHY.

Selain memperhatikan aspek pemulihan, Menko AHY juga mengungkapkan pentingnya proyek-proyek strategis yang saat ini sedang diawasi oleh pemerintah.

Proyek tersebut mencakup pengembangan Giant Sea Wall dan perlindungan Pantura Jawa melalui badan otorita khusus, serta kelanjutan pem-



Kota-kota yang mengalami kerusakan parah mencakup Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. Menko AHY menekankan bahwa perbaikan infrastruktur serta fasilitas umum di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman dalam waktu dekat.

bangunan kereta cepat.

Dalam konteks ini, Menko AHY menanggapi aspirasi masyarakat terkait isu 17+8 dengan menekankan perlunya dialog terbuka antara pemerintah, parlemen, dan berbagai elemen masyarakat.

Dia berpendapat bahwa menjaga ruang komunikasi yang sehat sangat penting agar solusi bersama dapat dicapai. ●

# PASIEN BPJS GIZI BURUK DITOLAK RS SWASTA DI SERANG

Gubernur Banten Andra Soni Turun Tangan

**Kasus balita Umar Ayyasy usia 3 tahun, putra pertama pasangan Tiara dan Irwan Suhendar menjadi sorotan publik setelah sempat dirawat di RS Hermina Ciruas akibat diare akut, dehidrasi, infeksi paru-paru, dan gizi buruk.**

Umar dipulangkan meski masih menggunakan selang nutrisi, lalu kembali dibawa ke RS Hermina Ciruas dua hari kemudian.

Peristiwa bermula ketika Umar yang mengalami gizi buruk dan penyakit paru-paru dibawa keluarganya ke sebuah RS swasta di Ciruas pada 26 Agustus 2025.

Pada 1 September, pihak rumah

sakit menyatakan kondisi pasien stabil dan memperbolehkan pulang, meskipun pasien masih bergantung pada selang untuk asupan susu.

Namun, kondisi sang anak memburuk keesokan harinya, 2 September 2025. Keluarga kembali membawanya ke rumah sakit yang sama. Sayangnya, menurut keterangan keluarga, pihak RS menolak memberikan rawat inap dengan alasan pasien adalah peserta BPJS yang baru saja keluar dari perawatan, ditambah alasan ruang rawat inap penuh.

"Pihak rumah sakit hanya mengganti selang, memberikan obat penurun panas, lalu menyuruh pasien pulang," ujar paman pasien, Dedi Heryanto, Selasa 9 September 2025.

Keluarga akhirnya membawa anak itu ke RSUD Banten. Di sana, tim medis langsung memberikan penanganan darurat karena kondisi pasien sudah kritis. Namun, nyawa sang anak tidak

tertolong dan meninggal dunia pada 5 September 2025.

Tiara mengungkapkan rasa kecewa atas pelayanan rumah sakit yang diduga menolak Umar saat datang ke RS Hermina Ciruas.

"Di bawa ke UGD (RS Hermina Ciruas), hari Selasa 2 September 2025, Umar kondisi (nafasnya) terengah-engah, sampe tangannya menggigil, mata melotot," kata Tiara.

Gubernur Banten Andra Soni menanggapi serius kasus penolakan pasien Umar di RS Hermina Ciruas.

Andra menegaskan, insiden seperti ini tidak boleh terulang lagi di wilayah Banten. Ia sudah memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

"Saya telah memerintahkan Dinkes untuk berkoordinasi dan memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi di Banten," kata Andra



Soni di Kota Serang, Selasa 9 September 2025.

Menurut Andra, cakupan jaminan kesehatan di Provinsi Banten sudah cukup baik melalui program Universal Health Coverage (UHC). Karena itu, masyarakat seharusnya bisa mendapatkan pelayanan maksimal di seluruh rumah sakit tanpa terkendala masalah administrasi.

"Tingkat UHC kita sudah baik. Jadi setiap rakyat yang membutuhkan layanan rumah sakit di wilayah Banten harus bisa dilayani dan di-cover oleh BPJS," ujarnya.

Kasus ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Serang. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Serang, Rahmat Fitriadi, mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan keterangan lengkap baik dari pihak rumah sakit maupun keluarga korban.

"Saat ini kita sedang melengkapi data, baik dari rumah sakit maupun pihak keluarga, untuk menindaklanjuti kasus ini," kata Rahmat.

Rahmat menegaskan, hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemberian sanksi kepada pihak rumah sakit jika

terbukti lalai dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS.

Kasus ini memicu keprihatinan masyarakat luas karena menyangkut hak pasien miskin yang dijamin negara melalui BPJS Kesehatan. Publik menilai tidak semestinya rumah sakit menolak pasien dengan alasan administrasi, apalagi dalam kondisi darurat.

Dengan pernyataan tegas Gubernur Andra Soni, diharapkan sistem pelayanan kesehatan di Banten lebih ketat diawasi agar kejadian serupa tidak lagi menelan korban.

Wakil Gubernur Banten, A Dimiyati Natakusumah menegaskan, rumah sakit di wilayah Banten tidak boleh menolak pasien, terlebih yang menggunakan jaminan BPJS Kesehatan.

Ia menekankan, rumah sakit wajib membantu masyarakat miskin yang membutuhkan layanan kesehatan.

Menurut Dimiyati, pasien kelas 3 sudah mendapat bantuan dari pemerintah melalui program jaminan kesehatan.

Dimiyati menyatakan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh pada kasus ini.

"Kita evaluasi ada unsur itu enggak. Intinya itu adalah merupakan salah

satu sisi pemerintah melakukan pengawasan, bukan pengawasan kepada rumah sakit internal pemerintah saja, termasuk rumah sakit privat, swasta atau rumah sakit umum," papar dia.

Dia menegaskan, seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, wajib melaksanakan aturan yang digariskan.

Sementara, Wakil Direktur RS Hermina Ciruas, Anita membantah menolak pasien BPJS. Ia menyebut, penanganan pasien balita sudah sesuai prosedur.

Anita mengungkapkan, pasien yang meninggal bernama Umar Ayyasy saat itu sudah mendapat penanganan sesuai prosedur rumah sakitnya.

Ia menjelaskan keterbatasan ruang rawat inap membuat pihaknya menyarankan pasien menunggu di IGD sambil dilakukan observasi.

"Namun keluarga memilih membawa pasien ke RSUD Banten. Kami terbuka untuk evaluasi dan siap melakukan perbaikan agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik," ujarnya, Selasa 9 September 2025.

"RS Hermina Ciruas juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berkomitmen memperbaiki pelayanan," sambungnya. •





## JATIM GERBANG BARU NUSANTARA

**Dalam ajang strategis untuk memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus membuka peluang kerja sama internasional yang lebih luas bagi Jawa Timur.**

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan 14 Duta Besar dan calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Gedung Negara Graha di Surabaya, Rabu 10 September 2025.

Khofifah menegaskan bahwa diplomasi ekonomi kini menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.

Ia berharap para Dubes dapat menjadi jembatan untuk mempromosikan potensi perdagangan, investasi, pariwisata,

dan produk unggulan Jawa Timur di negara tempat mereka bertugas.

"Kami ingin para Dubes ikut mendukung program "Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara" agar potensi daerah ini semakin dikenal dunia," ujar Khofifah.

Khofifah juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah dan akan dikerjakan Pemprov Jatim, di antaranya pembangunan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder sebagai jalur logistik baru.

Penanggulangan banjir Kali Lamong yang sudah lama menjadi masalah klasik di Gresik dan sekitarnya. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang diproyeksikan melayani jutaan penduduk. Rencana pembangunan kereta gantung di Kota Batu untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.

Menurut Khofifah, proyek-proyek tersebut akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jatim dan berdampak

langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jawa Timur adalah penyumbang PDRB terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Kami punya tanggung jawab menjaga peran sebagai lokomotif perekonomian nasional," tegasnya.

Khofifah juga menyampaikan perkembangan ekonomi Jawa Timur. Pada Triwulan II-2025, ekonomi Jatim tumbuh 3,09 persen (q-to-q) dibandingkan Triwulan I-2025.

Pertumbuhan tertinggi dicatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang melesat hingga 16,53 persen.

Sementara secara tahunan (y-on-y), ekonomi Jatim mencatat pertumbuhan 5,23 persen, ditopang oleh sektor jasa perusahaan yang naik 9,76 persen.

"Capaian ini menunjukkan fundamental ekonomi Jatim cukup kuat meski menghadapi tantangan global," kata Khofifah.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bi-



dang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI sekaligus calon Dubes RI untuk Vietnam, Adam Mulawarman Tugio, menyampaikan komitmen Kemenlu untuk mendukung penuh upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Pemprov Jatim.

"Jawa Timur dipilih karena memiliki potensi besar untuk kerja sama internasional. Kami siap mendukung pengembangan ekspor dan investasi Jatim ke mancanegara," ujarnya.

Tak hanya pertemuan resmi, para Dubes juga meninjau langsung sektor manufaktur dan perikanan di Jawa Timur.

Dari hasil kunjungan lapangan, mereka melihat adanya potensi besar untuk memperkuat kerja sama, terutama dengan negara-negara Timur Tengah yang memiliki kemampuan finansial besar.

Adam menambahkan, peluang juga terbuka melalui outbound investment dengan perusahaan diaspora di Eropa.

"Perubahan generasi pengusaha di diaspora bisa menjadi momentum. Perusahaan yang kesulitan regenerasi bisa

diakuisisi dan diarahkan untuk memperkuat ekspor ke tanah air," jelasnya.

Sebagai catatan, sebanyak 14 Dubes hadir dalam pertemuan ini. Tiga di antaranya telah resmi dilantik, sementara 11 lainnya masih menunggu jadwal pelantikan.

Mereka akan bertugas di berbagai kawasan strategis dunia, mulai dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur,

Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Latin

Khoffiah optimistis, kehadiran para Dubes akan semakin membuka jalan bagi Jawa Timur untuk menembus pasar global.

"Kami percaya, dengan kolaborasi ini, peluang ekspor, investasi, dan pariwisata Jatim akan semakin terbuka luas," pungkaskannya. ●





# PANTAI SUWUK DENGAN HAMPARAN PASIR YANG BIKIN TAKJUB

**Indonesia memang tak pernah kehabisan cerita tentang keindahan alamnya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap jengkal tanah seolah menyimpan kejutan yang siap memikat hati siapa saja yang menjelajahnya.**

**S**alah satu permata tersembunyi itu terletak di pesisir selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Pantai Suwuk, sebuah pantai eksotik dengan lanskap unik yang tak banyak diketahui wisatawan.

Dikenal dengan hamparan pasir hitam yang membentang luas, panorama pegunungan di kejauhan, serta ombak

besar khas Laut Selatan, Pantai Suwuk adalah gabungan dari keindahan, tantangan, dan ketenangan dalam satu tempat.

Pantai Suwuk berada di Dusun Suwuk, Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, sekitar 50 kilometer dari pusat Kota Kebumen.

Meski tak berada di jalur utama pariwisata, akses menuju pantai ini terbilang cukup mudah. Dari Kota Gombong, pengunjung hanya butuh waktu sekitar 45 menit, sementara dari Karanganyar memakan waktu lebih dari satu jam.

Bahkan, bagi mereka yang melintasi Jalur Lintas Selatan (JLS) dari arah Yogyakarta atau Cilacap, Pantai Suwuk bisa langsung dijangkau tanpa perlu memutar jauh.

Setibanya di Pantai Suwuk, pengunjung akan disambut oleh pemandangan tak biasa: padang pasir berwarna hitam yang luas, dihiasi tanaman pandan laut,

cemara udang, dan rerumpunan pantai.

Di kejauhan, tiga bukit menjulang megah, menjadi latar dramatis yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia.

Keunikan ini menjadikan Pantai Suwuk sebagai lokasi yang sangat cocok untuk berbagai aktivitas luar ruang, seperti offroad di padang pasir atau sekadar berjalan kaki sambil menikmati angin laut yang segar.

Tak hanya menyuguhkan pesona darat, Pantai Suwuk juga menyimpan keindahan air tawar di sebelah baratnya yaitu Muara Sungai Telomoyo.

Di sini, wisatawan bisa memancing atau menikmati perahu wisata yang mengantar pengunjung menyusuri sungai dari hilir ke hulu, melewati panorama alam yang tenang dan hijau.

Pengalaman ini menawarkan ketenangan yang berbeda dari suasana pantai yang luas dan terbuka. Sebuah



pelarian singkat untuk mereka yang ingin menikmati dua dunia: laut dan sungai, dalam satu perjalanan.

Meski menawan, Pantai Suwuk juga menyimpan sisi liar yang harus dihormati.

Bibir pantainya yang curam dengan kemiringan hingga 35 derajat serta ombak besar yang bahkan dikabarkan lebih ganas dari ombak Pantai Parangtritis di

keseimbangan antara keindahan dan kehati-hatian, antara pesona dan tantangan.

Tempat ini mengajak kita untuk menikmati alam dengan cara yang lebih tenang, penuh hormat, dan tentu saja, lebih dalam.

Di tengah derasnya tren pariwisata populer, Pantai Suwuk hadir sebagai alternatif yang otentik dan menyentuh se-



Yogyakarta, menjadikan tempat ini tidak disarankan untuk berenang.

Peringatan keselamatan pun terpasang di beberapa titik, dan pengunjung diimbau untuk tetap berada di area aman.

Namun justru, keganasan ombak ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para pencinta fotografi alam dan pengamat kekuatan laut.

Pantai Suwuk bukan hanya sekadar destinasi wisata alam, tapi juga simbol

buah ruang untuk mengagumi keindahan tanpa harus terburu-buru mengejar keramaian.

Jam buka pantai ini 24 jam dan buka setiap hari. Yang artinya Pantai Suwuk ini dapat dikunjungi sepanjang hari dan kapanpun akan kesini, selalu terbuka bagi para pengunjung. Selain memandangi keindahan laut yang menakjubkan, ada beberapa kegiatan pula yang harus pengunjung lakukan.

Selain bermain air, di Pantai Suwuk ini

juga bisa melakukan kegiatan olahraga. Seperti, bermain bola dan voli pantai. Dengan bibir pantai yang landai dan air ombak yang tenang, akan membuat olahraga di sini lebih mengasyikan.

Di wisata pantai ini juga disediakan beberapa ekor kuda yang disewakan untuk pengunjung. Pengunjung bisa menyewa kuda-kuda itu untuk berkeliling melihat panorama keindahan pantai ini.

Selain berkeliling dengan kuda, pengunjung juga bisa berkeliling dengan mobil ATV. Pengunjung bisa menyewa mobil ATV dan berkeliling menikmati segarnya angin laut dan tenangnya air laut.

Pengunjung juga bisa ber-offroad dengan Mobil Jeep untuk mengelilingi pantai ini, tetapi tentunya didampingi



oleh orang yang sudah profesional.

Yang menarik di pantai ini, ada sebuah bangkai pesawat Boeing 737 yang tentunya bangkai tersebut merupakan buatan pengelola tempat tersebut dan bukan bangkai asli. Bangkai pesawat itu menjadi daya tarik tersendiri, di dalam pesawat tersebut disediakan pula pemutaran film.

Kamu juga bisa berkeliling menggunakan perahu yang disewakan, pengunjung bisa berkeliling menyaksikan keindahan Pantai Suwuk secara keseluruhan. Pengunjung juga bisa melihat Sungai Telomoyo yang bermuara di pantai ini, muara ini juga sebagai pemisah antara Pantai Suwuk dan Pantai Karang Bolong.

Setelah seharian capek bermain di Pantai Suwuk, ini saatnya Kamu wajib mencicipi makanan khas pantai ini, yaitu Pecel Lontong yang disantap dengan mendoan hangat. Dinikmati di pinggir pantai dengan anginnya yang sepoi-sepoi akan menjadikan kenikmatan yang hakiki. ●

# KEBIASAAN BAWA PONSEL KE TOILET BISA PICU RISIKO WASIR

**Bagi sebagian orang, toilet bukan sekadar tempat untuk buang air besar (BAB), tetapi juga menjadi ruang "me time".**

Tak sedikit yang memanfaatkan waktu di kamar mandi untuk membaca berita, scrolling media sosial, atau sekadar mengobrol lewat pesan singkat.

Sekilas terdengar sepele, namun penelitian terbaru mengungkapkan

adanya dampak medis yang serius dari kebiasaan tersebut.

Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal PLOS One menemukan adanya kaitan antara penggunaan smartphone di toilet dengan meningkatnya kasus wasir.

Wasir (hemoroid) adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena di sekitar rektum dan anus akibat peningkatan tekanan. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa gatal, nyeri, tidak nyaman, bahkan perdarahan.

"Orang sering kali lupa waktu saat berada di toilet ketika membawa ponsel. Tanpa disadari, mereka duduk terlalu lama," jelas dr Trisha

Pasricha, penulis senior studi sekaligus ahli gastroenterologi di Rumah Sakit Umum Massachusetts dan Harvard Medical School.

Ia menambahkan, pola penggunaan smartphone yang membuat orang tenggelam dalam aplikasi, terutama media sosial, memang dirancang untuk mencuri perhatian, menciptakan kecanduan, dan membuat pengguna tidak sadar waktu.

"Kita baru mulai memahami betapa besar pengaruh smartphone terhadap berbagai aspek kehidupan kita," ujarnya.

Dalam penelitian sebanyak 125 orang dewasa yang menjalani ko-



lonoskopi diminta mengisi survei terkait kebiasaan mereka di toilet. Pertanyaan mencakup durasi BAB, apakah membawa ponsel, frekuensi mengejan, konsumsi serat, hingga rutinitas olahraga.

Kondisi ambeien atau wasir kemudian dikonfirmasi melalui endoskopi.

Hasilnya, 66 persen responden mengaku selalu membawa smartphone saat ke toilet. Kelompok ini menghabiskan waktu jauh lebih lama di kamar mandi dibandingkan responden yang meninggalkan ponsel di luar.

54 persen menggunakan ponsel untuk membaca berita, 44 persen scrolling media sosial.

Riset ini menemukan bahwa penggunaan smartphone di toilet meningkatkan risiko wasir hingga 46 persen. Bahkan, 37 persen peng-

guna ponsel duduk lebih dari lima menit di toilet, sedangkan pada kelompok non-pengguna, hanya 7 persen yang duduk selama itu.

#### Kenapa Bisa Memicu Wasir?

Duduk terlalu lama di toilet dianggap lebih berisiko daripada duduk di kursi biasa. Pasalnya,udukan toilet yang terbuka membuat posisi bokong lebih rendah, sehingga memberikan tekanan tambahan pada rektum. Kondisi ini dapat memperlambat aliran darah dan menyebabkan penumpukan di pembuluh darah anus.

"Ketika duduk di mangkuk toilet, tidak ada dukungan dasar panggul, sehingga tekanan langsung mengenai area rektum," terang Pasricha.

Selain itu, posisi tubuh saat bermain ponsel di toilet juga bisa menambah beban pada panggul karena postur duduk yang cenderung menunduk.

Meski penelitian ini fokus pada

let. Namun, kebiasaan ini jelas lebih umum terjadi pada anak muda," ujarnya.

Menurut dr Sandhya Shukla, ahli gastroenterologi di Atlantic Coast Gastroenterology Associates, New Jersey (yang tidak terlibat dalam penelitian), semakin banyak pasien muda yang datang dengan keluhan wasir.

Ia menegaskan bahwa faktor lain seperti kurang asupan serat, obesitas dan kurang olahraga juga berperan.

Namun, kebiasaan duduk terlalu lama di toilet tetap menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Para ahli merekomendasikan agar durasi BAB tidak lebih dari 10 menit, bahkan idealnya hanya 3-5 menit.

"Banyak ahli sepakat bahwa waktu optimal adalah sekitar tiga menit per buang air besar, meskipun tiap orang bisa berbeda," kata Shukla.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa membawa ponsel ke toilet me-



orang dewasa berusia 45 tahun ke atas, Pasricha menilai hasilnya juga relevan untuk generasi muda. Sebab, kelompok usia muda justru lebih sering membawa ponsel ke mana pun, termasuk ke toilet.

"Kelompok usia 45 tahun ke atas sangat membantu penelitian ini, karena ada perbandingan antara mereka yang menggunakan dan tidak menggunakan ponsel di toi-

let. Namun, kebiasaan ini jelas lebih umum terjadi pada anak muda," ujarnya.

Jika ingin menjaga kesehatan pencernaan, biasakan BAB dengan cepat, batasi penggunaan ponsel di toilet, perbanyak konsumsi serat, dan tetap aktif berolahraga. ●



# DOMINASI PEMAIN ASING DI LIGA INDONESIA

**Kebijakan atau regulasi baru dari I League yang membolehkan merekrut 11 pemain asing di BRI Super League dimanfaatkan klub-klub peserta kompetisi untuk memperkuat pasukan di musim kompetisi 2025/2026 ini.**

**M**eski tidak semua klub di BRI Super League memanfaatkan kuota maksimal hingga 11 pemain asing namun mereka melakukan penambahan pemain. Rata-rata klub melakukan 9 hingga 10 pemain meski ada juga yang merekrut hingga batas maksimal.

Dampaknya kompetisi BRI Super League kini didominasi pemain asing. Total ada 177 pemain asing dengan Brasil sebagai penyumbang terbanyak (68 pemain).

Dimana berdasarkan regulasi yang dikeluarkan I League untuk pemain asing yakni bisa mendaftarkan klub-klub BRI Super League musim 2025/2026 bisa mencapai 11 orang. Saat pertandingan klub bisa menurunkan 8 pemain sekaligus.

Aturan ini kemudian mendapat protes dari sebagian besar pelaku sepakbola, termasuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang menilai akan mematikan potensi pemain-pemain muda Indonesia.

Keluhan yang sama disampaikan pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vanenburg dengan mengkritik keras aturan I League tersebut.

Setelah mendapat banyak kritikan, I League kemudian kembali mengubah regulasi. Dimana setiap klub di BRI Super League masih tetap bisa merekrut 11 pemain asing.

Dimana dalam regulasi terbaru I



League, setiap klub BRI Super League tetap bisa mengontrak 11 pemain asing. Namun yang bisa masuk dalam Daftar Susunan Pemain atau DSP hanya sembilan orang saja.

Dari 9 pemain asing itu, setiap klub hanya boleh memainkan 7 orang saja. Sedangkan dua pemain lagi menjadi cadangan.

Dampak dari aturan ini, pemain asing membanjiri lapangan sepakbola saat dua klub saling berhadapan. Klub-klub lebih memaksimalkan tujuh pemain asingnya sedangkan empat pemain lain dari lokal.

Domikasi pemain asing ini membuat

daftar pencetak gol di BRI Super League juga dikuasai para pemain asing.

Dimana hingga pekan kelima BRI Super League daftar topskor BRI Super League dikuasai para pemain asing. Striker Arema FC, Dalberto menjadi terbanyak pertama di daftar topskor klase-men sementara dengan mengemas 7 gol.

Dikuti Maxwel (Persija) dengan 4 gol. Sedangkan tiga gol didominasi para pemain asing mulai dari Mariano Peraltra (Borneo FC), Alexis Messidoro (Dewa United), David da Silva (Malut), Uilliam Barros (Persib), Allano (Persija), José Enrique (Persik), Luquinhas (PSBS).

**Nikmati Atmosfer Kompetisi**

Ratusan pemain asing di BRI Super League ini mengisi di semua lini mulai dari kiper sampai striker. Postur yang tinggi besar serta teknik yang mumpuni menjadi salah satu pilihan utama klub-klub untuk merekrut pemain asing.

Di sisi lain beberapa pemain asing mengaku senang dengan atmosfer sepakbola Indonesia di BRI Super League.

Bek asing Persib Bandung, Julio Cesar mengaku mulai menikmati atmosfer sepakbola Indonesia setelah dua bulan berseragam Maung Bandung. Pemain asal Brasil ini pun sudah melakoni beberapa laga, baik di pramusim maupun BRI Super League.

Julio resmi menjadi bagian dari skuad



Persib pada Juni lalu. Sebelum berlabuh ke tim kebanggaan Bobotoh tersebut, Julio merupakan andalan klub kasta tertinggi Liga Thailand, Chiangrai United.

Dengan pengalamannya berkarier di Asia Tenggara, Julio bisa menilai perbedaan sepak bola Indonesia dengan Thailand. Menurutnya, sepak bola Indonesia lebih mengandalkan fisik dan kecepatan.

"Indonesia saya rasa lebih kuat, lebih banyak power dan banyak counter attack. Ada banyak pemain yang cepat di sini, banyak pemain mengandalkan kecepatan di sini," ungkap Julio.

Kendati begitu, pemain berusia 30 tahun tersebut melihat secara keseluruhan sepak bola di Asia Tenggara tidak berbeda jauh.

"Tapi secara keseluruhan di Asia Tenggara sama, tidak banyak perbedaan," ucapnya. ●

**PEMAIN BRASIL PALING DOMINAN**

Regulasi baru di BRI Super League membuat klub peserta kompetisi ramai-ramai merekrut pemain asing tambahan. Ternyata total ada 177 pemain asing dengan Brasil sebagai penyumbang terbanyak yakni 68 pemain.

Dari 18 klub di BRI Super League semuanya menggunakan jasa pemain asal Brasil. Bahkan dari 11 pemain asing yang dimiliki pemain Persija Jakarta, 10 diantaranya dari Tim Samba. Sementara pemain lagi berasal dari Jepang yakni Ryo Matsumura

Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, angkat bicara soal banyaknya pemain asing asal Brasil di Persija Jakarta. Total, ada 10 pemain Brasil di skuad Macan Kemayoran saat ini.

"Semua pemain Persija ini profesional, mereka berusaha sebaik mungkin untuk adaptasi dari tim. Itu yang saya lihat," kata Bambang Pamungkas di Jakarta.

"Mungkin saat ini Ryo Matsumura terpisah karena sedang masa perawatan cedera, tetapi tak ada keraguan dari mereka, karena mereka profesional semua," tambahnya.

"Saya merasa senang ketika kemudian para pemain Brasil di Persija ini bisa *ngeblend* dan beradaptasi den-

gan pola permainan, budaya, dan makanan di Indonesia," ucap Bambang.

"Biasanya pemain asing yang baru datang itu adaptasi dengan budaya dan makanan susah," tambahnya.

Sementara beberapa pemain asing dari Eropa yang baru menjalani kompetisi di Asia khususnya Indonesia harus mengalami beberapa penyesuaian mulai cuaca yang lebih hangat, makanan serta budaya.

Kelebihan lainnya para pemain asal Brasil ini tidak masuk skuad utama di Timnas Brasil sehingga mereka fokus membangkitkan klub.

Sementara gelandang tangguh Persib Bandung asal Brasil, Berguinho mengaku tak khawatir dengan tingginya tuntutan yang hadir di sepakbola. Menurut Berguinho, tuntutan di sepakbola merupakan hal yang tak bisa dipisahkan.

"Tentu saja, kami ingin memenangkan semua pertandingan, kami memahami para suporter," buka pemain asal Brasil itu.

Untuk itu ia beruntung bisa bermain di Liga Indonesia atau BRI Super League bersama Persib Bandung.

"Ini adalah klub besar,untutannya sangat tinggi, jadi kami tahu bahwa kami harus menang," jelasnya. ●





Adhiguna Kuncoro

# ILMUWAN INDONESIA DI BALIK GOOGLE GEMINI

**Adhiguna Kuncoro, seorang ilmuwan peneliti senior di Google DeepMind London, merupakan salah satu talenta Indonesia yang bersinar di kancah global. Sebagai satu-satunya peneliti asal Indonesia di tim DeepMind, ia memainkan peran penting dalam pengembangan beberapa teknologi kecerdasan buatan (AI) terdepan di dunia, termasuk model bahasa besar seperti Gemini dan sistem AI pengkodean seperti AlphaCode.**

Pada 2013, Adhi menulis skripsi tentang kecerdasan buatan (AI) saat dia sendiri masih menganggap ilmu ini layaknya fiksi ilmiah. Dia mengenal AI sebagai sesuatu yang lebih dekat ke dunia film fiksi ilmiah seperti Terminator: abstrak, jauh, dan belum terasa nyata.

Adhi tak pernah membayangkan, langkah memilih AI sebagai bahan skripsi akan membawanya ke jantung perkembangan AI dunia: Oxford, Carnegie Mellon di Pennsylvania, dan kini di DeepMind, divisi riset Google yang berada di garis depan revolusi teknologi global.

Sejak 2017, Adhi menjadi satu-satunya peneliti asal Indonesia di markas DeepMind di London. Ia ikut mengembangkan teknologi Natural Language Processing (NLP), yang membuat chatbot seperti Gemini mampu memahami dan merespons bahasa manusia.

Namun untuk sampai ke

DeepMind, perjalanan Adhi tidak selalu mulus. Setelah lulus dari Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Adhi melanjutkan studi S2 di University of Oxford.

"Pas di Oxford pun saya semester pertama, dua mata kuliah enggak lulus, salah satunya machine learning, topik penting dalam AI. Saya sempat mikir, 'Wah susah banget machine learning', tapi saya pikir namanya juga belajar, dan kalau mau jadi pakar machine learning pasti harus melewati tantangan itu," tuturnya.

Pada 2013, pendekatan baru untuk mengembangkan AI mulai diperkenalkan dan Adhi langsung merasa perkembangan ini adalah masa depan yang ingin ia geluti.

"Saya kira waktu itu, ini (perkembangan) revolusioner. Sangat keren. Ini masa depan, dan saya ingin jadi bagian dari masa depan AI ini," ujarnya.

Keterarikan Adhi muncul pada saat AI belum menjadi tren. Namun, saat melanjutkan studi di Oxford, Adhi sempat mengalami sindrom impostor.

"Saya

merasa tidak pantas di antara teman-teman yang sangat jago dan sudah jauh lebih siap secara akademik. Tapi justru itu jadi cambuk untuk bangkit dan belajar lebih giat," tuturnya.

Setahun setelah meraih gelar master di Oxford, Adhi memutuskan mengambil gelar master kedua di Carnegie Mellon University (CMU) di Amerika Serikat yang dianggap sebagai kiblat riset AI.

Di CMU, Adhi memusatkan pada pengembangan NLP, cabang AI yang memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia. Setelah menyelesaikan studi di CMU, Adhi mendaftar ke berbagai universitas bergengsi untuk studi doctoral.

Ia mengaku diterima di Harvard, Stanford, dan beberapa universitas lain di AS dengan tawaran beasiswa penuh. Namun, pilihannya jatuh pada Oxford.

"Saya juga diterima di Oxford, dan profesor saya di sana, yang sebelumnya pernah bekerja di DeepMind, menawari saya beasiswa penuh untuk program doctoral," ujarnya.

Sang profesor juga membuka jalan bagi Adhi untuk menempuh studi sambil bekerja langsung di DeepMind.

"Ini kesempatan langka, belajar teorinya sambil terjun langsung ke aplikasinya," kata Adhi.

Dosen Informatika ITB dan peneliti Pusat AI ITB, Ayu Purwarianti, mengatakan, sekitar 2013, AI di bidang pemrosesan bahasa (Natural Language Processing/NLP) masih memakai cara lama yang rumit dan belum populer.

"Mahasiswa yang tertarik AI saat itu harus mau masuk ke pemrograman yang detail, tidak semudah sekarang. Tapi Adhi sudah menunjukkan motivasi dan kemampuan yang menonjol sejak awal. Dia role model, prestasinya lengkap:



akademik dan non-akademik," kata Ayu yang juga adalah dosen pembimbing Adhi.

Direktur Ilmuwan Riset di DeepMind, Marc'Aurelio Ranzato, menyebut, Adhi dipilih karena kualitasnya.

"Adhi ketika itu adalah kandidat yang terbaik dari segi kedalaman dan luasnya pengetahuan serta kreativitas. Khususnya, Adhi membawa keahlian unik dalam pemrosesan bahasa alami (NLP) yang merupakan inti dari pengembangan Large Language Model (LLM) modern," ujar Marc.

Marc juga menyebut Adhi sebagai sosok kolaboratif yang sangat teliti dan berkontribusi besar dalam riset AI. Dia juga menyebut sejumlah penelitiannya termasuk dalam bidang LLM.

Bagi Marc, keberadaan peneliti seperti Adhi, memperkaya pemahaman konteks lokal dalam pengembangan teknologi AI global.

"Seiring dengan semakin meluasnya sistem AI di masyarakat, ada kebutuhan untuk beradaptasi dengan konteks dan budaya lokal. Cara terbaik untuk mencapai adaptasi tersebut adalah dengan melibatkan para pakar AI dari seluruh dunia," kata Marc.

Kini, Adhi menjadi bagian dari tim riset inti di DeepMind yang mengembangkan Gemini. Kantor Google di kawasan King's Cross, London, tempat Adhi bekerja, adalah kompleks modern yang sangat luas.

Di situ, para karyawan difasilitasi dengan sejumlah ruang makan yang menyajikan hidangan untuk sarapan, makan siang, hingga makan malam, serta fasilitas penunjang seperti tempat gym dan area rehat.

Fokus riset Adhi adalah membuat Gemini semakin cerdas, efisien, dan mudah diakses bagi semua kalangan. Adhi mengatakan inti dari pekerjaannya ada dua, yakni model dan data.

Model seperti Gemini bekerja menggunakan deep learning, yakni sistem jaringan saraf tiruan (neural networks) yang memungkinkan mesin mengenali pola, belajar, dan menyimpulkan.

"Deep learning itu ibarat muridnya, datanya itu gurunya. Kalau mau AI bisa menjawab dalam bahasa Indonesia, atau misalnya bahasa daerah lain, kita perlu kasih banyak contoh data dalam

bahasa itu," jelasnya.

Ditanya apa keunikan Gemini dibandingkan ChatGPT, Adhi menyebut kekuatan Gemini adalah kualitas tinggi dengan harga murah dan integrasi produk Google.

Misalnya, Gemini bisa bantu Google Search jadi lebih efisien, tanpa harus banyak klik, dan bantu menulis email di Gmail sesuai gaya bahasa kita.

Menurutnya, perkembangan AI seperti Gemini bukan sekadar untuk kemajuan, tapi kunci keadilan.

"Orang kaya mungkin bisa bayar guru privat. Tapi AI bisa bantu anak-anak yang tidak mampu mendapat akses pendidikan yang sama. Bayangkan, anak-anak di pelosok Indonesia bisa belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau dia sudah jago perkalian tapi lemah di pembagian, AI akan bantu latihan bagian itu," katanya.

Tantangan yang dihadapi para il-

Asia Tenggara.

"Nanti bulan Oktober baru ada satu orang Indonesia lagi yang bergabung," ujarnya.

Adhi berharap lebih banyak anak muda Indonesia masuk dunia AI global. Menurutnya, kehadiran diaspora di posisi strategis mempermudah jembatan antara teknologi global dan kebutuhan lokal.

"Sebagai diaspora di bidang AI, tugas kami adalah bagaimana kita dari dalam mendorong lebih banyak kerja sama-kerja sama dengan negara-negara berkembang termasuk di Indonesia," ujarnya.

Ia menyebut dua contoh yang pernah ia lakukan untuk mendorong kolaborasi dengan sejumlah pihak di Indonesia.

"Yang pertama buat machine learning AI Summer School pada 2019, sebelum AI se-booming sekarang. Ada kolega dari Google dan ada juga dari Meta, dari Facebook yang terbang ke Jakarta.



muwan, kata Adhi, adalah data dalam sejumlah bahasa, termasuk bahasa Indonesia, jauh lebih sedikit dibanding bahasa Inggris. Karena itu, dia mendorong kolaborasi agar pengembangan AI lebih merata secara global.

Beberapa risetnya mengeksplorasi bagaimana menekan biaya penggunaan Gemini agar bisa diterapkan lebih luas.

"Model seperti Gemini jangan hanya bisa dikembangkan oleh perusahaan besar seperti Google. Universitas-universitas, bahkan di negara berkembang seperti Indonesia, juga harus bisa meneliti dan membangun AI dengan sumber daya terbatas," katanya.

Di kantor pusat DeepMind London, Adhi hanya satu dari sedikit peneliti asal

Google menyumbang Rp500 juta," cerita Adhi.

Hal ini terjadi berkat adanya dorongan dari diaspora. Sponsor ini diberikan karena Indonesia dianggap penting. Google, menurut Adhi, juga memberikan sponsor untuk membantu banyak mahasiswa yang tertarik untuk belajar tentang AI.

"Yang kedua buat data set bahasa Indonesia. Kerja sama saya di DeepMind dan Google membantu resources hardware dengan biaya miliaran rupiah dan hasilnya kita open source, kita release ke publik. Itu dua contoh, bagaimana diaspora bisa membantu, kerja sama AI seperti DeepMind dengan Indonesia," jelas Adhi. ●



# BBM SWASTA LANGKA HARUS BELI KE PERTAMINA

**Sejumlah stasiun bahan bakar umum (SPBU) milik perusahaan swasta, seperti BP-AKR dan Shell Indonesia, mengalami kekosongan stok atau pasokan bahan bakar minyak (BBM) mulai akhir Agustus.**

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, membenarkan, produk BBM Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan.

"SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel dan layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell," kata Ingrid, Rabu, 3 September 2025.

Dia mengatakan, perusahaan berupaya memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell.

"Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," ujarnya.

Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (perusahaan patungan BP-AKR), Vanda Laura mengatakan saat ini sedang mencari alternatif pasokan dalam

negeri, menyusul kosongnya stok beberapa jenis BBM di SPBU mereka.

"Sekaligus mengoptimalkan distribusi, mencari alternatif pasokan dalam negeri, serta menyiapkan skenario operasional agar layanan pelanggan tetap terjaga," kata Vanda, Rabu, 27 Agustus 2025.

Vanda mengakui, saat ini beberapa jaringan SPBU BP mengalami keterbatasan stok BBM BP Ultimate dan BP 92, sehingga tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap.

"Kami memahami pentingnya kontinuitas pasokan bahan bakar bagi pelanggan untuk mendukung mobilitas harian mereka," ujarnya.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan penyebab langkanya stok atau pasokan BBM di SPBU milik swasta karena adanya peningkatan pola



shifting atau pergeseran konsumsi BBM, dari subsidi menjadi non-subsidi.

"Pertamina kan mewajibkan untuk menggunakan QR code, masyarakat perlu mendaftar, sehingga mungkin CC kendaraan tidak sesuai. (Akhirnya terjadi) pergeseran yang tadinya konsumen BBM subsidi Peralite menjadi non-subsidi," kata Yuliot di gedung DPR, Rabu, 3 September 2025.

Berdasarkan perhitungannya, total pergeseran konsumsi dari BBM subsidi ke non-subsidi mencapai 1,4 juta kiloliter. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut periode waktu volume pergeseran konsumsi tersebut.

"Jadi itu yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk BBM di badan usaha swasta," ujarnya.

Kendati demikian, Yuliot menyebut hingga saat ini ketahanan energi untuk BBM di Indonesia masih 26 hari.

Pihaknya juga telah menerima rincian data impor BBM dari Pertamina dan swasta dengan prinsip menjaga keseimbangan neraca komoditas. "Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati ada kelebihan (kuota)," ujarnya.

Kementerian ESDM pun mendorong masyarakat untuk membeli BBM ke SPBU milik Pertamina.

"Pemerintah sudah tambah kuota impor BBM 10 persen untuk SPBU non-Pertamina. Nah, apabila masih kekurangan (pasokan), maka bisa membeli ke SPBU Pertamina yang terdekat," kata Kepala SKK, Migas Djoko Siswanto, Kamis, 28 Agustus 2025.

Yuliot menyebut dengan tambahan 10 persen izin kuota impor ini, seharusnya sudah bisa mencukupi pasokan untuk SPBU swasta. "Jadi kalau ada kelangkaan, ya kami harus petakan dahulu apa yang menjadi penyebabnya," ujar Yuliot.

### Kebijakan Impor

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan kekosongan stok BBM di SPBU swasta bisa disebabkan oleh persaingan usaha dan iklim investasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan Shell Indonesia yang menjual seluruh asetnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, yang bisa mempertahankan bisnis di hilir migas Indonesia saat ini

adalah perusahaan yang juga memiliki bisnis di hulu migas.

"Misalnya ada BP AKR, kan mereka punya bisnis hulu di Papua dan beberapa tempat sehingga mereka bisa sinergikan antara hulu dan hilir. Tapi kalau yang berdiri sendiri dan tidak punya aset lain di sini, dan tidak terlalu menguntungkan otomatis mereka pergi," katanya.

Namun demikian, Komaidi mengata-

tidak menutup kemungkinan bahwa ini masalah persaingan usaha, iklim investasi, yang kemudian kalau mereka melihat tidak cukup menguntungkan, tidak cukup oke marginnya, mereka akan pergi secara bertahap," ucapnya.

Menurut Komaidi, kebijakan tersebut menggeser sumber impor minyak mentah (crude) yang awalnya berada di Singapura menjadi bergeser ke AS. Meski-



kan kelangkaan BBM di SPBU swasta saat ini kemungkinan lebih banyak disebabkan oleh dampak kebijakan impor minyak dari AS. Seperti diketahui, Indonesia sudah berkomitmen untuk membeli migas dari Amerika Serikat sebagai bentuk negosiasi tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Donald Trump.

"Kalau yang sekarang saya kira dampak dari tarifnya Trump lumayan besar, karena bisa ke mana-mana. Tapi juga

pun sebagian besar yang ditugaskan adalah Pertamina, namun hal itu juga bisa berdampak ke swasta.

Dia menjelaskan, produsen BBM di Indonesia perlu melakukan penyesuaian tata waktu akibat negosiasi tarif tersebut. Impor minyak mentah dari Singapura hanya membutuhkan satu hari. Sementara, impor minyak mentah dari Timur Tengah dan Afrika membutuhkan waktu kirim 10-11 hari.

## • INFO EKONOMI

"Tapi kalau impor digeser ke AS dan mengambil langsung dari pelabuhan Texas, maka membutuhkan waktu 30-40 hari. Kemungkinan ini yang menyebabkan stok kosong, masih perlu penyesuaian," ujarnya.

Dia menilai kebijakan ini kemungkinan akan memberikan dampak paling tidak di tahap-tahap awal. Namun, penyediaan stok BBM tersebut akan bertemu titik keseimbangannya seiring dengan berjalannya waktu.

Berbeda dengan Komaidi, Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan kosongnya pasokan BBM di SPBU swasta disebabkan oleh perubahan izin impor yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Dia menyebut awalnya izin impor BBM diberikan setiap tahun, namun diubah menjadi 6 bulan sekali diajukan.

"Saya kira penyebab utamanya adanya perubahan aturan dari Kementerian ESDM. Nah dalam kondisi semacam itu, ternyata mereka kan tidak punya penyimpanan seperti Pertamina, sehingga semua BBM-nya diimpor dan impornya tadi dibatasi dari setahun sekali menjadi 6 bulan sekali," kata Fahmy.

Dia juga membantah adanya faktor persaingan usaha yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Menurutnya, SPBU swasta hanya hadir di kota-kota besar, sehingga tidak bisa disebut persaingan dengan Pertamina yang memang memasok ke seluruh wilayah Indonesia.

### Suplai Pertamina

Kementerian ESDM mengatakan PT Pertamina (Persero) telah menyanggupi rencana untuk menyuplai BBM dari kilang mereka ke SPBU milik badan usaha swasta.

"Pertamina menyanggupi, tinggal diatur saja mekanismenya seperti apa," kata Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, Selasa, 9 September 2025.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mekanisme teknis apa saja yang perlu diatur untuk menjalankan rencana suplai ini. Menurutnya, rencana ini masih

dalam tahap diskusi dan dikembalikan ke masing-masing badan usaha SPBU swasta. "Sesuai dengan yang Pak Menteri sampaikan, business to business saja mekanismenya dengan Pertamina," ucapnya.

Kementerian ESDM juga sudah memanggil seluruh SPBU Swasta dan Pertamina untuk melakukan rapat di Direktorat Jenderal Migas terkait pembahasan kelangkaan BBM.

Anggia menyebut dalam rapat tersebut Kementerian ESDM mendengarkan perhatian dari SPBU Swasta.

"Pemerintah dalam hal ini juga pasti menjaga iklim investasi, untuk solusinya masih dalam tahap diskusi saat ini," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM memastikan tidak akan menambah kuota impor BBM baru untuk badan usaha swasta pemilik SPBU tahun ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, mengatakan, tindak lanjut rapat akan dilakukan dengan pemberian surat untuk setiap badan usaha melakukan sinkronisasi dengan Pertamina, baik sinkronisasi volume maupun spesifikasi BBM.

"Karena (hingga akhir) tahun 2025 ini kami kejar biar semuanya jangan terjadi kelangkaan," ujarnya.

Dalam upaya sinkronisasi ini, Pertamina nantinya akan menyuplai BBM kepada SPBU swasta. Laode memastikan spesifikasi produk kilang Pertamina sudah sesuai dan tersedia pasokannya.

### Awasi Monopoli

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendalami permasalahan kelangkaan BBM non-subsidi

yang terjadi di SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR.

Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, mengatakan, pihaknya tengah mengkaji secara mendalam atas dinamika pasar tersebut sejak awal tahun dan mempertebal intensitas pengawasan pada bulan ini menyusul laporan kekosongan pasokan di sejumlah SPBU swasta.

"Untuk itu, KPPU telah mulai mengundang berbagai pihak terkait dan segera menyampaikan hasil kajiannya kepada publik dalam waktu dekat. Tindakan ini sejalan dengan prioritas KPPU di sektor energi dalam menjaga agar sektor tersebut tidak diwarnai oleh berbagai praktik monopoli yang merugikan masyarakat," kata Fanshurullah dalam siaran pers, Se-



lasa, 9 September 2025.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP AKR mengalami kelangkaan stok BBM lebih dari satu pekan. Dia menyebut berbagai penyebab sempat diurai, seperti perizinan impor dan tingginya konsumsi akibat peralihan ke BBM non-subsidi menjadi sorotan.

Menurutnya, hal ini mengundang perhatian KPPU untuk masuk ke persoalan tersebut, sejalan dengan kajian yang telah dilakukan sejak awal tahun. Kajian tersebut berfokus pada ketersediaan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang andal bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kajian atau penelusuran tersebut, KPPU akan terus berkoordinasi Kementerian ESDM, Pertamina, serta badan-badan usaha swasta yang menyalurkan BBM non-subsidi.

KPPU meminta seluruh pihak hadir memenuhi undangan, dan menyerahkan data yang diminta secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, agar proses analisis dan penilaian sesuai kewenangan KPPU dalam UU 5/1999 berbasis fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Pada sektor yang terkonsentrasi tinggi, transparansi data adalah kunci. Tanpa data yang utuh lintas pemain, risiko distorsi pasar dan antrean konsumen berkepanjangan akan meningkat. Kami mengajak Kementerian ESDM, Pertamina, dan operator swasta untuk proaktif memenuhi undangan KPPU dan membuka data-data yang dibutuhkan. Ini bukan semata kepatuhan hukum, melainkan komitmen publik untuk menjaga keadilan pasar dan kepastian layanan bagi konsumen," ujarnya.

Dia menyampaikan, KPPU selanjutnya akan mengumpulkan berbagai pihak untuk mengklarifikasi persoalan dan melakukan peninjauan teknis atas data Pemerintah, Pertamina, operator swasta.

Mereka juga melakukan uji konsistensi data lintas sumber untuk mengidentifikasi hambatan struktural, tata niaga yang tidak efisien, atau indikasi perilaku anti-persaingan.

"Perkembangan proses kajian pada tahap-tahap berikutnya dan hasilnya akan segera disampaikan KPPU kepada publik sesuai ketentuan berlaku," ucapnya.

nya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan, instruksi kepada SPBU Swasta melakukan kerja sama pengadaan BBM dengan Pertamina bukan bagian dari pelanggaran persaingan usaha.

Bahlil mengatakan pemerintah sudah memberikan izin impor BBM ke perusahaan swasta dengan jumlah kuota yang sama seperti tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga menyetujui penambahan izin

gah memperkuat posisi Pertamina sebagai penopang utama ketersediaan BBM domestik. Menurutnya, hal ini menyangkut implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai oleh negara, tetapi bukan berarti total semuanya dikuasi oleh negara. Dan saya pikir sudah adil kok, sudah dikasih 110%," ujarnya.



impor BBM sebanyak 10 persen tahun ini.

Ketua Umum Partai Golkar itu membantah tuduhan bahwa pemerintah menutup akses impor tambahan kepada SPBU swasta yang dikhawatirkan dapat memicu persaingan tidak sehat dengan Pertamina.

"Impor untuk 2025 kuotanya ini diberikan 110 persen dibanding dengan 2024. Jadi sangat tidak benar kalau kami tidak memberikan kuota impor. Tetapi untuk selebihnya silakan kolaborasi b to b dengan Pertamina," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, pemerintah ten-

Bahlil menyebut pihaknya telah memanggil Shell dan BP- AKR terkait kuota impor BBM. Menurutnya, Kementerian ESDM telah menyampaikan penjelasan kepada dua perusahaan tersebut.

"Karena kami sudah memberikan alokasi mereka 110 persen dari total kuota impor per masing-masing perusahaan," kata Bahlil.

Kepala BKPM 2019-2024 itu turut menghormati langkah KPPU yang memantau kebijakan pengadaan BBM belakangan ini. "Itu hak institusi mereka," ujarnya. ●



# SALAH URUS BERAS PREMIUM

**Drama kelangkaan beras premium tengah berlangsung. Kisahnya bermula dari temuan beras oplosan yang menyalahi aturan. Kemudian berlanjut dengan rencana penghapusan klasifikasi beras, pengawasan potensi penimbunan, dan penetapan harga eceran tertinggi baru beras medium.**

**B**eberapa pekan terakhir, beras premium sulit didapat di toko-toko ritel modern. Yang banyak tersedia justru beras fortifikasi. Beras tersebut merupakan salah satu jenis beras khusus yang diperkaya dengan zat gizi mikro, seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, zat besi, dan zinc.

Harga beras fortifikasi jauh lebih mahal ketimbang beras premium. Dalam kemasan berisi 5 kilogram, harga beras fortifikasi berada pada kisaran Rp90.000-130.000, sedangkan beras premium Rp74.500-79.000 bergantung zonasi.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, berpendapat, beras fortifikasi bukanlah beras premium, tetapi beras khusus. Beras tersebut muncul cukup masif di toko-toko ritel modern lantaran imbas kekosongan beras premium.

Harga beras fortifikasi lebih mahal ketimbang beras premium. Selama ini, harganya tidak diatur pemerintah, sehingga tidak ada harga eceran tertinggi (HET).

"Ini bisa mengecoh konsumen. Harganya yang lebih mahal dari beras premi-

um dapat membebani dan menggerus daya beli konsumen," kata Niti, Kamis, 11 September 2025.

Drama kelangkaan beras premium itu bermula dari temuan beras oplosan yang menyalahi aturan oleh tim investigasi Kementerian Pertanian. Merujuk hasil investigasi yang digelar pada 6-23 Juni 2025, sebanyak 85,6 persen dari 136 sampel beras premium yang diperdagangkan tidak sesuai standar mutu. Sementara itu, 59,8 persen dijual di atas HET dan 21,6 persen dikurangi volumenya.

Drama itu berlanjut dengan penindakan hukum terhadap para produsen beras tersebut. Per 26 Agustus 2025, polisi telah menangani 25 kasus dugaan beras oplosan yang menyalahi aturan. Polisi juga telah menetapkan 28 tersangka kasus itu, termasuk beberapa jajaran manajemen perusahaan beras besar.

## Salah urus

Pemerintah bahkan memberi waktu selama dua pekan bagi para produsen untuk membenahi produk-produk mereka sesuai aturan. Mereka mengikuti perintah itu, sehingga peredaran beras

premium di pasar, terutama ritel modern, mulai berkurang.

Merespons situasi itu, pemerintah menggulirkan serentetan kebijakan. Alih-alih memperbaiki iklim perberasan nasional, kebijakan itu justru menjadi bumerang bagi pemerintah. Kebijakan itu sekaligus mencerminkan salah urus tata kelola perberasan.

Kebijakan pertama yang digulirkan adalah beras premium yang sudah telanjur beredar tidak perlu ditarik dan cukup dijual dengan harga yang lebih murah. Kedua, pengawasan beras oplosan yang menyalahi aturan diperluas ke potensi penimbunan beras.

Ketiga, klasifikasi beras medium dan premium akan dihapus dan diganti menjadi beras reguler dan khusus. Harga beras reguler akan tetap diatur pemerintah, sedangkan pembentukan harga beras khusus diserahkan ke mekanisme pasar.

Hingga saat ini, pemerintah belum merilis kebijakan beras reguler dan khusus, berikut HET beras reguler. Yang terjadi justru pemerintah menaikkan HET beras medium saja pada 22 Agustus 2025. Langkah itu tidak diikuti dengan penyesuaian HET beras premium.

Ini membuat selisih HET beras medium dengan beras premium kian tipis. Di zona 1 yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, misalnya, HET beras medium lama dan baru masing-masing Rp12.500 per kg dan Rp13.500 per kg.

Sementara itu, HET beras premium di zona 1 dipatok Rp14.900 per kg. Dibandingkan dengan HET beras medium lama, selisihnya menjadi Rp2.500 per kg. Jika dengan HET beras medium baru, selisih semakin menyempit menjadi Rp1.400 per kg.

Padahal, biaya pokok produksi beras telah naik. Kenaikan biaya produksi itu dipicu dua faktor. Pertama, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dari Rp6.000 per kg menjadi Rp6.500 per kg.

Kedua, kebijakan pembelian gabah any quality atau tanda standar mutu minimal sesuai HPP. Bagi yang mendapat gabah berkualitas rendah, otomatis akan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengolahnya menjadi beras yang layak konsumsi.

Untuk memproduksi beras medium saja, biaya produksinya sudah tembus Rp13.000 per kg. Apalagi, jika memproduksi beras premium, biaya produksinya bisa menembus di atas Rp15.000 per kg.

Ketidakpastian kebijakan perberasan baru itu tentu saja berpotensi menyebabkan produsen beras mengurangi atau bahkan tidak memproduksi beras premium. Bisa jadi sembari tetap

penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang tidak berkualitas, dan keterbatasan ketersediaan beras di ritel modern.

Selain itu, potensi tersebut juga meliputi harga beras yang tetap di atas HET dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan CBP.

### Bumerang kebijakan

Apa konsekuensi dari kelangkaan



memproduksi beras medium, mereka mengalihkan produksi beras premium menjadi beras fortifikasi.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai, kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan kekurangan stok, melainkan tata kelola perberasan yang tidak optimal. Ombudsman bahkan menjumpai ada potensi malaadministrasi dalam tata kelola perberasan nasional.

Potensi malaadministrasi itu mencakup risiko disposal cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog,

beras premium di ritel modern? Mau tidak mau, pemerintah harus mengatasi kelangkaan beras premium di jaringan ritel modern. Ada dua opsi yang tengah dilakukan pemerintah.

Opsi pertama yang telah dilakukan adalah mengguyur toko-toko ritel modern dengan beras SPHP. Adapun opsi kedua yang saat ini tengah dimatangkan pemerintah adalah mengalihkan CBP menjadi beras komersial.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan, pihaknya telah menjembatani kerja

## • INFO EKONOMI

sama antara Perum Bulog dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Hasilnya, Bulog akan menyalurkan 800.000 ton beras SPHP ke jaringan ritel modern hingga Desember 2025.

Beras SPHP yang disalurkan melalui ritel modern wajib dijual seharga Rp12.500 per kg di zona 1, Rp13.100 per kg di zona 2, dan Rp13.500 per kg di zona 3.

Harga beras SPHP itu di bawah HET beras medium, yakni Rp13.500 per kg di zona 1, Rp14.500 per kg di zona 2, dan Rp15.500 per kg di zona 3.

"Langkah ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas program stabilisasi pasokan dan harga beras, sekaligus menjadi solusi atas menumpuknya CBP di gudang-gudang Bulog," ujarnya, Rabu, 10 September 2025.

Adapun terkait opsi kedua, Arief menjelaskan, pemerintah tengah membahas pengalihan CBP yang berasal dari impor menjadi beras komersial. Saat ini, dari 3,9 juta ton CBP, yang berasal dari impor sebanyak 1,5 juta ton.

Kualitas mutu beras CBP asal impor itu setara beras premium, yakni kadar beras patahnya 5 persen. Dengan demikian, perlu dibahas apakah CBP yang berasal dari impor itu bisa dicampur dengan beras lain dan dijual secara komersial oleh penggilingan-penggilingan padi.

Menurut Arief, pembahasan itu penting mengingat Bulog akan merugi jika menjualnya seharga Rp11.000-12.000 per kg atau bahkan seharga beras impor tersebut Rp10.400 per kg.

"Ini perlu dikaji dan dihitung secara matang agar Bulog tidak merugi. Ada subsidi negara dan bunga bank

yang harus dibayar Bulog di sana. Jangan sampai yang untung justru penggilingan padi yang menyalurkan beras komersial," katanya.

### Inflasi Beras

Beras mengalami inflasi di tengah deflasi yang terjadi pada Agustus 2025. Bahkan, beras juga mengalami inflasi tahunan. Ini lantaran harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran naik secara bulanan dan tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 September 2025 merilis, pada Agustus 2025, Indonesia mengalami deflasi 0,08 persen secara bulanan. Komoditas penyumbang deflasi tersebut adalah tomat, cabai rawit, tarif angkutan udara, dan bensin.

Namun, ada sejumlah komoditas yang mengalami dan menyumbang inflasi di bulan tersebut, yakni bawang merah dan beras. Tingkat dan andil inflasi bulanan bawang merah masing-masing sebesar 7,59 persen dan 0,05 persen.

"Sementara beras, pada Agustus 2025, mengalami inflasi bulanan sebesar 0,73 persen dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,03 persen.

Tingkat inflasi bulanan beras itu sudah lebih rendah dari Juli 2025 yang mencapai 1,5 persen," ujar Depu ti

Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini.

BPS juga mencatat, pada Agustus 2025, Indonesia mengalami inflasi tahunan sebesar 2,31 persen. Komoditas dengan andil inflasi terbesar adalah bawang merah, beras, tomat, minyak goreng, emas perhiasan, dan kopi bubuk. Khusus beras, inflasi tahunannya sebesar 4,24 persen.

Pudji menjelaskan, inflasi beras, baik secara bulanan maupun tahunan, terjadi lantaran harga di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran naik. Beras tersebut mencakup berbagai kualitas beras di Indonesia, termasuk beras medium dan premium.

Harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat penggilingan pada Agustus 2025 mencapai Rp13.596 per kg atau naik 1,87 persen secara bulanan dan 6,15 persen secara tahunan. Di tingkat grosir, rerata harganya Rp14.292 per kg atau naik 0,64 persen secara bulanan dan 5,56 persen secara tahunan.

"Adapun rerata harga beras di tingkat eceran mencapai Rp15.393 per kg. Harga beras tersebut naik 0,73 persen secara bulanan dan 4,24 persen secara tahunan," kata Pudji.

Pemerintah telah berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk meredam kenaikan harga dan inflasi beras. Dua langkah yang dilakukan adalah menyalurkan bantuan beras kepada keluarga berpenghasilan rendah dan beras SPHP.

Pada 30 Agustus 2025, misalnya, pemerintah menggulirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 4.320 kecamatan di 38 provinsi. Jumlah beras SPHP yang disalurkan sebanyak 43.665 ton dalam bentuk kemasan 5 kg. Beras SPHP itu dijual seharga Rp60.000 per 5 kg.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menuturkan, GPM merupakan salah satu program utama pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, termasuk beras. Sejak Bapanas menginisias-



si pada 2022, GPM telah menjadi instrumen penting pemerintah menghadirkan pangan pokok dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat.

Pada Januari hingga 29 Agustus 2025, misalnya, GPM telah digelar di 7.033 lokasi di 326 kabupaten/kota di 36 provinsi. GPM tersebut melibatkan pemerintah daerah, Perum Bulog, ID Food, badan usaha milik daerah yang mengampu sektor pangan, asosiasi pelaku usaha, serta para petani dan UMKM pangan.

"Khusus beras SPHP, realisasi penyalurannya pada Januari hingga 29 Agustus 2025 mencapai 284.200 ton. Sementara itu, pada Juli hingga Desember 2025, kami menargetkan dapat menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP melalui berbagai kanal, termasuk pasar tradisional dan ritel modern," katanya.

### Krisis mutu

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, problem perberasan nasional pada tahun ini tidak hanya perihal kenaikan harga. Di balik kenaikan harga tersebut terdapat krisis mutu dan tata niaga beras.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talattov, mengatakan, krisis mutu beras berakar dari kebijakan pembelian GKP petani any quality atau tanpa standar mutu Rp6.500 per kg. Waktu itu, kebijakan itu tidak disertai dengan menaikkan HET.

GKP any quality menyebabkan beras yang diproduksi menjadi kurang berkualitas. Selain itu, biaya produksinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan memproduksi beras dari gabah dengan standar mutu yang jelas.

"Kondisi itu memicu maraknya kasus beras oplosan yang menyalahi aturan. Merujuk temuan Kementerian Pertanian, dari 136 sampel beras premium yang diperdagangkan, 85,6 persen tidak sesuai standar mutu, 59,8 persen dijual di atas HET, dan 21,6 persen dikurangi volumenya," katanya.

Selain itu, Abra juga menjelaskan porsi keuntungan dari pembentukan harga beras di tingkat konsumen di setiap tingkatan pelaku perberasan. Petani menikmati porsi keuntungan bersih atas pembentukan harga beras di tingkat

konsumen sebesar 25,2 persen.

Penggilingan padi menikmati porsi keuntungan paling besar, yakni 55,4 persen. Adapun distributor dan peritel atau pengecer, keuntungannya hanya 9,3 persen.

"Ini sejalan dengan data Kementan

makin terdesak," katanya.

Oleh karena itu, Abra meminta pemerintah menggelontorkan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog secara besar-besaran untuk meredam kenaikan harga beras. Langkah ini penting agar 3,93 juta ton beras di gudang-



yang menyebutkan, meski jumlah penggilingan besar hanya 0,9 persen dari total penggilingan di Indonesia, mereka menguasai lebih dari 60 persen serapan gabah nasional. Dominasi ini tidak hanya memperlemah posisi tawar petani, tetapi juga membuat penggilingan kecil se-

gudang Bulog tidak menumpuk dan turun mutu.

"Selain itu, pemerintah juga perlu menghapus kebijakan pembelian GKP any quality dan membenahi tata niaga perberasan yang didominasi sekitar 0,9 persen penggilingan besar," katanya. •



# KETIKA ALIANSI EKONOM BERTEMU DEWAN EKONOMI NASIONAL

**Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan desakan darurat ekonomi untuk perbaikan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi.**

**T**erdiri dari ratusan ekonom dan akademisi, Aliansi Ekonomi Indonesia menyusun pernyataan bersama terkait kondisi ekonomi nasional yang dianggap kian mengkhawatirkan. Selanjutnya, Aliansi Ekonom mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan kebijakan untuk mengembalikan stabilitas perekonomian nasional.

Hitung punya hitung, Aliansi ini menghimpun 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi di seluruh Indonesia serta para diaspora yang mendukung desakan untuk pemerintah. Desakan itu dinilai penting agar reformasi kebijakan ekonomi segera dilakukan demi menjamin pertumbuhan yang inklusif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa ekonom yang tergabung dalam Aliansi antara lain adalah Yose Rizal Damuri, Wijayanto Samirin, Vivi Alatas, juga Teuku Riefky. Aliansi ekonom menilai berbagai program populis dan intervensi politik pada lembaga negara

berpotensi melemahkan fondasi ekonomi nasional. Karena itu, tujuh desakan darurat diajukan sebagai upaya koreksi dan reformasi kebijakan.

Ekonom sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekonomi Internasional (International Economic Association/IEA) Lili Yan Ing membuka forum dengan menegaskan usulan tersebut berbasis data dan analisis. "Perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah berdasarkan data, fakta, dan analisis," ujarnya dalam keterangan pers virtual (dalam jaringan internet, daring), Selasa, 9 September 2025

Dalam konferensi pers yang dimoderatori Lili Yan Ing, para ekonom menekankan bahwa memburuknya kualitas hidup masyarakat bukan hanya akibat guncangan global, melainkan juga karena proses bernegara yang tidak amanah. Aliansi Ekonom menilai hal itu memunculkan ketidakadilan sosial yang semakin nyata.

Ia menyebut perekonomian RI saat ini tengah tertekan oleh faktor global. Sementara di dalam negeri, gelombang

protes publik menjadi alarm serius atas kondisi ekonomi saat ini. "Situasi ini bukan tiba-tiba terjadi, melainkan akumulasi dari kebijakan ekonomi, proses pengambilan keputusan, dan praktik bernegara yang jauh dari amanah," ujar Lili.

Kondisi darurat ekonomi ini, menurut Aliansi Ekonom, bertolak belakang dengan yang selama ini disampaikan pemerintah. Pemerintah sering membanggakan ekonomi RI yang tumbuh di kisaran lima persen lebih baik dibandingkan negara lain.

Aliansi menyoroti pula sejumlah persoalan, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, ketimpangan pendapatan antarwilayah dan kelompok sosial, menyempitnya lapangan kerja berkualitas, hingga kebijakan ekonomi yang tidak berbasis bukti.

Selain itu, mereka juga mengkritisi lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat, maraknya pungutan liar, perjudian daring, hingga kontrak sosial antara negara dan warganya yang semakin tercederai.

Dari analisis tersebut, Aliansi Ekonom Indonesia menyimpulkan dua akar masalah utama: salah kelola sumber daya serta lemahnya institusi negara akibat konflik kepentingan. Atas dasar itu, mereka menyerukan "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" yang dinilai mendesak untuk segera dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, alokasi anggaran negara harus diperbaiki secara lebih adil agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan menyentuh kebutuhan rakyat banyak. Kedua, mengembalikan independensi lembaga negara agar tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

Ketiga, menghentikan dominasi negara yang dinilai terlalu besar hingga menyingkirkan peran swasta, khususnya UMKM yang justru menjadi penopang ekonomi rakyat. Keempat, penyederhanaan birokrasi harus dipercepat agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan tidak menyulitkan masyarakat.

Kelima, langkah nyata untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi harus menjadi prioritas pembangunan, bukan hanya jargon politik. Keenam, pemerintah diminta menghentikan

program-program populis yang justru mengganggu stabilitas fiskal dan mengancam keberlanjutan anggaran. Sedangkan yang ketujuh, perbaikan kualitas institusi dan tata kelola negara wajib dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik.

"Sebagai ekonom, kami berkewajiban menyampaikan dengan data, fakta, dan

tumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan kehidupan layak bagi seluruh rakyat," ujar Lili Yan Ing.

Terkait dengan desakan darurat ekonomi itu, Aliansi Ekonom mendesak perbaikan APBN dengan mengurangi porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4 persen APBN 2026) seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, subsidi



analisis bahwa penyelenggara negara harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif. Tujuannya jelas, untuk memastikan per-

energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru. Selanjutnya, Aliansi mendesak pemulihan independensi lembaga negara seperti KPK, BI, BPK, DPR, dan BPS agar terbebas dari intervensi politik.

Selain itu Aliansi Ekonom juga mendesak penghentian dominasi negara - termasuk BPI Danantara, serta pelibatan TNI-Polri di ranah sipil yang dianggap mematikan kompetisi usaha dan UMKM. Desakan lainnya adalah deregulasi dan penyederhanaan birokrasi - cabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

Aliansi juga mendesak pemerintah mereformasi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan - integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

Desakan lainnya, hendaknya pemerintah mengambil kebijakan berbasis bukti - setiap program populis baru

## • INFO EKONOMI

seperti MBG atau Koperasi Desa Merah Putih harus melalui kajian independen, uji coba, dan evaluasi rutin. Kemudian pemerintah juga hendaknya melaksanakan perbaikan institusi dan demokrasi - larangan rangkap jabatan, penerapan meritokrasi, penghentian represi terhadap masyarakat sipil, serta pemberantasan praktik suap di dunia usaha.

"Sebagai ekonom sekaligus intelektual, kami berkewajiban menyampaikan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan per-

kebijakan ekonomi nasional," kata Luhut dalam unggahan di akun Instagramnya, @luhut.pandjaitan.

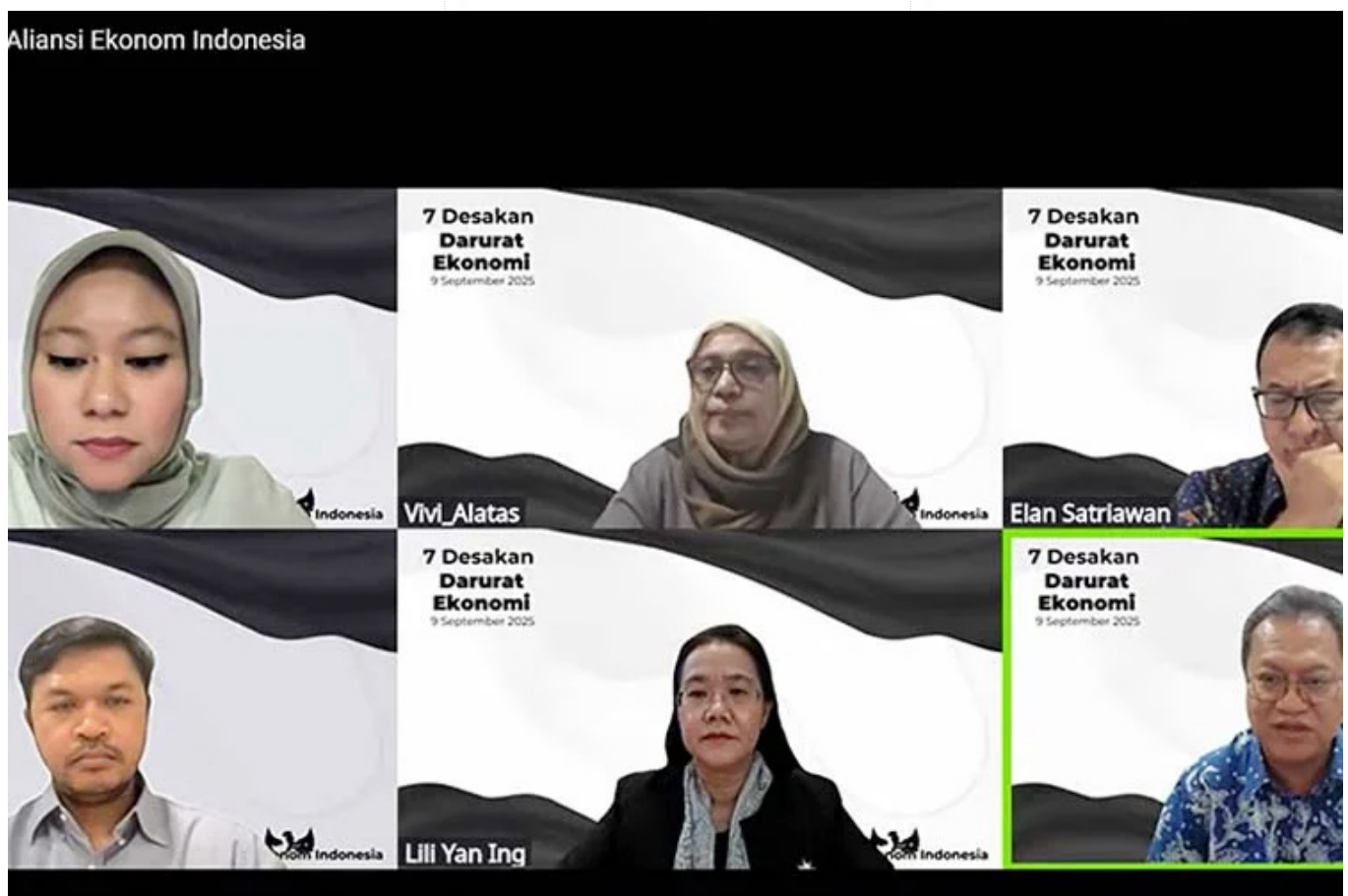
Luhut mengemukakan pula sejumlah masukan datang dari AEI, antara lain deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi yang dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi.

"Saya dan tentunya seluruh tim @de-wanekonomi.id merasa bahwa masukan seperti itu sangat berharga. Karena memang pemerintahan Presiden @prabowo sedang fokus untuk mem-

masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," ujarnya.

Luhut menyampaikan terima kasih kepada para ekonom atas saran membangun yang telah disampaikan lewat forum tersebut. Ia berharap pertemuan seperti ini rutin digelar agar para akademisi dan ekonom dapat berkontribusi lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis. "Sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam," ujarnya.

"Dengan begitu kolaborasi antara



tumbuhan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Lili.

Menanggapi desakan itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan sejumlah ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) pada Jumat, 12 September 2025.

"Selama dua jam lamanya, kami berdialog secara terbuka untuk mendengar paparan AEI terkait tantangan dan arah

perkuat fondasi ekonomi melalui deregulasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, digitalisasi sistem perizinan melalui OSS," ujarnya.

Luhut mengatakan dirinya juga memaparkan upaya penguatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Menurutnya, salah satu pilot project yang akan dijalankan dalam waktu dekat adalah digitalisasi penyaluran bansos. "Dengan sistem yang lebih transparan, bantuan akan lebih tepat sasaran, anggaran lebih efisien, dan yang paling penting,

pemerintah, akademisi, dan para pemikir bangsa menjadi kunci untuk memastikan pembangunan ekonomi yang tidak hanya tangguh menghadapi gejolak global, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Luhut menambahkan.

Dalam keterangan resmi, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. "Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang

telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi," kata Luhut.

Pemerintah, kata dia, mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Juga ada upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, DEN menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

Menurut Luhut, langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran karena bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat. Ketua DEN menggarisbawahi kolaborasi erat antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik merupakan kunci membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan.

"Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan AEI Jahen F. Rezki menyampaikan apresiasi kepada DEN atas kesempatan menyampaikan pandangan ekonom secara langsung. "Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala," tutur Jahen.

Sedangkan dalam pandangan Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita, ekonomi Indonesia bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, secara komparatif. Dengan kacamata komparatif (perbandingan), angka pertumbuhan lima persen memang terbilang tinggi.

Namun, lanjut Ronny, jika dilihat dari aspek kontekstual Indonesia, pertumbu-

han lima persen per tahun masih rendah. "Secara kontekstual, Indonesia sedang dalam fase demographic dividend, perlu lapangan kerja yang sangat banyak yang harus ditopang oleh investasi swasta besar-besaran. Jadi idealnya pertumbuhan berada di level 7-10 persen," ungkapnya.

Dari aspek ketiga, kualitatif, menurut Ronny, kualitas pertumbuhan ekonomi RI tersebut juga kurang. Alasannya, sistem ekonomi RI hanya ditopang dan dinikmati oleh jejaring oligarkis. Maka,

aksi perlawanan terhadap negara dan pemerintah," katanya.

Ronny yakin pemerintah menyadari masalah ekonomi yang terjadi sejak lama. Namun, tampaknya pemerintah sulit mencari jalan keluar dari sisi fiskal yang sudah terlanjur terkaveling-kaveling berdasarkan kekuatan dan pengaruh politik.

Kaveling membuat belanja negara tidak produktif dan cenderung memperkaya segelintir pihak. Jika pemerintah tak mencari jalan keluar, Ronny men-



pertumbuhan lebih menguntungkan kelas atas dan para oligarch (sekelompok kecil elite ekonomi yang memiliki pengaruh politik luas sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah).

Hal ini terjadi karena investasi yang tumbuh lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal dan sektor finansial sehingga pembukaan lapangan kerja kurang maksimal dan sektor informal semakin membesar dari hari ke hari. "Pendeknya, pertumbuhan 5,12 masih jauh dari kebutuhan di satu sisi dan kurang mendukung distribusi kekayaan negara secara adil di sisi lain. Sehingga wajar banyak 'grievances' (keluhan) yang muncul dan sangat mudah tersulut aksi-

gatakan bahaya terpaht secara ekonomi yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi yang semakin menganga dan korupsi akan semakin merajalela.

Bahaya ini potensial berimplikasi secara sosial, karena ketimpangan yang tinggi dan rampant corruption berisiko instabilitas sosial politik. "Karena itu, salah satu strategi antisipasinya adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan kembali distribusi kue ekonomi nasional, mendorong pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, menekan korupsi sampai ke level minimal, dan mengalokasikan anggaran negara secara tepat dan produktif," tandasnya. ●

# ATURAN TKDN SUDAH LEBIH LONGGAR

**Sudah sejak April 2025 Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perubahan regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Belakangan Kementerian Perindustrian merevisi aturan terkait.**

**R**evisi aturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akhirnya keluar juga. Konkretnya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan aturan baru itu pada Kamis, 11 September 2025. Agus mengungkapkan lahirnya aturan ini merupakan kontribusi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam upaya deregulasi di sektor ekonomi. Menurut Agus, Permenperin nomor 35/2025 juga akan mendukung program Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto.

"TKDN ini juga tentu akan mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, di mana Asta Cita kedua yaitu mempertahankan pertahanan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa di bidang energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, juga ada Asta Cita ketiga, menciptakan lapangan kerja. Bukan hanya lapangan kerja, tapi harus yang

berkualitas," ujar Agus dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin.

Ia menjelaskan, Permenperin 35/2025 merupakan pembaruan terhadap Permenperin Nomor 16 tahun 2011 yang usianya 14 tahun. Menurut dia, regulasi lama sudah tidak memadai untuk menjawab kebutuhan industri yang semakin cepat, kompleks dan kompetitif.

Regulasi baru ini, lanjutnya, akan memudahkan pelaku industri berpartisipasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD yang membutuhkan aturan TKDN. Lewat reformasi TKDN, diharapkan arus investasi ke Tanah Air menjadi semakin deras. Agus lalu menekankan reformasi TKDN ini bukan karena adanya tekanan dari pihak manapun.

"Deregulasi nasional tujuannya adalah mengurangi hambatan perdagangan internasional, meningkatkan arus investasi, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku industri dalam negeri. Sekali lagi saya tekankan bahwa reformasi ini lahir atau disusun bukan karena adanya tekanan dari pihak manapun, baik itu dalam negeri maupun



luar negeri," tegas Agus.

Reformasi TKDN menitikberatkan pada 13 poin perubahan yang dikelompokkan dalam empat pilar utama. Pertama adalah mengatur soal insentif TKDN. Reformasi ini juga menghadirkan insentif tambahan, seperti nilai TKDN minimal 25 persen bagi perusahaan yang berinvestasi dan menyerap tenaga kerja lokal.

"Nilai TKDN minimal 25 persen diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri, memiliki fasilitas produk di sendiri, dan menggunakan mayoritas tenaga kerja pabrik-pabrik Indonesia. Jadi intinya, once investor menginvestasikan dan membangun pabrik, dia otomatis sudah mendapatkan 25 persen," sebut Agus.

Kemudian ada tambahan nilai hingga 20 persen bagi yang melakukan riset dan pengembangan. Dalam aturan sebelumnya, tidak ada insentif nilai TKDN bagi investor yang berinvestasi di Indonesia, termasuk kepada pengusaha yang melakukan riset dan pengembangan.

Pilar kedua adalah penyederhanaan perhitungan TKDN yang tidak lagi berbasis total biaya, kecuali untuk jasa industri. Kemudian, masa berlaku sertifikat TKDN dan BMP diperpanjang hingga menjadi lima tahun.

Pilar ketiga adalah kemudahan, khususnya bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Pelaku IKM kini mendapat kemudahan dalam pengajuan sertifikasi TKDN, termasuk dengan skema self declare yang berlaku selama lima tahun.

Dengan metode self declare, IKM bisa lebih cepat memperoleh sertifikat TKDN dengan biaya yang sangat ringan, bahkan dapat mencapai nilai TKDN lebih dari 40 persen tanpa kerumitan administrasi seperti sebelumnya. Nantinya, pengusaha juga bisa menampilkan nilai TKDN dalam produknya, namun masih bersifat opsional.

"Tapi ini optional, tidak akan diwajibkan oleh kami untuk mencantumkan. Sifatnya opsional. Tapi kira-kira seharusnya ada kebanggaan bagi pelaku industri yang memproduksi barang-barangnya untuk menampilkan nilai TKDN-nya ketika produk mereka masuk ke pasar-pasar," jelas Agus.

Pilar keempat adalah kecepatan. Sebelum reformasi TKDN, perhitungan-

nya harus melalui tahapan yang cukup panjang. Kini, sebut Agus, tahapannya dipangkas sehingga sertifikat TKDN bisa semakin cepat terbit.

"Adapun waktu sertifikasinya 10 hari kerja melalui LVI yang sebelumnya 22 hari kerja, dan 3 hari kerja untuk industri kecil melalui self declare yang sebelumnya 5 hari," imbuh Agus.

TKDN merupakan persentase komponen produksi suatu barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri. Beberapa produk dari luar negeri, harus memenuhi unsur TKDN sebelum dipasarkan di tanah air. TKDN diatur lewat sejumlah regulasi. Mulai dari Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neg-



Agus menambahkan, aturan ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berniat mendaftarkan produknya di e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD yang membutuhkan aturan TKDN.

Perusahaan memang wajib memenuhi TKDN dan BMP supaya produk mereka bisa lolos syarat ikut pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, aturan ini dibuat untuk memastikan belanja negara benar-benar mendorong kemajuan industri lokal dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

eri, Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri, hingga Peraturan Menteri Perindustrian. Kementerian Perindustrian menetapkan batas minimal nilai TKDN adalah 25 persen dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen.

Nah, Aturan TKDN ini sempat disinggung oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara di TV Fox News pertengahan Februari 2025, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyoroti kebijakan negara lain yang menghambat penjualan produk ekspor Amerika. Aturan TKDN dinilai menjadi

## • INFO EKONOMI

salah satu hambatan non-tarif atau non-tariff measures.

Presiden Prabowo pun pernah menyinggung soal TKDN ini dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025. "TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," ungkap Presiden.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," lanjut Presiden Prabowo kala itu.

Toh Menperin Agus Gumiwang men-

TKDN telah dilakukan sebelum Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal. Menurut dia, pelonggaran kebijakan TKDN dilakukan atas hasil evaluasi dan masukan dari pelaku industri serta arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kemudahan berusaha.

Toh, tetap ada TKDN yang berhubungan dengan produk AS. Yang mencolok adalah adalah produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bermerek Apple. Dalam hal ini, Kemenperin sudah mengungkapkan sertifikat TKDN untuk produk terbaru Apple, yaitu iPhone Air, iPhone 17, hingga AirPods Pro terbit seiring dengan revisi aturan yang diumumkan Menteri Agus.

Kepala Pusat Penggunaan Produk

Kamis, 11 September 2025.

Menurut dia, Apple tidak lagi perlu mengajukan komitmen atau investasi untuk mendapatkan sertifikat TKDN produk terbarunya. Alasannya, dengan investasi pembangunan pabrik AirTag di Batam senilai USD 1 miliar, Apple telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat TKDN selama tiga tahun. Dengan begitu, Apple hanya tinggal mengajukan sertifikat TKDN agar produk terbarunya bisa dijual di Indonesia.

Heru menjelaskan, Apple baru bisa menjual iPhone 17 dan produk lainnya pada awal Oktober 2025. Menurut dia, masih ada proses perizinan yang harus dilakukan, seperti sertifikasi pos dan telekomunikasi (postel) di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian



egaskan, perubahan kebijakan tata kelola sertifikasi TKDN tidak dilakukan atas tekanan dari pihak manapun. "Ini bukan karena latah, ini bukan karena tekanan dari siapapun," kata Agus.

Ia mengatakan pembahasan soal perubahan tata kelola sertifikasi TKDN telah dilakukan sejak Maret 2024. Waktu itu, kata Agus, Donald Trump belum dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat.

Agus juga menyangkal tarif Trump menjadi alasan perubahan kebijakan TKDN. Jawabannya serupa, Agus mengatakan, pembahasan pelonggaran

Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin Heru Kustanto mengatakan saat ini Apple telah mendaftarkan iPhone 17 dan tiga produk Apple lainnya untuk mendapatkan sertifikat TKDN. "iPhone 17 sudah daftar (sertifikat TKDN), ada empat berkas yang didaftarkan untuk iPhone 17, mudah-mudahan sore ini sudah selesai untuk review-nya, saya setelah pulang dari sini saya cek, kalau sudah selesai saya approve langsung keluar, malam ini juga bisa keluar (sertifikat TKDN) untuk empat unit," tutur Heru di Kantor BPSDMI Kemenperin, Jakarta,

Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurut Heru, penerbitan Sertifikat Postel ini biasanya membutuhkan waktu cukup lama, terlebih Apple juga membutuhkan waktu untuk mengirim produk-produk tersebut ke Indonesia. Dia memperkirakan iPhone 17 dan produk-produk teranyar Apple lainnya baru bisa dijual di Indonesia pada awal Oktober 2025.

"Biasanya mereka akan mengurus izin edar ke Komdigi (Sertifikat Postel), sudah selesai ya tinggal barang masuk ke Indonesia. Komdiginya butuh proses,

kemudian kan ngirim ke Indonesia (bunuh waktu). Seminggu harusnya sudah selesai, awal Oktober, paling lama dua minggu dari sekarang (iPhone 17 bisa dijual)," jelas Heru.

Nah, Aliansi Ekonom Indonesia dalam pernyataan sikap "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" pada Selasa 10 September 2025 juga menyinggung soal TKDN ini. Intinya, Aliansi mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan pelonggaran kebijakan TKDN pada sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan pembinaan pada industri lokal yang dengan memperkuat pada sisi investasi SDM, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Aliansi ini juga menyampaikan bahwa kebijakan TKDN yang kaku

sional Indonesia, dan akses Indonesia pada pasar global. Merujuk penelitian ERIA (2023) dan CSIS (2023) Aliansi menggambarkan dampak penerapan TKDN yang memperburuk iklim investasi, menurunkan produktivitas industri, membebani konsumen dengan harga lebih mahal, menurunkan daya saing industri, memicu distorsi.

Persoalannya sekarang, apakah revisi aturan TKDN itu berdampak negatif terhadap industri di dalam negeri, misalnya industri otomotif berbahan bakar fosil. Pakar Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu pernah mengemukakan revisi aturan TKDN di industri otomotif oleh pemerintah Prabowo menawarkan peluang strategis untuk meningkatkan

lai dengan impor komponen utama, misalnya baterai EV atau sistem penggerak, sambil membangun fasilitas perakitan," kata Yannes.

Namun, sambungnya, revisi TKDN harus diimbangi dengan langkah taktis agar Indonesia tidak terjebak ketergantungan impor, bahkan mematikan industri komponen tier 1 hingga tier 3 yang ada, sehingga berdampak PHK.

Di lain sisi, Yannes menyebutkan revisi TKDN perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan terus dicermati prosesnya berdasarkan pemikiran jangka panjang yang berorientasi pada penguatan potensi sumber daya dalam negeri. Alasannya, dampak negatifnya dalam jangka pendek, jika tidak dibangun regulasi yang memastikan industri



berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan belum menghasilkan produk berkualitas sehingga menghilangkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kebijakan TKDN yang kaku, menurut Aliansi, juga memunculkan celah korupsi dalam proses perizinan dan pengadaan.

Aliansi peun mengemukakan, dampak buruk penerapan kebijakan TKDN terhadap iklim investasi, harga produk di tingkat konsumen, daya saing industri, alokasi sumberdaya, potensi pelanggaran aturan WTO, perdagangan interna-

investasi asing dan daya saing global. Meski demikian, ada juga ancaman di baliknya.

Sisi positifnya, menurutnya revisi TKDN akan membuat para investor baru mungkin lebih tertarik membangun fasilitas perakitan di Indonesia, jika mereka tidak terbebani target TKDN yang sulit dipenuhi dalam waktu dekat.

"Ini sangat menarik bagi pabrikan China seperti BYD, Geely atau Chery, yang ingin masuk pasar Indonesia tanpa harus membangun ekosistem komponen lokal dari nol. Mereka bisa memu-

lokal terlindungi, ratusan perusahaan lokal tier-1 dan tier-2 yang memproduksi komponen otomotif bisa kehilangan pasar, terutama jika mereka tidak mampu bersaing dalam hal harga atau kualitas.

"Lalu, industri komponen lokal yang menyerap banyak tenaga kerja, sulit bersaing dengan komponen impor karena kelonggaran TKDN, industri lokal ini bisa kehilangan pasar, sehingga ujungnya berpotensi mengurangi produksi, PHK, hingga penutupan pabriknya," tandasnya. ●



# RESHUFFLE KABINET AKAN BERLANJUT

**Memasuki bulan ke-11 pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. Lima tokoh dilantik menjadi menteri baru pada Senin, 8 September 2025. Perombakan susunan kabinet ini diprediksi bakal berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.**

**K**elima menteri yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding; Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo; serta Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

Lima tokoh yang dilantik yakni Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan; Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

Adapun dua posisi lainnya terkait dengan pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Posisi menteri dipercayakan kepada Mochamad Irfan Yusuf, sedangkan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Keduanya sebel-

umnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta awak media dan publik menanti pelantikan susulan terkait dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang diputuskan diganti tetapi belum ada penggantinya. Posisi Menko Polkam sendiri sementara diisi penjabat ad interim.

Diperkirakan, pengisian itu akan dibarengi dengan reshuffle kabinet demi peningkatan kinerja pemerintahan sesuai harapan masyarakat.

Presiden Prabowo se usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis, 11 September 2025, tidak membantah ketika ditanya mengenai rencana pelantikan Menpora serta Menko Polkam yang masih kosong setelah ia

memberhentikan Dito Ariotedjo dan Budi Gunawan. Akan tetapi, ia tidak berkomentar banyak.

Presiden meminta publik untuk menunggu keputusan yang bakal dia ambil. Apalagi, saat ditanya Presiden sedang meninjau Sekolah Rakyat, bidang yang tak berhubungan langsung dengan perombakan kabinet.

"Ya, nanti tunggu tolong waktunya, biar kalian ada semangat. Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat, nanya Menko Polkam," kata Presiden sambil berkelakar.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, tidak ingin berspekulasi siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menpora. Namun, ia berharap posisi itu bisa diisi kembali oleh kader terbaik Golkar.

"Tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik, tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada Presiden. Ini bukan jatah-jatahan, ya," ucap Idrus.

Golkar, kata Idrus, meyakini Presiden Prabowo mempunyai pandangan yang mengedepankan aspek profesionalitas dalam menentukan sosok yang akan duduk di kabinetnya. Bahkan, untuk meningkatkan kinerja kabinet ke depan, bukan tidak mungkin pengisian kursi Menpora dan Menko Polkam nanti dibarengi dengan perombakan beberapa kursi menteri.

"Saya yakin, beliau pasti memberikan respons terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat ini tentu tidak mungkin tidak dapat dilaksanakan sekaligus. Pasti bertahap. Nah, termasuk misalkan merespons bagaimana adanya usulan tentang kinerja kabinet, ini sudah dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal ada lima, ya ada lima orang, pada tahap kedua nanti ada evaluasi terus-menerus. Karena kenapa? Karena Pak Prabowo telah berjanji apabila menyangkut kepentingan rakyat apapun harus kita lakukan," katanya.

Oleh karena itu, menteri-menteri bisa muncul dari mana pun, mulai dari partai politik atau bukan partai politik. Semua diorientasikan bahwa reshuffle dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat, serta untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat.

"Sehingga dengan demikian, masalah

dasar profesionalitas dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kabinet ke depan itu juga menjadi pertimbangan utama. Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat. Dalam rangka memperhatikan aspirasi rakyat itu, Partai Golkar punya keyakinan bahwa Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah yang tegas demi kepentingan rakyat," ujar Idrus.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut, pihaknya

usulan untuk mengisi pos kementerian yang kosong tersebut. Namun, dia menekankan Presiden lebih memahami kebutuhannya dan sesuai dengan berbagai program yang dicanangkan.

"Sampai kemarin sibuk untuk persiapan ulang tahun Partai Demokrat. Kami juga menampung berbagai aspirasi, kemudian setelah itu doa bersama. Artinya, kami juga dengan keputusan yang sangat mendadak oleh Presiden, tidak pernah mendiskusikan itu. Dan untuk memberikan kenyamanan kepada Pres-



menyerahkan komposisi reshuffle sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Demokrat juga masih menunggu siapa yang akan mengganti posisi yang kosong.

"Tentu kami tunggu saja karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja, kami tentu mendukung langkah-langkah Presiden yang ingin menjadikan Indonesia lebih baik," tuturnya.

Menurut Herman, Partai Demokrat belum sempat mendiskusikan terkait

iden, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada beliau," kata Herman.

### **Pertimbangan Tidak Matang**

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yurnarto Wijaya, berpendapat, reshuffle kabinet kali ini tidak didasari pertimbangan yang matang dan dilakukan terburu-buru. Hal ini terlihat dari pos Menko Polkam dan Menpora yang masih belum terisi hingga saat ini.

"Terlihat sekali secara teknis masih belum ada nama pengganti, menunjuk-

## • INFO ISTANA

kan ada ketetapan. Terburu-buru di situ, dan itu tentu saja berdampak. Menteri itu jabatan politik, sekaligus berpengaruh langsung pada sektor dari kementerian tersebut,” papar Yunarto.

Pergantian yang terburu-buru juga bisa dilihat dari posisi yang terdampak reshuffle berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Yunarto mempertanyakan pos yang diganti karena dinilai kurang tepat sasaran.

“Ya, suka atau tidak, ada kaitannya dengan konflik politik kemarin. Demonstrasi terhadap DPR hingga kemarahan terhadap polisi. Namun, yang membuat saya bingung, kenapa nama-nama tersebut yang diganti. Budi Gunawan

Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Satgas Tambang dan Sawit,” paparnya.

Yunarto pun memberikan catatan kritis kepada pemerintah. Pergantian komposisi kabinet ini, kata dia, apakah akan menjawab kritik dari masyarakat. Apalagi, masih terbuka kemungkinan untuk melakukan pergantian posisi pembantu Presiden Prabowo ini.

“Menurut saya, ada loophole di situ. Sebetulnya, masalah utama itu bukan personel, tetapi juga evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri, yang memang sedang tidak baik-baik saja,” kata Yunarto.

### Optimisme Publik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan,

Konsolidasi Presiden dengan pimpinan partai politik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta audiensi dengan tokoh agama dan mahasiswa, menurut dia, belum cukup menjawab tuntutan rakyat. Publik menunggu respons konkret Presiden terhadap persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, Presiden perlu menunjukkan respons tegas terhadap tuntutan tersebut. Reshuffle dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek dan menengah untuk menunjukkan keseriusan pemerintah menindaklanjuti berbagai aspirasi rakyat.

“Momen reshuffle sedikit banyak dapat meredam sekaligus memberikan pesan optimisme kepada publik bahwa



misalnya, kenapa tidak Kapolrinya yang diganti?” ujarnya.

Terlepas dari kondisi tersebut, Yunarto menekankan kekosongan posisi menteri ini harus segera diisi dalam hitungan hari, terutama Menko Polkam. Apalagi, Sjafrie Sjamsoeddin saat ini selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, juga menjabat sebagai ad interim Menko Polkam. Kedua posisi itu sama-sama penting.

“Sebagai ad interim pun tetap memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan ataupun teknis pelaksanaan. Pak Sjafrie juga memiliki tanggung jawab yang besar, empat jabatan sekaligus, termasuk

perombakan kabinet dapat menjadi langkah konkret Presiden untuk menumbuhkan optimisme publik. Pergantian menteri menandakan pemerintah serius menjawab tuntutan rakyat di tengah gelombang demonstrasi. Usia Kabinet Merah Putih yang hampir setahun menjadi momentum mengevaluasi kinerja para pembantu Presiden.

Agung mengatakan, perombakan kabinet di tengah gelombang demonstrasi diyakini dapat meredam gejolak publik. Reshuffle akan memberikan pesan bahwa Presiden Prabowo Subianto serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat.

pemerintah cukup serius membenahi sektor ekonomi yang kurang baik,” kata Agung, Jumat, 5 September 2025.

la menilai, tiga alasan yang biasanya menjadi pertimbangan reshuffle, yakni teknokratis, yuridis, dan politis, telah terpenuhi. Dari sisi teknokratis, usia Kabinet Merah Putih yang hampir setahun menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja menteri. Publik pun menanti pembenahan tim ekonomi yang diharapkan lebih tangkas merespons keluhan masyarakat.

“Saya kira dimensi teknokratis itulah yang akan mengemuka untuk reshuffle kabinet ketika ada protes besar

publik terhadap pemerintah. Walaupun sasaran utamanya ke legislatif, tetapi residunya sampai ke eksekutif," tuturnya.

Dari sisi yuridis, penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin membuka peluang reshuffle. Posisi itu perlu segera diisi karena persoalan di sektor ketenagakerjaan masih menumpuk, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang juga menjadi tuntutan demonstran.

Adapun dari dimensi politis, Agung melihat PDIP mulai menunjukkan arah lebih mendekati ke pemerintah. Meskipun menegaskan berada di posisi penyeimbang, PDIP semakin sering sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan pimpinan parpol di Istana beberapa hari lalu kian menegaskan kedekatan itu.

"Pelantikan Menteri Haji dan Umrah yang dasar hukumnya baru saja disahkan bisa menjadi momentum untuk sekaligus mereshuffle menteri-menteri yang lain," ucap Agung.

### Kurangi Tensi Politik

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, reshuffle memang akan membuat situasi politik lebih stabil sekaligus mengurangi tensi politik di masyarakat. Momentum setahun kabinet dan situasi gelombang demonstrasi dapat menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk merombak kabinetnya.

Meski demikian, Presiden perlu berhati-hati dalam memilih pengganti dan waktu dalam melakukan reshuffle menteri. Sebab, reshuffle yang dilakukan di tengah gejolak publik dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan. Presiden harus memiliki kalkulasi matang agar reshuffle berdampak positif bagi kinerja pemerintahan.

"Reshuffle yang dilakukan saat situasi politik belum stabil akan memicu instabilitas internal pemerintahan. Jadi, Presiden harus betul-betul memiliki perhitungan yang matang agar tidak kontraproduktif," kata Arya.

Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Ri-

set dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menuturkan, reshuffle pun harus diikuti dengan penyelesaian berbagai problem yang menjadi tuntutan publik. Tuntutan pembukaan lapangan kerja baru, partisipasi inklusif bagi publik dalam proses pembuatan kebijakan, serta komunikasi intensif antara pemerintah dan rakyatnya secara langsung harus ditunjukkan pemerintah.

Di sisi lain, implementasi program-program unggulan perlu dievaluasi. Kalaupun akan diteruskan, pemerintah harus memperkuat pendampingan agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan.

"Presiden jangan sekadar menerima laporan dari bawahan, tetapi juga perlu mengecek langsung ke lapangan," tutur Wasisto. ●





# WAMEN DILARANG RANGKAP JABATAN

**Larangan rangkap jabatan kini tidak hanya berlaku bagi menteri, tetapi juga wakil menteri. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan wakil menteri tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi BUMN maupun perusahaan swasta, serta unsur pimpinan organisasi yang dibiayai APBN atau APBD.**

**M**K merasa perlu menegaskan larangan itu agar wakil menteri, seperti halnya menteri, dapat fokus menangani urusan kementerian. Bukan hanya itu, MK juga memerintahkan agar fasilitas wakil menteri sebagai pejabat negara dipenuhi secara proporsional sesuai jabatannya.

MK memberi waktu bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian paling lambat dua tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan itu dibacakan dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Namun, putusan itu tidak bulat karena ada dua hakim yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Arsul Sani.

"Mengabulkan permohonan pemohon I untuk sebagian," ujar Ketua MK, Suhartoyo, yang memimpin persidangan.

MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Pasal 23 UU Kementerian Negara. Permohonan itu diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa, Ketua Perhimpunan Pengacara Konstitusi selaku pemohon I, dan pemohon II, seorang pengemudi ojek online bernama Didi Supandi.

Baik Viktor maupun Didi menguji konstitusionalitas Pasal 23 UU Kementerian Negara, khususnya frasa "menteri

dilarang merangkap jabatan". Kedua pemohon itu meminta MK memaknai pasal tersebut dengan menambahkan "termasuk wakil menteri". Tanpa pemaknaan terhadap larangan jabatan menteri, termasuk di dalamnya wakil menteri, Pasal 23 UU Kementerian Negara dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

MK pun mengabulkan sebagian permohonan itu. MK menyatakan, Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945. UU itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menteri dan wamen dilarang merangkap jabatan.

Bukan hanya merangkap sebagai pejabat negara lain, menteri dan wamen juga dilarang menjadi komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta dan pimpinan organisasi yang dibiayai APBN dan APBD.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, menegaskan, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wamen.

Larangan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara, wamen harus fokus pada tugas-tugas di kementerian yang memerlukan penanganan khusus.

Adanya tugas khusus itu pula yang menjadi alasan pengangkatan wamen pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya jabatan wamen tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Sebab, untuk menjalankan jabatan komisaris juga memerlukan konsentrasi waktu.

"Pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Enny.

Putusan tersebut juga selaras dengan Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019. Putusan itu juga menyatakan norma Pasal 23 UU Nomor 39/2008 bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Selain itu, bertentangan pula dengan asas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Pertimbangan hukum putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri," papar Enny.

Sebagai konsekuensi atas larangan itu, pemerintah harus memenuhi fasilitas wamen secara proporsional sesuai dengan jabatannya. Hal ini juga selaras dengan pertimbangan dalam Putusan MK No 80/PUU-XVII/2019.

Enny menegaskan, larangan wamen rangkap jabatan beserta konsekuensinya itu tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat walaupun hal itu berada dalam pertimbangan putusan. Ini karena putusan MK tidak hanya berupa amar putusan, tetapi juga duduk perkara, pertimbangan hukum, bahkan berita acara persidangan.

MK juga memberikan tenggang waktu bagi pemerintah untuk menyesuaikan ketentuan larangan wamen rangkap jabatan tersebut. Tenggang waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan itu diberikan guna menghindari keko-



songan hukum terhadap implementasi norma Pasal 23 UU Nomor 39/2008 yang telah dimaknai MK.

"Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatan yang dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Putusan yang dijatuhkan mahkamah tersebut tidak bulat karena ada dua orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Mereka adalah Daniel Yusmic P Foekh dan Arsul Sani.

Daniel pada pokoknya menyatakan dalam konteks perkara tersebut pendirian mahkamah dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 tetap perlu dipertahankan dan semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan.

Adapun Arsul Sani pada pokoknya menyatakan Mahkamah seharusnya perlu menerapkan due process perkara pengujian UU yang bersifat deliberatif dan partisipatif. Di antaranya dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk UU maupun para pihak yang terdampak.

### Pemerintah Hormati Putusan MK

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan, pemerintah sudah mendapat informasi mengenai putusan MK yang melarang wamen rangkap jabatan.

"Pertama, tentu kami menghormati segala putusan MK," tuturnya.

Selanjutnya, pemerintah akan mempelajari dan menindaklanjuti putusan MK tersebut. Selain itu, Kemensetneg juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti akan dibicarakan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut. Jadi, kami mohon waktu terlebih dahulu karena juga baru beberapa saat yang lalu itu dibacakan keputusannya," ujarnya.

Tercatat ada 32 wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN:

1. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda

3. Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telekom Indonesia (Persero) Tbk
4. Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Derawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasaran, Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
7. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara - Komisaris PT PLN (Persero)
8. Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT PLN (Persero)
9. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoat-



- modjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10. Wakil Menteri UMKM, Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
12. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
13. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
14. Wakil Menteri Perhubungan, Sun-tana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
15. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
16. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
17. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

18. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
19. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
20. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
21. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKM, Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
22. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
23. Wakil Menteri Sekretaris Negara,

- Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
24. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk
25. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan - Komisaris di PT Citilink Indonesia
26. Wakil Menpora, Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
27. Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
28. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
29. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
30. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto - Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services
31. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto - Komisaris PT PLN (Persero)
32. Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej - Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk •

# RUU PERAMPASAN ASET MENANTI KOMITMEN PRABOWO

**Sejumlah anggota DPR mengklaim siap membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, agar pembahasan ini bisa segera dimulai, Presiden Prabowo Subianto diharapkan juga ikut mendorong para ketua umum partai politik di koalisinya yang sangat dominan di DPR. Jika tidak, Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.**

Sebelumnya, serangkaian unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di bulan Agustus lalu memberikan sejumlah tuntutan. Salah satunya terkait dorongan RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas.

Unjuk rasa dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa hingga buruh, mengangkat isu RUU yang dianggap sebagai upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Dorongan membahas RUU Peram-

pasan Aset juga bukan barang baru. Digagas sejak 2009 dengan rancangan pertama rampung 2012, RUU Perampasan Aset masih menunggu untuk dibahas dan disahkan. Terakhir, Presiden Prabowo menyampaikan dukungan RUU Perampasan Aset segera dibahas pemerintah dan DPR pada pidato Hari Buruh 2025.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan, partainya mendukung penuh RUU Perampasan Aset. Partai Demokrat mendukung Prabowo saat mencalonkan diri sebagai presiden karena salah satu janjinya adalah pemberantasan korupsi.

"Sikap kami jelas. Kami mendesak itu (RUU Perampasan Aset) karena kami bagian dari partai politik yang mendukung sejuta persen Presiden Prabowo menjadi presiden. Salah satu janjinya adalah memimpin langsung pemberantasan korupsi," kata Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 2 September 2025.

Menurut Benny, dukungan dari Partai Demokrat terhadap RUU Perampasan Aset sudah ada sejak periode Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, dia menyangkan RUU Perampasan Aset tidak menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Sebelumnya, pada November 2024, DPR telah menyetujui 176 RUU masuk

dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan 41 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025. Namun, tidak ada RUU Perampasan Aset yang masuk prioritas dan hanya masuk ke dalam jangka menengah.

"Sikap kami waktu itu bahkan mendesak Presiden Jokowi jika punya political will yang kuat untuk memberantas korupsi. Saat periode Presiden Prabowo juga kami mendesak segera dibahas di Prolegnas Prioritas 2025. Tetapi, kan, tidak tercapai karena hanya kami yang mendukung itu," lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengharapkan Presiden Prabowo mengambil langkah untuk mendorong RUU Perampasan Aset segera dibahas. Presiden bisa membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset ini.

Menurut Benny, Presiden juga bisa mendorong partai-partai di DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset.

"Saya yakin akan didukung oleh anggota dewan karena mayoritas DPR ini mendukung Presiden Prabowo. Tinggal beliau mau atau tidak, ya kan?" ujarnya.

Benny memaklumi, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan publik dalam demonstrasi kali ini karena mendesak pemberantasan korupsi. Namun, dia mengingatkan, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa tiba-tiba langsung dilakukan.

"Urgensi itu (RUU Perampasan Aset), kan, bagian dari agenda pemberantasan korupsi. Namun, ada mekanisme yang harus diproses, diperdebatkan, diperbincangkan. Undang-undang tidak hanya tiba-tiba ketok (disahkan)," ungkapnya.

Pemberantasan korupsi, lanjut Benny, sebenarnya juga bisa dimaksimalkan dengan penegakan hukum dari produk hukum yang sudah ada sebelumnya. Penindakan tegas seperti operasi tangkap tangan (OTT) yang berjalan juga perlu dipertahankan.

"Jadi, politik hukum kita tentang pem-



berantasan korupsi itu jelas ada di UU Tipikor, ya kan? OTT selama ini masih jalan, lho. Jadi, sebetulnya jangan merasa seolah-olah UU Perampasan Aset ini jadi 'lampu aladin'. Benda itu (RUU Perampasan Aset) hanya salah satu saja," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sturman Panjaitan, menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan sesegera mungkin. Dia juga menegaskan, pembahasan dilakukan dengan hati-hati agar tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya.

"Kami tinggal menunggu naskahnya. Dari Badan Keahlian, kami buat, dan itu akan kami bahas. Memang (RUU Perampasan Aset) akan kami lakukan sesegera mungkin. Kami juga harus hati-hati, jangan sampai salah. Tidak boleh tumpang tindih," lanjut politikus PDIP ini.

Sturman mengatakan, kehati-hatian tersebut tidak hanya agar RUU Perampasan Aset tidak bertabrakan dengan undang-undang lain. Dia juga ingin memastikan penggunaan RUU tersebut tepat sasaran.

"Undang-undang itu harus searah, sejalan. Supaya tidak berlawanan, kami harus perlu hati-hati. Ini juga jangan sampai orang-orang yang tidak perlu asetnya dirampas malah jadi dirampas," tutur Sturman.

Oleh karena itu, kata Sturman, pihaknya bakal bekerja semaksimal mungkin dalam membahas RUU Perampasan Aset. Bahkan, dia menyebut telah diinstruksikan oleh PDIP untuk mengawal RUU tersebut.

"Ya, itu harus (mengawal RUU Perampasan Aset). Semua rancangan undang-undang yang masuk di Badan Legislasi atau yang kami usulkan, itu perintah dari fraksi masing-masing untuk dikawal," ungkapnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meyakini pembahasan RUU Perampasan Aset akan lebih cepat selesai jika diinisiasi oleh DPR dibanding pemerintah. Apalagi, DPR sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU tersebut, sehingga hanya tinggal soal waktu.

"Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan pembahasannya akan jauh lebih cepat. Karena itu berarti DPR-nya sudah bisa," kata Supratman, Rabu, 3

September 2025.

Sebelum pembahasan RUU Perampasan Aset, dia menuturkan, pihaknya akan berbicara terlebih dahulu dengan pimpinan DPR apakah RUU itu akan menjadi usul inisiatif pemerintah atau DPR.

Sejak awal, dia menekankan Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, sudah menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan menjadi prioritas.

Maka dari itu, dia mengaku pemer-

aksi demonstrasi.

Terkait adanya usul penerbitan Perppu tentang Perampasan Aset, Supratman menegaskan beban penerbitan Perppu tak selamanya bisa diberikan kepada Presiden. Pasalnya, sepanjang RUU Perampasan Aset bisa berproses secara normal dan semua pihak memiliki komitmen yang sama, maka akan jauh lebih baik.

Namun yang jelas, ia menekankan pembahasan RUU Perampasan Aset bukan sekadar memenuhi tuntutan



intah sedang menunggu pengesahan Prolegnas 2026 maupun revisi Prolegnas 2025.

"Saat ini, karena kondisinya di DPR masih seperti yang teman-teman tahu, kami lagi berusaha untuk pengesahan prolegnas yang akan datang untuk 2026," ungkapnya.

Namun, dirinya mengajak seluruh pihak yakin dan percaya, Presiden sudah mengeluarkan komitmen pengesahan RUU Perampasan Aset berkali-kali, di mana terakhir dilakukan di hadapan para buruh yang melakukan

para demonstran, melainkan sejak awal pemerintah sudah berkomitmen, terutama Presiden.

Apalagi, draf RUU Perampasan Aset sudah dirampungkan oleh pemerintah sejak lama, sehingga terkait pembahasannya di pemerintah sudah selesai.

"Jadi itu sudah sebelum demo pun, kami sudah mempersiapkan dan merencanakan untuk begitu prolegnasnya kami evaluasi untuk penetapan 2026 atau pun evaluasi 2025, RUU Perampasan Aset akan masuk di dalam," tegasnya. ●

# JUAL PROYEK RAKSASA KE CHINA

**Pemerintah menawarkan peluang investasi untuk proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall kepada sejumlah negara, termasuk China. Peluang tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan khusus Presiden China Xi Jinping di Beijing pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan, 3 September 2025.**

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara itu sempat membahas peluang kerja sama infrastruktur strategis, termasuk proyek Giant Sea Wall yang ditaksir bakal menelan biaya sekitar USD80 miliar atau sekitar Rp1,31 kuadriliun (kurs Rp16.430 per dolar AS).

Selain China, proyek ini juga ditawarkan kepada Korea Selatan, Jepang, hingga negara-negara Eropa. Proyek ini menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim.

"Jadi Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca, climate change," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri diskusi bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

Airlangga menjelaskan, sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan

dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China. Negara lain sudah juga ditawarkan seperti Korea (Korsel), Jepang, negara Eropa," terang Menko.

Selain Giant Sea Wall Pantura, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, Presiden Prabowo juga menawarkan proyek perluasan trayek kereta cepat saat bertemu Presiden Xi Jinping. Ia menilai proyek tersebut membutuhkan dukungan investasi asing agar bisa terealisasi optimal.

"Karena sekali lagi, kami membutuhkan investasi untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur yang berskala besar," katanya.

Menurut AHY, pemerintah telah membentuk badan otorita khusus untuk menangani proyek perlindungan kawasan Pantura Jawa tersebut. Kolaborasi dengan mitra internasional, termasuk China,



dinilai dapat mempercepat perencanaan, pendanaan, hingga eksekusi lapangan.

### Badan Otorita Pengelola Pantura

Presiden Prabowo Subianto diketahui mengumumkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura untuk pembangunan tanggul laut raksasa pada 25 Agustus 2025. Badan ini dibentuk untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa. Keberadaan Badan Otorita Pantura ini diharapkan mampu mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan badan itu dikepalai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf.

"Sebetulnya, itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun, yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," kata Prasetyo.

Dikatakan Prasetyo, data menunjukkan setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di pantai utara Jawa. Sementara, rob sudah hampir rutin terjadi di sejumlah wilayah. Padahal, sekitar 20 juta warga tinggal di pesisir Pantura.

Struktur kepemimpinan badan terdiri atas seorang kepala dan dua wakil kepala. Darwin Trisna Djajawinata selaku salah satu perwakilan Danantara dan Suhajar Diantoro yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantura.

Menurut Prasetyo, penunjukan dua wakil kepala didasarkan pada kebutuhan teknis, bukan tafsir politik.

"Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sedangkan satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini akan bersentuhan dengan lima provinsi di Pulau Jawa," katanya.

Prasetyo menambahkan, keberadaan Badan Otorita Pantura diharapkan mampu mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa.

Kementerian Koordinator Bidang

Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan berperan sebagai dewan pengarah pada Badan Otorita Pengelola Pantura.

Menurut AHY, Badan Otorita Pantura tersebut dipersiapkan secara khusus untuk memastikan penanganan kawasan pantura berjalan efektif, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa. Selain itu, Badan Otorita juga akan memutakhirkan berbagai konsep dan rancangan yang sebelumnya telah dijalankan terkait proyek tanggul laut tersebut agar dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.

AHY menambahkan aspek investasi juga akan menjadi perhatian bersama

ara Jawa dari banjir rob hingga kawasan ekonomi khusus (KEK).

AHY yang diharapkan dapat mengkoordinasikan dari sisi lima kementerian teknis, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi.

"Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholder, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah," ujarnya.



dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Danantara untuk mendukung pelaksanaan program strategis di kawasan Pantura.

"Investasi kita akan bekerja secara bersama-sama tentunya. Saya sendiri tentunya bersama dengan Menteri Investasi, termasuk Danantara," kata AHY.

AHY menyebut kehadiran Badan Otorita ini untuk memproteksi wilayah ut-

### Skema Pendanaan

Rencana pembangunan tanggul laut raksasa akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha. Kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat.

Peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS), Anto Prabowo, menilai proyek Giant Sea Wall perlu mendapat dukun-

## • INFO NASIONAL

gan dari solusi pembiayaan campuran (blended finance).

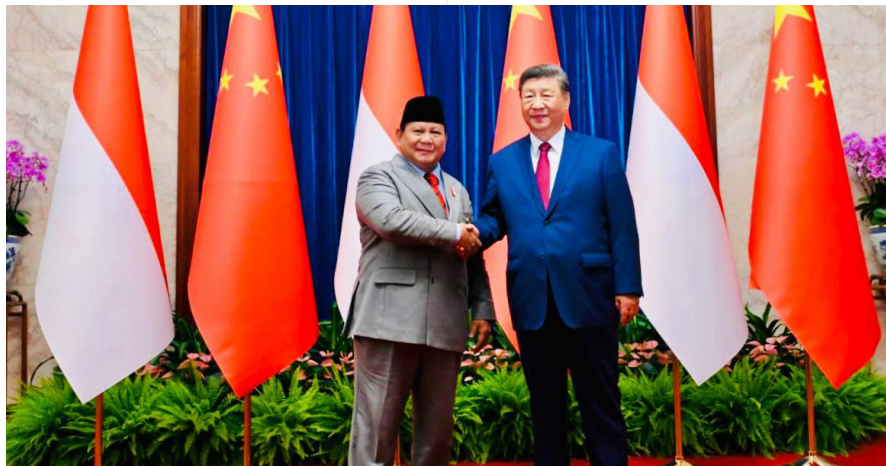
Proyek itu diestimasi membutuhkan dana sebesar USD40-42 miliar untuk pembangunan di Jakarta. Angka sebesar ini tak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN yang juga menanggung program prioritas lainnya.

"Solusinya adalah pembiayaan campuran (blended finance), memadukan dana publik, swasta, dan investor global melalui instrumen keuangan inovatif," kata Anto, Sabtu, 6 September 2025.

rangan kerugian banjir sebesar USD600 juta per tahun.

"GSW bukan hanya mencegah kerugian, tetapi menciptakan nilai ekonomi baru. Inilah logika asset value protection dan asset value creation yang harus berjalan beriringan," tambahnya.

Dia menambahkan proyek multi-dimensi ini bisa berhasil dengan tata kelola kolaboratif. Inovasi keuangan seperti Green Sukuk, Asset Value Protection, dan ABS menjadikan proyek ini bankable sekaligus inklusif.



Menurutnya, GSW akan menjadi model adaptasi iklim global yang memadukan perlindungan aset fisik, transformasi sosial-ekonomi, pelestarian ekologi, dan inovasi pembiayaan jika berhasil.

Potensi nilai ekonominya diperkirakan mencapai USD20-25 miliar nilai properti baru di kawasan reklamasi dalam 20 tahun, pusat bisnis, dan industri baru yang menarik investasi asing langsung (FDI).

Proyek ini juga diproyeksikan dapat menyerap ratusan ribu tenaga kerja di sektor konstruksi, jasa, dan pariwisata. Selain itu, efisiensi ekonomi dari pengu-

Safeguards sosial-ekologis juga perlu diperhatikan untuk memastikan pembangunan berkeadilan.

"Jika ketiga hal ini dijaga, GSW akan menjadi tonggak sejarah Indonesia dalam menjawab triple challenge kebijakan iklim, yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan," tuturnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pentingnya pelibatan pelaku usaha sejak tahap perencanaan pembangunan giant sea wall, mengingat potensi besar proyek ini bagi pengembangan industri di sepanjang pantai utara Jawa.

Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, menyatakan, pihaknya menyambut baik pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura yang dibentuk untuk pembangunan tanggul laut raksasa. Ia menilai pembentukan badan otoritas itu merupakan langkah awal yang positif.

"Secara khusus belum (ada komunikasi), ini baru dibentuk badannya. Namun, saya pikir memang harus dimulai, karena nilai untuk pembangunannya memang luar biasa itu," ujarnya, Kamis, 4 September 2025.

Meskipun komunikasi resmi dengan pihak pengusaha belum dimulai, Sanny mengusulkan agar pelaku usaha dilibatkan dalam perencanaan megaprojek ini.

Menurut Sanny, proyek tanggul laut raksasa ini bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, melainkan juga berpotensi besar untuk pengembangan kawasan industri, khususnya manufaktur.

"Di sepanjang pantai utara Jawa, dari Banten sampai Banyuwangi, itu memang potensi pengembangan kegiatan industri, khususnya industri manufaktur," kata Sanny.

Ia menilai pelibatan pengusaha sejak awal akan memastikan bahwa proyek ini dapat diselaraskan dengan kebutuhan industri, sekaligus menciptakan peluang untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

### Perubahan Masterplan

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengungkapkan kemungkinan akan ada penyesuaian terkait rencana induk (masterplan) tanggul laut raksasa.

"Masterplan-nya dari dulu sudah ada, tapi mungkin ada sedikit perubahan-perubahan atau seperti apa disesuaikan," ujar Diana, Kamis, 4 September 2025.

Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan saat ini kajian mengenai studi kelayakan atau feasibility study Giant Sea Wall masih dalam proses.

Dody mengatakan, desain dasar atau basic design terkait Giant Sea Wall sebenarnya sudah ada sebagai bagian dari Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Basic design sebenarnya sudah ada,

yang dulu banget, tapi kemudian itu mesti diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman,” kata Dody.

NCICD merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum.

Prinsip pembangunan NCICD bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

NCICD bermanfaat untuk menahan air laut akibat gelombang pasang air laut atau banjir rob, mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir rob, serta dan sebagai batas pengembangan daratan di kawasan pesisir. Namun, apabila penurunan permukaan tanah terus berlangsung, pemerintah berencana membangun Tanggul Laut Tahap B (Giant Sea Wall).

Sementara, Menko AHY mengemukakan model proteksi pembangunan Giant Sea Wall di kawasan Pantura Jawa disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.

“Saya bersama Laksamana Didit selaku Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dan tim tadi menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan sekaligus kami melaporkan sejumlah progres dalam perencanaan pembangunan Giant Sea Wall,” katanya.

Pada kawasan yang mengalami penurunan tanah (land subsidence) parah, kata AHY, dibutuhkan tanggul laut yang dibangun beberapa kilometer dari garis pantai. Namun, di daerah dengan kondisi sedang, cukup dilakukan penguatan tanggul pantai untuk mencegah bencana.

Sementara itu, untuk kawasan yang relatif masih baik, rehabilitasi mangrove dinilai sebagai opsi paling efektif dan efisien.

“Jadi akan ada kombinasi antara tanggul laut, tanggul pantai, dan mangrove sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” kata AHY.

la menambahkan, pemerintah akan melengkapi kajian sebelum menetapkan langkah teknis maupun skema investasi proyek strategis tersebut.

la menyebut pembangunan tanggul raksasa itu menjadi proyek proteksi yang



sangat esensial, bertujuan menyelamatkan jutaan masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob dan penurunan tanah yang semakin parah.

“Kita ingin melindungi masyarakat

Pantura yang setiap saat terancam bencana, sekaligus menjaga kawasan industri strategis serta kawasan ekonomi khusus yang banyak tersebar di pantai utara Jawa,” katanya. ●

# KEMENDAGRI BISA PANGKAS TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD

**Setelah publik dibuat geram dengan tunjangan perumahan anggota DPR yang nilainya fantastis, sekarang giliran tunjangan perumahan DPRD yang disorot. Nominalnya bahkan ada yang lebih besar dari tunjangan perumahan DPR.**

**K**ementerian Dalam Negeri diminta mencoret tunjangan tersebut saat mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Tunjangan perumahan pimpinan DPRD Jakarta, misalnya, mencapai Rp78,8 juta per bulan. Adapun untuk anggota DPRD Jakarta sebesar Rp70,4

juta per bulan. Selain itu, tunjangan perumahan pimpinan DPRD Jawa Barat nilainya mencapai Rp64 juta per bulan serta untuk anggota sebesar Rp62 juta.

Nilai itu lebih besar daripada tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Tunjangan ini kemudian diputuskan dihentikan sejak 31 Agustus lalu atau setelah protes keras oleh masyarakat dalam rangkaian demonstrasi pada akhir Agustus silam.

Tak hanya itu, DPR memutuskan memangkas biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan, bisa saja kepala daerah bersama DPRD mengevaluasi tunjangan anggota DPRD di wilayahnya masing-masing.

"Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi," kata Tito di Kantor Kementerian Kesehatan, Ja-

karta Selatan, Selasa, 9 September 2025.

Tito menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri ranah pemberian tunjangan. Kewenangan tunjangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"PP Tahun 2017 itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan tunjangan kepada DPRD, disesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Sebelum ada rumah dinas untuk mereka, diberikan tunjangan rumah yang sesuai harganya, kewajaran, dan lain-lain," kata Tito.

Namun, Tito mengetahui adanya masyarakat di sejumlah daerah yang merasa keberatan dengan besarnya tunjangan rumah para anggota dewan. Oleh karena itu, dia meminta seluruh kepala daerah untuk proaktif menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, ter-



masuk tunjangan tersebut.

"Beberapa daerah yang ada keberatan dari masyarakat, saya minta untuk proaktif melakukan komunikasi, sehingga ditemukan (keputusan) yang baik," ucap Tito.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan, saat ini, pemerintah dan DPRD provinsi masih memproses Rancangan APBD 2026. Dengan demikian, belum ada yang mengajukan evaluasi RAPBD 2026 ke Kemendagri.

Meski demikian, pihaknya berjanji sorotan publik pada tunjangan perumahan anggota DPRD akan menjadi perhatian dalam evaluasi RAPBD bersama pemda.

"Kemendagri akan mengingatkan agar dilakukan rasionalisasi bagi tunjan-

terhadap aspirasi publik, terutama di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara.

Ia menilai, Tito Karnavian menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap keresahan publik terhadap pejabat negara, dan mampu memetakan isu tersebut hingga ke tingkat pemerintah daerah dan DPRD. Arahan ini dianggap

gan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Meskipun legislatif punya kewenangan dalam fungsi anggaran, tetap saja pembahasannya dilakukan bersama pihak eksekutif. Seharusnya, tanpa ada arahan Mendagri pun, DPRD bisa secara proaktif mengevaluasi tunjangannya," katanya.



**Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi.**

gan DPRD yang terlalu tinggi dan tidak memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, dan kepatutan," ujar Benni.

#### Jawaban Aspirasi Publik

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai langkah Tito Karnavian yang mengarahkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPRD di wilayah masing-masing, sebagai sebuah jawaban terhadap keresahan dan aspirasi publik.

"Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR," kata Fernando, Rabu, 10 September 2025.

Fernando mengatakan hal itu sebagai langkah yang tepat untuk mendorong kepala daerah dan DPRD lebih peka



sebagai bagian dari solusi menyeluruh atas keluhan masyarakat.

"Tito tidak hanya melihat masalah dari permukaan, tetapi juga menelusuri sampai ke Pemda dan DPRD. Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial," ujarnya.

Meski arahan tersebut berpotensi dianggap memasuki ranah legislatif, Fernando menegaskan, tunjangan DPRD memang dibebankan pada anggaran daerah. Hal ini telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuan-

Dia berharap agar saran dari Mendagri dipahami secara serius oleh partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran di parlemen daerah.

"Parpol harus lebih peka. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah mengevaluasi tunjangan bisa meredakan kemarahan publik terhadap partai politik itu sendiri," jelasnya.

Fernando juga menyebut Partai Gerindra dan partai-partai koalisi pemerin-

tah harus menjadi inisiator evaluasi ini, menyusul langkah DPR pusat yang juga melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggotanya.

"Seharusnya partai-partai besar seperti Gerindra mengambil langkah awal untuk memberi arahan kepada seluruh kadernya di DPRD agar melakukan evaluasi tunjangan," katanya.

Jika para pimpinan partai politik memiliki pandangan yang sejalan dengan Mendagri, maka anggota DPRD sebagai kader partai akan mengikuti arahan tersebut. Ini sekaligus dapat membantu memulihkan citra partai politik yang saat ini sedang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.

"Kalau pimpinan partai sudah bicara, para kader pasti akan patuh," tutur Fernando.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djojan, mengatakan, Kemendagri bisa

dari Kemendagri," kata Djohermansyah, Rabu, 10 September 2025.

Namun, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri itu menilai diperlukan kejelian dan upaya lebih dari Kemendagri untuk dapat menangkap sensitivitas publik dalam isu tunjangan DPRD itu. Sebab, dokumen RAPBD 38 provinsi yang masuk ke Kemendagri biasanya sifatnya hanya ringkasan umum, tidak sampai hitungan yang detail. Untuk itu, Kemendagri harus meminta data lebih detail dari pemerintah provinsi.

"Jika hanya menggunakan mekanisme review standar, biasanya tidak bisa diketahui detail nominalnya," ujarnya.

Setelah mengetahui detail tunjangan tersebut, Kemendagri harus menguji kepatutan dan kelayakannya dengan mekanisme yang obyektif. Caranya dengan membandingkan harga sewa rumah di provinsi tersebut dengan yang dianggarkan dalam RAPBD.



menyatakan bahwa anggaran tunjangan itu terlalu besar saat mengevaluasi RAPBD 2026.

Nilai tunjangan itu bisa dikoreksi dengan melihat rata-rata harga sewa rumah di provinsi tersebut untuk menentukan kepatutan dan kelayakannya. RAPBD provinsi biasanya akan dievaluasi oleh Kemendagri, dua pekan sebelum ditetapkan.

"Kemendagri berdasarkan kasus yang muncul di daerah seperti sekarang ini lalu bisa memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar besaran tunjangan perumahan diturunkan menjadi sekian saja berdasarkan hasil penilaian

Misalnya, jika di Jakarta harga sewa rumah rata-rata hanya senilai Rp35 juta per bulan, tunjangan bisa diturunkan senilai itu. Untuk provinsi lainnya, juga perlu survei berapa rata-rata harga sewa rumah di lokasi tersebut.

#### Celah aturan

Direktur Eksekutif Komite Pemanfaatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menjelaskan, penghasilan DPRD diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Di dalamnya diatur sembilan kom-

ponen penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, semisal uang representasi, tunjangan beras, tunjangan rumah tangga, hingga tunjangan komunikasi intensif berikut besaran dari setiap komponen penghasilan. Dengan adanya pengaturan yang baku, besaran nilai tunjangan tidak bisa diotak-atik lagi di APBD.

Walakin, di dalam aturan tersebut masih terdapat celah. Masih ada komponen penghasilan dan tunjangan yang tak diatur formulasinya.

"Yang belum ada formulasinya secara jelas dan pasti itu adalah tunjangan kesejahteraan. Di dalamnya mencakup tunjangan perumahan dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja negara, dan tunjangan transportasi," ujar Herman.

Tidak adanya formula yang rigid membuat penentuan besarnya diatur berdasarkan tingkat kepatutan dan kewajaran harga di provinsi setempat. Tingkat kepatutan dan kewajaran itu pun akhirnya bisa dimaknai dengan sangat subyektif oleh pemda. Itu juga yang membuka celah permainan penentuan besaran tunjangan.

Untuk mengatasi polemik di publik, KPPOD pun menyarankan agar Kemendagri selaku pembina dan pengawas pemda menerbitkan pedoman khusus untuk standar kepatutan dan kewajaran tersebut. Standar itu akan dipakai oleh pemda untuk menentukan besaran nilai tunjangan perumahan.

Misalnya, dalam konteks Jakarta, sebagian besar anggota DPRD diasumsikan sudah lama tinggal di Jakarta, sehingga idealnya juga memiliki rumah di Jakarta. Oleh karena itu, besaran perumahan yang fantastis jelas akan menjadi persoalan dari sisi pertanggungjawaban ke publik. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja.

"Aturan standar kepatutan dan kelayakan tunjangan kesejahteraan itu diperlukan untuk memberikan kepastian, tentunya juga harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda," katanya.

Selain itu, di tengah sorotan publik pada tunjangan perumahan, Herman menilai DPRD dan pemda tidak boleh semata melempar bola ke Kemendagri. Pemda harus menunjukkan sisi integritas dengan menanamkan rasa sensitivi-

tas publik pada kebijakan-kebijakan di level daerah.

Hal lain yang penting, pemerintah provinsi perlu pula mengawasi besaran tunjangan anggota DPRD kabupaten/kota dalam RAPBD yang diajukan pemerintah kabupaten/kota. Sebab, bukan tidak mungkin, nominal tunjangan perumahan anggota DPRD atau komponen tunjangan lainnya terlalu besar nilainya.

### Tak Sesuai Kinerja

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar,

tidak terikat tanggung jawab.

"Tunjangan kan sifatnya diberikan. Beda dengan dana reses, misalnya. Karena diberikan, pertanggungjawabannya bagaimana? Bisa saja diberi besaran segitu, tapi tinggal di rumah milik saudara atau malah memang punya sudah punya rumah di daerah itu dengan jarak yang terjangkau. Artinya, uangnya masuk ke kantong yang tidak sesuai peruntukan" kata Adinda.

Adinda menambahkan, sejumlah hak keuangan yang diterima anggota dewan itu perlu untuk mendukung kegiatannya menyerap aspirasi masyarakat

dapat sejalan dengannya.

Sahel Muzammil dari Transparency International Indonesia juga berpendapat seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun lokal, harus segera mengevaluasi segala keputusan terkait tunjangan dengan lebih memperhatikan kondisi perekonomian dan keuangan negara/daerah, serta kondisi masyarakat pada umumnya.

"Sebab hal ini bukan hanya terlihat sebagai pemborosan, melainkan mulai terlihat sebagai 'korupsi yang dilegalkan'," ucap Sahel.

"Seluruh jajaran pemerintahan justru



berkata tunjangan rumah dalam bentuk fasilitas rumah dinas ini semula ada karena untuk menunjang kinerja bagi mereka yang memang tidak memiliki hunian di kota bertugas.

Hal ini sejalan dengan praktik yang dilakukan pada kalangan ASN, BUMN, bahkan sebagian karyawan swasta. Akan tetapi, wujud tunjangan rumah berupa uang ini, apalagi untuk mereka yang tinggal sedari awal di kota tersebut, memang menjadi tidak masuk akal.

"DPRD ini kan biasanya memang orang yang sudah tinggal di situ kan. Kalau memang tinggal jauh sehingga harus sewa, apa iya sebesar itu?" kata Adinda.

Ia juga menyoroti tunjangan ini sifatnya sebagai hak, sehingga mereka

dengan turun ke lapangan. Namun, yang menjadi persoalan, besaran hak keuangan tersebut semestinya sesuai dengan kinerjanya yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat.

"Perlu dilihat lagi dan masyarakat terus mengawasi. Apakah sudah sesuai? Permasalahannya yang membuat masyarakat bersuara ini kan karena kinerja dan hak keuangan yang diterima ini tidak sepadan. Apa harus dibuat KPI (key performance indicator)? Kalau nilainya tidak sesuai, ya tidak layak dapat tunjangan. Bekerja kan semestinya seperti itu kan," ujar Adinda.

Di sisi lain, kesepakatan tunjangan yang diatur melalui peraturan atau keputusan gubernur ini bisa jadi menjadi nilai tawar bagi kepala daerah agar dewan

harus lebih menunjukkan kinerja nyata. Harus dipahami, kemarahan publik hari-hari bukan hanya karena angka-angka tunjangan yang tidak wajar, melainkan juga karena kinerja yang tidak memuaskan dari orang-orang yang mereka pilih dalam pemilu," tegasnya.

Tindak lanjut yang dilakukan DPRD usai mendapat sorotan juga memperhatikan para anggota dewan yang tidak sensitif pada kondisi sekitar.

"Ini pembelajaran penting, sebagai warga kita tidak boleh berhenti mengawasi dan mengevaluasi mereka, termasuk mengawasi keputusan-keputusan terkait anggaran, bahkan mungkin sampai keputusan terkait perizinan, kontrak, dan pengadaan yang notabene sering menjadi bancakan korupsi," ujar Sahel. ●

# BUDI ARIE HARUSNYA SUDAH LAMA JADI TERSANGKA

**Berulang kali Budi Arie Setiadi mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Kepada wartawan, ia mengaku tak tahu Prabowo Subianto tengah merencanakan merombak kabinetnya.**

Reshuffle itu terjadi juga. Budi Arie termasuk yang dicopot dari kursi Menteri Koperasi. Wakilnya, politikus Partai Gerindra, Ferry Juliantono, yang naik menggantikannya.

Seiring reshuffle, kasus pengamanan situs web judi online kembali disorot setelah Budi Arie Setiadi dicopot dari jabatan menteri. Namanya memang melintang dalam persidangan perkara ini.

Para terdakwa yang sudah divonis berulang kali menyebut namanya. Bahkan, dalam surat dakwaan, para terdakwa menyebut jatah Budi Arie sebagai imbalan pemerintah melindungi situs web judi online dari para bandarnya.

Beberapa ahli hukum menekankan bahwa tidak mungkin para pegawai kementerian yang menjadi terdakwa bertindak tanpa sepengetahuan menteri. Apalagi, ada terdakwa yang memastikan Budi Arie meng-

etahui praktik pengamanan tersebut.

Budi Arie telah membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dia menuturkan tuduhan itu sebagai "narasi jahat". Ia berujar tidak mengetahui atau menerima aliran dana dari praktik pengamanan situs judi online tersebut. Adapun alokasi dana yang disebut dalam dakwaan, kata dia, hanya obrolan internal para tersangka.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai, Budi Arie Setiadi seharusnya sudah lama menjadi tersangka dalam kasus pengamanan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini

Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Pribadi saya sudah berkali-kali mengatakan, kalau melihat konstruksi kasusnya yang dimuat di koran dan berita acara pemeriksaan yang kita dapat resumennya, memang menurut saya dia seharusnya sudah lama seharusnya menjadi tersangka," kata Mahfud dalam tayangan Youtube @leon.hartono, dikutip Jumat, 12 September 2025.

Mahfud menjelaskan, kasus judi online di Kominfo berawal dari proses pengangkatan pejabat yang bertugas menangani pemblokiran situs-situs ilegal tersebut. Menurutnya, Budi Arie menunjuk seseorang yang tidak memenuhi syarat kompetensi, tanpa melalui seleksi terbuka, dan bahkan tidak memeriksa latar belakang pendidikan calon pejabat tersebut.

"Budi Arie mengatakan tidak masalah ijazahnya tidak diperiksa, karena yang bersangkutan mengaku pandai mengoperasikan IT. Akhirnya orang itu diangkat secara paksa, tidak punya ijazah apa-apa ten-



tang itu,” ujar Mahfud.

Pejabat tersebut, lanjut Mahfud, justru kemudian terlibat dalam pembobolan sistem dan membuka celah bagi kejahatan online. Hal inilah yang menurut Mahfud menjadi dasar bahwa Budi Arie dapat diduga sebagai aktor intelektual dalam kasus tersebut.

“Nah, kalau gitu bisa diduga kalo gitu otaknyanya si Budi Arie, aktor intelektualnya Budi Arie. Kenapa? Sudah tahu dia tidak punya kompetensi dipaksakan di situ, sampai dirjennya mencari gaji dari sumber dana operasional jabatan dirjen untuk ini. Karena oleh Budi Arie suruh beri gaji tinggi, padahal standarnya nggak boleh begitu di dalam birokrasi,” ucapnya.

Selain itu, Mahfud juga menyebutkan adanya bukti tambahan berupa kesaksian dalam pemeriksaan pada Maret lalu. Dalam kesaksian tersebut, seorang saksi mengaku mengantar kopi, namun isi dari kopi itu disebut-sebut adalah uang. Bukti berupa rekaman CCTV pun disebut telah ada.

“Nah, itukan mestinya jadi tersangka,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, juga mendong pengusutan kasus judi online yang menyeret nama Budi Arie Setiadi. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, perjudian merupakan salah satu hal yang ingin diberantas oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Karena itu siapapun yang terlibat dalam kasus perjudian harus dibawa ke pengadilan. Siapapun itu,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Benny mengatakan, Prabowo tengah berupaya memberantas perjudian, korupsi, narkoba, serta terorisme. Sehingga, jika ada bukti yang menunjukkan siapapun yang terlibat perlu diseret ke ranah hukum.

“Kalau ada bukti. Kalau tidak, ya jangan,” kata dia.

Pengamat politik, Agung Baskoro, menilai, pencopotan Budi Arie merupakan langkah strategis agar yang bersangkutan bisa lebih fokus menghadapi persoalan hukum yang menjeratnya.

“Saya lihat dia di-reshuffle supaya fokus menghadapi kasus itu sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu

kinerja beliau sebagai Menteri Koperasi. Karena kan programnya cukup besar ya, soal koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau dia tersangkut kasus, kemudian program utama pemerintah ini bermasalah nanti yang terbebani justru Pak Presiden,” kata Agung, Selasa, 9 September 2025.

Menurut Agung, dimensi yuridis atau hukum menjadi pertimbangan utama di balik keputusan reshuffle ini, bahkan melebihi pertimbangan politis lainnya. Sikap Prabowo ini mencerminkan keinginannya untuk tidak mengulangi preseden buruk di masa lalu, di mana pejabat tinggi negara terjerat kasus ko-

nyoroti bahwa klaim kuantitas belum tentu sejalan dengan kualitas yang diharapkan.

“Koperasi Merah Putih sudah berdiri, katanya, 80 ribuan koperasi ya di desa, kelurahan semacam itu. Walaupun jumlah itu akan kita uji apakah berkualitas semua atau tidak koperasinya,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Budi Arie sebagai Menteri Koperasi sudah dirancang lama dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk memutuskannya.



rupsi.

Contohnya adalah kasus yang menimpa Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer (Noel), yang dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden dinilai tidak ingin citra pemerintahannya terganggu oleh pejabat yang memiliki masalah hukum.

“Soal pertimbangan poros di antara Solo, Tengku Umar, Hambalang, Cik-eas, dan sebagainya itu alasan kedua. Yang jelas saya melihat dimensi yuridisnya lebih kuat, apalagi ada Presiden tidak mau kasus Noel itu terulang lagi di masa-masa berikutnya” imbuhnya.

Di sisi lain, kinerja Budi Arie selama menjabat sebagai Menteri Koperasi juga menjadi catatan. Program andalannya, Koperasi Merah Putih, yang diklaim telah tersebar di puluhan ribu desa, masih perlu diuji lebih lanjut efektivitas dan kualitasnya. Agung me-

“Jelas, pertimbangannya sudah sejak dari dulu bahwa yang bersangkutan mau direshuffle, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat dan pas untuk direshuffle, karena beliau ini dikaitkan dengan persoalan hukum,” ujarnya.

Ray bilang, pencopotan Budi Arie sendiri merupakan penilaian objektif yang dilakukan Prabowo yang menunjukkan kesungguhannya untuk tidak menoleransi adanya tindak pidana khususnya korupsi di kabinetnya.

Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Sapta Aprilianto, menilai pencopotan Budi Arie Setiadi bisa mempermudah pemanggilan untuk diperiksa dalam kasus pengamanan situs judi online.

Menurutnya, tak ada lagi jabatan sebagai pejabat negara yang melekat pada Budi Arie bisa mempermudah proses hukum untuknya. ●

# TKDD MBG

Gunawan Effendi

**H**irau pada unjuk rasa di akhir Agustus 2025: demo, aksi anarkis, kerusakan harta benda, fasilitas umum, juga korban nyawa –menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tercatat 10 orang meninggal dunia, memang sangat pantas. Tapi, siapa peduli Lebong Sakti?

Menyimak Lebong Sakti pun mungkin hanya seperlitanasan mata. Terlebih nama Lebong Sakti yang melekat dengan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, unit penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tambahan pula, 467 penerima manfaat MBG di Lebong Sakti keracunan.

Tapi, gambaran besarnya, unjuk rasa dan MBG itu berkaitan erat. Simak saja pernyataan Aliansi Akademisi Indonesia yang ditandatangani 344 orang yang sebagian besar bergelar doktor, bahkan lebih dari 100 antaranya malah profesor. Salah satu tuntutan atau desakan para akademisi itu menyatakan "Alokasi anggaran negara (dan daerah) seharusnya didasarkan pada kebutuhan rakyat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, miskin, perempuan, dan anak. Sudah waktunya kebijakan anggaran didasarkan pada pemenuhan hak-hak kesejahteraan (welfare benefits) bukan sebagai 'charity' tetapi sebagai 'entitlement'."

Baiklah, dari sisi substansi tuntutan itu berpotensi membungkam karena tidak menyebutkan langsung programnya. Kebijakan anggaran pemerintah apa yang bersifat charity dan entitlement? Apa pula welfare benefits? Di mana letak bantuan sosial (bansos) dan MBG dalam rentang charity-entitlement? Biarlah para akademisi itu yang menjelaskannya.

Namun soal politik anggaran memang mengemuka sejak pemerintah menegaskan akan memangkas anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Postur anggaran TKDD pada RAPBN 2026 hanya direncanakan sebesar Rp650 triliun. Angka ini turun Rp214,1 triliun atau 24,7 persen dibandingkan dengan outlook (ancar-ancar) tahun 2025 yang direncanakan sebesar Rp864,1 triliun. Bulatkan saja, turun seperempatnya.

Alokasi anggaran TKDD pada RAPBN 2026 itu juga terendah sejak lima tahun terakhir. Sekadar catatan pada tahun 2021 realisasi TKDD menembus angka Rp785,7 triliun, setahun kemudian angka itu naik menjadi Rp816,2 triliun

pada 2021, tahun 2023 naik jadi Rp881,4 triliun, turun ke angka Rp863,5 triliun pada 2024, dan diperkirakan menjadi Rp864,06 triliun pada tahun 2025.

Yang perlu menjadi catatan, TKDD itu bukan berarti hilang begitu saja, melainkan berubah alokasinya menjadi anggaran untuk MBG (juga Koperasi Merah Putih di kelurahan dan desa). Titik gentingnya adalah pengakuan bahwa program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara implisit gagal sehingga muncul alternatif Koperasi Merah Putih.

Akan halnya MBG, apakah para akademisi itu menyimak Southeast Asia School Meals Coalition Summit pada 18–20 November 2024? Ringkasnya, negara-negara Anggota Koalisi School Meals dari Asia Tenggara, termasuk Kerajaan Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Filipina, Republik Demokratik Timor-Leste, bersama dengan perwakilan dari Brunei Darussalam, Republik Korea, dan Singa-

gapura, serta 39 pemangku kepentingan, berkumpul di Siem Reap pada tanggal tadi dalam KTT Koalisi Makanan Sekolah Asia Tenggara. Temanya "Mempercepat Kolaborasi dan Komitmen di Negara-negara Asia Tenggara untuk Memajukan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Sistem Pangan."

Lebih ringkas lagi, MBG di Indonesia sedang dan akan terus bersaing dengan

program sejenis di negara sekawasan: pertarungan indeks pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Indonesia sudah lebih dulu bergabung dengan Koalisi School Meals global pada Desember 2024. Kemudian langsung menerapkannya pada 2025 dengan segala ketidaksempurnaannya: Tak terkecuali kasus-kasus keracunan di Lebong Sakti pada akhir Agustus, juga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada pertengahan Agustus 2025, pun di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Juli 2025.

Semoga jalin kelindan unjuk rasa, TKDD, dan MBG, sudah lebih jelas. Akhirnya, semoga SPPG Lebong Sakti Lemeu Pit dan seluruh program MBG berlanjut lebih baik serta berkesinambungan.

Titip salam untuk Kak Erry (Prof Francisia Saveria Sika Seda), satu-satunya akademisi yang saya kenal di Aliansi Akademisi. Tanpa dukungan Kak Erry dan bantuan ayahandanya Frans Seda di masa lalu, tulisan ini sangat boleh jadi tak akan pernah ada. ●



# FISKAL (DAN MONETER) DI TANGAN MENKEU KOBOI

Menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa banyak mendapat sorotan dari berbagai sisi. Bagaimana kebijakan fiskal (anggaran) sebagai Menkeu baru?



## • INFO KHUSUS

**T**erlepas dari gayanya yang model jagoan di film-film cowboy Western) semisal *The Wild Wild West*, toh Menkeu Purbaya blak-blakan, untuk menyebutnya lebih dari sekadar transparan. Tampil pertama kali sebagai Menteri Keuangan di hadapan para Wakil Rakyat di Komisi XI DPR, pada Rabu, 10 September 2025, Purbaya memulai paparannya dengan memperkenalkan dirinya kini bukan lagi hadir sebagai Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melainkan sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

"Kalau waktu Ketua LPS, saya katanya ngomongnya kayak agak koboi. Sekarang enggak boleh saya, Pak. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda," ungkap Purbaya yang mendapat tanggapan berupa tawa dan senyum simpul yang hadir di rapat.

Malah terdengar sahutan dari salah satu Anggota Komisi XI DPR: "Pak Menteri, boleh koboi, tapi ada isinya!"

"Siap, siap. Terima kasih, Pak," jawab Purbaya singkat.

Secara umum paparan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan berisi Rencana Kerja dan

sanakan secara kolaboratif oleh unit eselon I Kemenkeu untuk memastikan tercapainya kinerja fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.

Program pertama diarahkan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola ekonomi global. Program kedua menitikberatkan pada optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNPB dengan dukungan transformasi digital. Sementara itu, program ketiga berfokus pada peningkatan kualitas belanja yang adil, efektif, dan produktif, termasuk sinergi belanja



"Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak, biasanya sebagai LPS," ujarnya

Kepada Anggota Komisi XI yang hadir dia mengemukakan, sebagai Menkeu dia tidak bisa lagi asal berbicara seperti saat masih menjabat di LPS karena sempat mendapat kritikan dari masyarakat akibat salah berbicara beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, pada Raker kali ini Purbaya mengemukakan akan fokus menyampaikan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan, juga pagu anggaran Tahun 2026.

Anggaran (RKA) Tahun 2026. Paparan difokuskan pada arah kebijakan fiskal tahun depan serta lima program utama Kementerian Keuangan yang menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara.

Lima program strategis tersebut meliputi: Program Perumusan Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Perimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen. Seluruh program dilak-

pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.

Selanjutnya, program keempat diarahkan untuk mewujudkan APBN yang akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan, melalui pengelolaan kas, aset, pembiayaan, serta risiko yang lebih optimal. Adapun program kelima menekankan pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, serta peningkatan kualitas SDM keuangan negara, sehingga seluruh unit Kemenkeu dapat menjalankan tugas dengan efektif.

Menkeu menegaskan bahwa kelima program ini menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional. "Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Menkeu Purbaya.

Toh paparan umum itu menjadi bahasan lebih rinci mendalam lagi. Salah satu yang mengemuka dalam rapat kerja Purbaya dengan Komisi XI DPR

atas itu," kata Menkeu Purbaya.

Menurut dia, di era Presiden SBY, ekonomi RI bisa tumbuh rata-rata enam persen karena sektor swasta berkontribusi besar pada ekonomi. Menkeu Purbaya menjelaskan, jika private sector atau sektor swasta dibiarkan bergerak, pertumbuhan enam persen bisa tercapai meskipun tidak instan.

"Pemerintah tidak bisa mengontrol agen ekonomi (sektor swasta) berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir, berjalan, bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana, situasi yang ada," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, program-pro-

gram kredit tumbuh berapa, 22 persen. Jadi waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector hidup, jalankan ekonomi. Itu berhubungan rasio tax (perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto)," tegas Purbaya.

Ketika swasta yang jalan, penerimaan pajak pun tumbuh. Saat itu, katanya, bahkan rasio pajak 0,6 persen lebih tinggi dibandingkan saat Presiden Jokowi memerintah.

Demikian pula dengan jumlah uang yang beredar (likuiditas) di tengah masyarakat. "Pada zaman Pak Jokowi,



adalah soal pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Menkeu mengemukakan, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ekonomi dapat tumbuh rata-rata enam persen per tahun. Namun, di masa selanjutnya, era Presiden Joko Widodo, pertumbuhan turun menjadi rata-rata lima persen per tahun.

"Ini sudah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat saja zamannya Pak SBY enam persen, private sector (sektor swasta berperan). Zaman Jokowi lima persen. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di

gram investasi yang lain bisa didorong. Di era Presiden Jokowi, masih kata Pak Menkeu, hal ini tidak terjadi karena ekonomi didorong lebih di sektor pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi hanya rata-rata di bawah lima persen.

Dalam rapat ini, Purbaya menjelaskan pertumbuhan basis moneter/ base money/ uang primer (M0) pada era Prabowo rata-rata tumbuh 17 persen lebih. Ini mendorong likuiditas di perbankan berlimpah dan pertumbuhan kredit terpacu tumbuh pesat.

"Akibatnya, uang di sistem cukup,

uang tumbuh hanya sekitar tujuh persen M0-nya. Bahkan di titik-titik tertentu, dua tahun sebelum krisis (Covid-19), itu tumbuhnya nol persen," tambah Purbaya.

Menurut Menkeu Purbaya, hal ini bisa terulang lagi di pemerintahan saat ini jika tidak ada kebijakan yang memperbaikinya. "Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya, dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya. Dua

## • INFO KHUSUS

mesin mati (mesin moneter dan mesin fiskal),” ujarnya.

Maka, sambung Purbaya, kondisi kekeringan likuiditas membuat masyarakat tercekik sehingga memicu reaksi negatif hingga memicu pula unjuk rasa. Menurut Menkeu Purbaya, unjuk rasa adalah efek dari tekanan berkepanjangan dari ekonomi. “Karena kesalahan fiskal dan moneter yang sebelumnya kita kuasai,” tandasnya.

Ia mengemukakan pula, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mesin ekonomi pincang karena ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh pemerintah dengan

gun juga. Jadi kalau balikin ke sistem juga, bank, Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu. Gak bisa bangun, tapi ekonominya jalan,” tandasnya.

Dalam kaitan itulah Menkeu Purbaya lebih dari sekadar menangani fiskal, namun menyeberang ke sisi moneter yang lazimnya menjadi ranah bank sentral, Bank Indonesia. Masih di Rapat dengan Komisi XI DPR, Purbaya mengemukakan akan memindahkan dana perbankan sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank nasional.

“Pada waktu 2008 ada krisis ekonomi, saya bisik-bisik ke think tank Pak SBY [Presiden Susilo Bambang Yud-

di sistem perekonomian. Namun, Purbaya menilai bahwa perekonomian nasional di era Covid-19 diambang kehancuran justru akibat kesalahan memutuskan kebijakan moneter.

“Waktu era Pak Jokowi itu, saya memberikan masukan langsung ke Istana [Kepresidenan] agar kebijakan berubah, karena base money pertumbuhan [uang] pada Maret 2021 persen -15,3 persen, padahal suku bunga sudah diturunkan. Ini salah kebijakan. Saya bilang ke presiden ‘Ya sudah dibalikin lagi saja pak, BI suruh mengurangi penyerapan dananya ke sistem. Bapak [pemerintah] punya uang



fiskalnya. Sementara itu, kontribusi swasta tertekan, padahal, seharusnya kontribusi swasta bisa mencapai 90 persen.

“Mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang 90 persen (kontribusi swasta) berhenti, atau diperlambat,” ungkap Purbaya.

Inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai sedikit di bawah lima persen per tahun rata-ratanya. Purbaya pun mengatakan sudah mengingatkan Presiden Jokowi saat itu.

“Jika uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, ekonominya. Yang kedua sistem kering gak bisa memban-

hoyono] untuk mengubah kebijakan. Di zaman Pak SBY, [pertumbuhan ekonomi] tumbuh 6 persen, zaman Pak Jokowi rata-rata 5 persen. Karena kalau dalam teori moneter, base money Pak SBY rata-rata tumbuh 17 persen lebih, akibatnya kredit tumbuh 22 persen, ekonomi jalan. Walaupun di era Pak SBY enggak bangun infrastruktur habis-habisan, tapi private sector hidup menjalankan ekonomi,” ungkap Purbaya.

Dengan demikian, ia menekankan bahwa untuk menjaga nilai tukar, maka pemerintah harus menciptakan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka jaga kondisi likuiditas

di bank sentral Rp529 triliun waktu itu, balikin ke sistem perbankan. Akhirnya Mei 2021, dipindahkan uang sebesar Rp300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Selamat ekonomi kita,” jelas Purbaya.

Ia menjelaskan, perubahan kebijakan moneter kala itu berdampak positif terhadap laju pertumbuhan uang menjadi 11 persen dan dijaga oleh BI hingga di atas 20 persen. Dengan demikian, Purbaya meyakini bahwa pemindahan dana pemerintah yang mengendap di BI ke sistem perbankan merupakan penyelamat perekonomian nasional di beberapa krisis di Indonesia.

“Rupanya sejak pertengahan 2023 hingga 2024, uang diserap secara ber-

tahap kembali ke sistem [BI]. Jadi, itu yang Anda rasakan sampai sekarang ini, ekonomi melambat secara signifikan, real sector susah. Kita menunjuk ini gara-gara kondisi global, padahal karena kebijakan domestik yang salah. Karena ingat, 90 persen ekonomi kita di-drive oleh domestic demand. Masuk di 2025, saya pikir sudah pada insaf karena pertumbuhan uang di atas 7 persen, di Mei - Agustus 2025 jatuh hingga 0 persen [pertumbuhan uang], sampai ada demonstrasi karena ekonomi kita seperti ini," jelas Purbaya.

Untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional saat ini, Purbaya me-

Bisa jadi akan bisa lebih buruk. Jadi, tugas saya di sini adalah menghidupkan mesin moneter dan mesin fiskal itu. Langkah pertama yang saya sudah lakukan adalah menaruh uang ke sistem perbankan. Sekarang pemerintah ada Rp425 triliun di BI, saya pindahkan Rp200 triliun. Maka, ekonomi akan hidup lagi. Kami juga akan pastikan belanja-belanja pemerintah berjalan dengan lebih baik," tandas Purbaya.

Menanggapi kebijakan Rp200 triliun tadi, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, mengemukakan, langkah ini berpotensi menambah likuiditas dan ruang ekspansi kredit, namun

benar-benar masuk ke sektor riil.

Misbakhun menyebut ada tiga aspek utama yang akan menjadi perhatian Komisi XI DPR RI. Pertama, targeting: penempatan dana hendaknya tidak terbatas pada Himbara saja, tetapi juga menjangkau bank swasta dan bank umum nasional lain, serta diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.

Kedua, pengawasan: realisasi kredit harus dipantau agar tidak berhenti di neraca perbankan. Ketiga, kebijakan pendukung: langkah ini akan lebih efektif bila dipadukan dengan stimulus



negaskan akan memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari BI ke bank nasional. Dana tersebut untuk mendukung ketersediaan likuiditas guna mendorong peningkatan penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana sebesar Rp200 triliun akan dikucurkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan PT Bank Syariah Nasional.

"Kita enggak bisa menjalankan ekonomi kalau salah satu mesin pincang atau berhenti, atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama.

harus dijalankan dengan arah yang jelas dan produktif. "Kami memahami semangat pemerintah agar dana yang mengendap ini bisa digerakkan. Tetapi kunci keberhasilan ada pada penyaluran yang tepat sasaran," kata Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

la menegaskan, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada penambahan likuiditas yang kemudian kembali terserap di instrumen moneter BI. Untuk itu, diperlukan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia agar tujuan fiskal dan moneter selaras, menjaga inflasi serta stabilitas nilai tukar, sekaligus memastikan kredit

lain seperti padat karya, insentif pajak, dan dukungan perumahan. "Dengan kombinasi kebijakan yang saling memperkuat, multiplier effect bisa maksimal. Inilah cara agar penarikan dana benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah. "Tujuannya jelas: menjaga stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat," ujarnya.

Pada saatnya, akan lebih jelas data dan fakta di kehidupan nyata. Masih akan panjang sambungan kisahnya. •



# TRANSFER KE DAERAH BERUBAH ARAH

**Nilai transfer ke daerah (TKD) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 turun atau lebih rendah dari postur APBN 2025. Menkeu Purbaya membuka ruang perubahan. Ada kemungkinan TKD pada APBN 2026 akan naik. Tapi, ini baru kabar baik.**

**B**aru kabar baik karena kenaikan nilai TKD pada 2026 masih dalam kajian atau pembahasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan, pemerintah pusat sudah tidak berencana memangkas alokasi transfer ke daerah (TKD). Sebaliknya, saat ini sedang dikaji peluang untuk menambah alokasi TKD.

"Concern utama kita tadi adalah apakah ada dana tambahan ke daerah apa tidak. Kalau ada berapa, itu yang sedang kita hitung," sebut Purbaya usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Rabu, 10 September 2025.

Saat ditanya media, Purbaya menegaskan tak akan ada pengurangan TKD. "Nggak ada, kita nggak akan pe-

motongan lagi," tegasnya.

Menurut dia, alokasi TKD 2026 masih dihitung, sedangkan besarnya masih didiskusikan dengan DPR. "Pokoknya, kita cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi," pungkas Purbaya.

Keesokan harinya, Pak Menkeu kembali mengemukakan soal TKD saat menyampaikan pidato kunci, keynote speech, di acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8 persen di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 11 September 2025 Ia mengemukakan beberapa kebijakan yang akan dikeluarkannya dalam jangka pendek di antaranya adalah meningkatkan kembali anggaran TKD. Hal itu berkaca dari

respons daerah yang ramai menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemda.

Menkeu yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025 itu mengakui, pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). "Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu," ujarnya.

Jadi niat meningkatkan TKD pada 2026 adalah mengurangi keresahan Pemda. Dia berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya Pemda bisa membangun ekonomi daerah dengan tenang. Dia mengaku



belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikan-nya. Namun, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan.

“Kita menyadari hal itu. Saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapinya.

Sebelumnya Pak Menkeu juga mengemukakan dengan kenaikan anggaran TKD, kemungkinan besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang telah diusulkan akan mengalami perubahan. “Ada perubahan sedikit pasti. Karena kalau kita lihat di anggaran juga meredakan keresahan daerah sampai titik tertentu,” ungkap Purbaya di Komplek Parlemen, Rabu, 10 September 2025.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan anggaran TKD senilai Rp650 triliun pada tahun depan. Pagu itu turun 29,34 persen dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp919,9 triliun.

TKD pada 2026 terbagi menjadi beberapa pos anggaran, seperti dana bagi hasil senilai Rp45,1 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp373,8

triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp155,1 triliun. Selain itu ada pula dana otonomi khusus (otsus) disiapkan senilai Rp13,1 triliun, dana daerah istimewa Yogyakarta Rp500 miliar, dana desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.

Dalam penyampaian RAPBN 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp 650 triliun. Anggaran tersebut turun sebesar Rp 269 triliun dari APBN 2025 lalu sebesar Rp 919 triliun.

Penurunan anggaran TKD itu memantik reaksi kritis dari wakil rakyat pada Sidang Paripurna kedua masa persidangan pertama 2025-2026 yang berlangsung pada Selasa, 19 Agustus 2025. Perwakilan Partai PDIP, Rio A.J. Dondokambey menilai penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat.

“Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” ujarnya. Jadi, sambungnya, pemerintah perlu memastikan adanya

skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga.

Perwakilan Fraksi Nasdem Ratih Megasari menilai penurunan alokasi TKD dalam RAPBN yang turun 24,8 persen dari angka tahun sebelumnya merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memperbesar alokasi belanja Kementerian/Lembaga hingga Rp 1.498,3 triliun. Meski begitu, menurut dia, pemerintah perlu mengatasi sejumlah masalah yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang kerap menghadapi keterlambatan dan menyulitkan daerah.

“Serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum sensitif terhadap karakteristik geografis khusus seperti wilayah kepulauan dan daerah sulit dijangkau yang menghadapi biaya layanan publik dan infrastruktur lebih tinggi,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Rizki Sadig menyampaikan alokasi Transfer ke Daerah terendah dalam lima tahun terakhir perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan konflik ataupun ketimpangan fiskal antar wilayah. Menurut dia pemerintah perlu menyiapkan

## • INFO KHUSUS

mekanisme kompensasi yang adil bagi daerah. "Memperkuat sinergi pusat-daerah, serta mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Ratna Juwita menilai pemerintah perlu melakukan penjelasan lebih lanjut terkait penurunan belanja TKD. Selain itu, menurutnya pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat. "Pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta mempertimbangkan sumbangsih daerah dalam penerimaan negara," ujarnya.

Sedangkan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah berpendapat rencana penurunan angka TKD tidak akan banyak berimplikasi pada pembangunan di daerah. "Sebenarnya dari sisi program, itu tidak menyusut, karena programnya kalau dulu langsung kepada TKD. TKD-nya saat ini programnya bentuknya Banpres (bantuan presiden) dan Inpres (instruksi presiden)," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

Said mengatakan Banpres dan Inpres tetap akan mengacu pada usulan kepala daerah. Jadi, meski skemanya berubah, mekanismenya tetap mengacu pada kebutuhan daerah yang disampaikan ke pemerintah pusat.

Menurut Said, pemangkasan TKD tak mengindikasikan adanya sentralisasi fiskal. "Kalau sentralisasi itu artinya tidak ada mekanisme bawah-atas. Ini, kan, mekanisme tetap dari bawah. Karena kalau tidak, daerah akan kesulitan untuk pembangunan jalan, irigasi, jembatan dan infrastruktur lainnya," ucapnya.

Toh masih ada pandangan lain yang mengupayakan jalan keluar penurunan TKD dalam RAPBN 2026, Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengungkapkan, pemangkasan TKD tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Menurutnya, penurunan alokasi dana ini tidak boleh dianggap

sebagai hambatan dalam pelayanan masyarakat, melainkan tantangan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

"Daerah tidak boleh hanya mengandalkan transfer pusat. Kepala daerah harus punya inovasi untuk mencari sumber pendapatan baru. Salah satunya melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah. BUMD (BUMD), baik perbankan maupun rumah sakit, yang dapat menjadi instrumen penguatan

mengingat, pemerintah daerah tidak boleh mengambil jalan pintas dengan menaikkan pajak daerah atau PBB secara berlebihan. Kebijakan fiskal seperti itu, kata Taufan, berpotensi membebani masyarakat. "Pajak boleh naik, tapi harus ada kajian, riset, dan kesepahaman dengan DPRD sebagai fungsi pengawasan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban," jelasnya.

Taufan juga mendorong agar

The infographic has a blue header with the logos of the Indonesian Treasury (DJPb) and InTress. The main title is "Realisasi Penyaluran Dana Desa" in large white font, followed by "Tahap I Tahun Anggaran 2025" and "Per Tanggal 19 Mei 2025" in smaller white font. Below the text is a photograph of a farmer wearing a traditional conical hat and a light blue shirt, walking on a dirt path through a lush green rice field. The background of the photo is slightly hazy. On the left side of the photo, there are several yellow and white geometric shapes, resembling stylized arrows or puzzle pieces, pointing towards the center.

pendapatan asli daerah," ujar Taufan, Selasa, 26 Agustus 2025.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi lokal, ekonomi kreatif, dan UMKM sebagai pilar baru penguatan ekonomi di daerah. Menurut dia, sektor-sektor tersebut bisa menjadi motor pertumbuhan dan menciptakan multiplier effect yang langsung dirasakan masyarakat.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu

pemerintah pusat menyiapkan kebijakan baru untuk memperkuat BUMD. Bahkan, ia menilai perlu ada Direktorat Jenderal khusus yang menangani BUMD sehingga daerah dapat bersaing sehat dalam mengelola potensi masing-masing. "Kalau BUMD sehat, fiskal daerah akan ikut sehat. Daerah yang bisa memaksimalkan BUMD harus diberikan reward," tambahnya.

Terkait kekhawatiran pemangkasan

transfer akan melemahkan otonomi daerah, Taufan menilai hal itu tidak tepat. Justru, menurutnya, pemangkasan ini harus mendorong daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah untuk lebih cepat dan efektif mengelolanya. "Otonomi daerah artinya kewenangan mengelola rumah tangganya sendiri. Negara tetap hadir, tapi daerah juga harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada," tandasnya.

Yang jelas, pemangkasan dana TKD banyak dikeluhkan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota; baik diam-diam maupun secara terbuka. Salah satu implikasinya pemangkasan TKD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dapat susut puluhan hingga ratusan miliar.

Toh pemangkasan dana TKD menjadi ujian kemandirian fiskal daerah. Berbagai daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai inovasi agar tak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sangat bervariasi karena situasi dan kondisi masing-masing daerah juga beragam. Ada daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah dan intensitas kegiatan ekonomi tinggi, tetapi ada pula yang rendah. Justru TKD menjadi penting pada konteks hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan antardaerah.

TKD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal). Selain itu, TKD juga dimaksudkan untuk mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah.

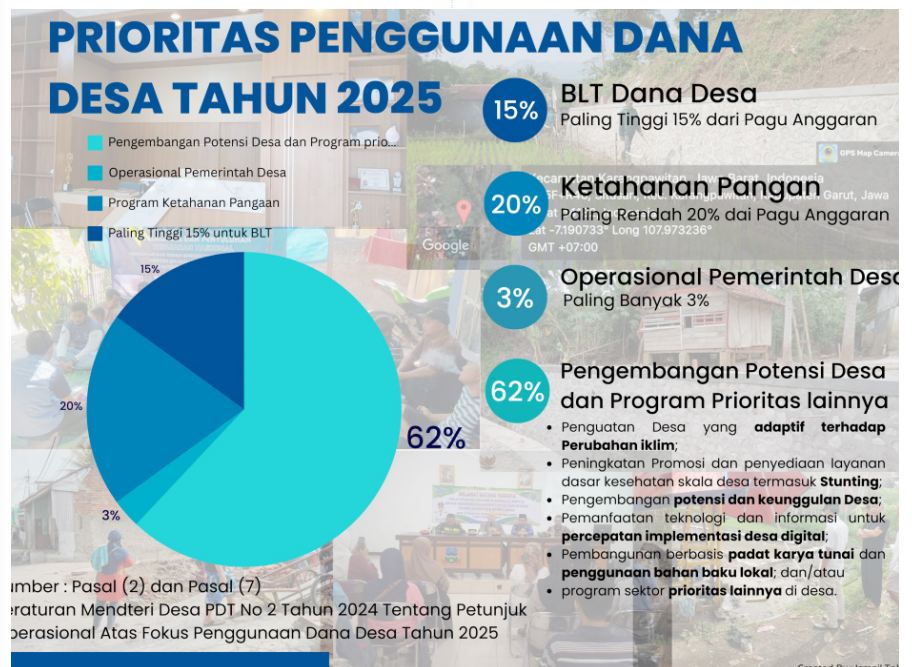
Rentetan dinamika politik sejak penyampaian RAPBN 2026 pada pertengahan Agustus hingga awal September 2025 yang diwarnai unjuk rasa serta rusuh hingga ke berbagai daerah agaknya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengkaji ulang alokasi TKD pada 2026. Alhasil,

pemerintah pusat membuka ruang penambahan alokasi dana TKD. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menegaskan pemerintah sudah tidak berencana memangkas alokasi dana TKD. Sebaliknya, saat ini sedang dikaji peluang untuk menambah alokasi TKD.

Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati pernah mengemukakan, penurunan TKD (dan Dana

22 Agustus 2025.

Mengutip dari Buku II Nota Keuangan 2026, kebijakan dan anggaran TKD tahun 2026 tersebut tidak dapat dipisahkan dengan program prioritas Pemerintah pada 2026, antara lain Koperasi Merah Putih; Makan Bergizi Gratis; Revitalisasi Sekolah dan Madrasah; TPG Non PNS dan TPD Non PNS serta pengembangan guru; PIP, KIP Kuliah, BOS dan Beasiswa lainnya;



Desa) pada RAPBN 2026 adalah penyesuaian alokasi anggaran. "Penyesuaian alokasi TKD merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk memperbesar alokasi belanja kementerian/lembaga yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas yang dilaksanakan di daerah," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, dikutip Jumat,

Sekolah Rakyat; Sekolah Unggulan Garuda; PBI Jaminan Kesehatan;

Toh Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudhi Sadewa sudah mengemukakan pemerintah pusat sudah memutuskan pemindahan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara. Bagaimana implikasinya terhadap TKD dan Dana Desa serta program-program prioritas tadi? Pada saatnya kita akan sama-sama mengetahuinya. ●

# MBG JALAN TERUS

**Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berlanjut. Serapan anggarannya akan dicek tiap bulan.**

**D**alam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, ia menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas. Terlebih anggarannya akan berlipat pada 2026.

“Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang complain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi

gas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat

layanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi di Indonesia. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” tuturnya.

Prabowo pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional dan anggotanya atas capaian dari program MBG ini. Tak hanya itu, Presiden juga menyebut program ini telah dibangun melalui koordinasi



ternyata enggak jelek,” ujar Purbaya di Rapat Kerja, Rabu, 10 September 2025.

Ia meminta Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk memaparkan perkembangan penyerapan MBG secara berkala kepada publik. Bahkan, Purbaya menyatakan siap mendampingi langsung Kepala BGN dalam setiap rilis pers bulanan tersebut.

Menurut Purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) atas permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, dia berencana memperte-

Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto melaporkan capaian signifikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Meskipun baru berjalan delapan bulan, hasil dari program MBG ini menurut Presiden sudah terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. “Presensi anak-anak di sekolah meningkat. Per hari ini, sudah ada 5.800 Satuan Pe-

lintas lembaga, termasuk TNI, Polri, ormas keagamaan, koperasi, dan yayasan. “Dalam tujuh bulan, kita mencapai target yang negara lain butuh bertahun-tahun,” ungkapnya.

Ia mencontohkan Brasil yang membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima MBG setiap hari. Indonesia, kata Prabowo, berhasil membangun 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi dalam waktu singkat.

Program ini, lanjutnya, telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di

sektor dapur umum dan melibatkan sekitar 1 juta petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM. Dampak positifnya terlihat dari meningkatnya angka kehadiran siswa di sekolah serta prestasi belajar mereka.

Presiden menegaskan MBG bukan sekadar program sosial, tetapi investasi untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ia mengutip pernyataan PBB bahwa MBG adalah "investasi terbaik sebuah bangsa".

Selain perbaikan gizi, pemerintah juga berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membuka 2 juta hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Langkah ini didukung kebijakan intensifikasi pertanian, pemangkasan bi-

tribusi bahan pangan," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Pada Sabtu pagi, 8 September 2025, Presiden Prabowo mendengarkan paparan dari Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajaran di seluruh daerah di Indonesia mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alhasil, Presiden mengatakan, penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai puluhan juta. Terkini, sudah ada 25 juta penerima manfaat MBG.

strategi yang sudah kita tempuh," tutur Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan perekonomian di desa sangat maju. Penghasilan petani meningkat pesat. "Ternyata ekonomi di desa dan kecamatan berkembang dengan pesat, nilai tukar petani meningkat cukup tajam, penghasilan petani naik tentunya, banyak sekali kemajuan yang kita capai," ujar Prabowo.

Ia pun menyinggung narasi-narasi yang ingin mengecilkkan hasil positif



**Untuk melindungi konsumen Indonesia, Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadaai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan distribusi bahan pangan.**

rokrasi pupuk, dan kenaikan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

Hasilnya, Indonesia kini mencatat surplus beras dengan stok cadangan nasional lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pelaku penimbunan atau manipulasi distribusi pangan, bahkan hingga pencabutan izin usaha penggilingan beras skala besar jika diperlukan. "Untuk melindungi konsumen Indonesia, Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadaai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan dis-



"Makan bergizi gratis sudah mencapai 25 juta penerima manfaat. Kita berharap sesuai rencana Desember akan sampai 82 juta, 82,9 juta," kata Prabowo di Hambalang

Meski begitu, Presiden Prabowo menyampaikan tak akan terburu-buru dalam mencapai target penerima manfaat. Ia percaya dengan strategi pemerintah. "Tapi kita tidak gerusa-gerusu, kita tidak usah terlalu memaksakan diri, kita yakin dengan

yang ditorehkan Pemerintah. Narasi tersebut, kata Prabowo, menimbulkan kesan seolah-olah rakyat marah. "Saya kira rakyat kita itu dewasa, rakyat kita itu memang banyak masih merasakan kekurangan, itulah yang kita bersama-sama ingin atasi," ucap Prabowo.

"Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu, tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin

## • INFO KHUSUS

sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja," jelas Prabowo.

Acara di Hambalang berlanjut dengan rapat terbatas pada siang dan sore harinya. Di sesi itu, Prabowo mendengarkan paparan mengenai program prioritas pemerintah Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Setelah itu, Prabowo menerima laporan mengenai pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Dalam sesi dua itu, hadir sejumlah

Setelah mendengar laporan tersebut, Prabowo optimistis program pemerintah yang banyak ditujukan untuk masyarakat kalangan bawah dapat berjalan sesuai rencana. Dia juga mengapresiasi bahwa perkembangan program-program tersebut berjalan positif.

Dari Badan Gizi Nasional (BGN), terungkap anggaran yang terealisasi untuk program makan bergizi gratis (MBG) baru mencapai Rp13,2 triliun



jajaran Kabinet Merah Putih di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamensos Agus Jabo Priyono, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, Wamen KP Didit Herdiawan hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

dari total pagu 2025 sebesar Rp71 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan realisasi anggaran MBG yang terserap itu setara dengan 18,6 persen dari total pagu. Namun, Dadan menyatakan bahwa serapan anggaran itu telah melampaui dari target Agustus yang hanya mencapai

Rp9,1 triliun.

Dalam catatan BGN, Dadan mengemukakan, sebanyak 22 juta penerima manfaat program MBG dengan 7.453 titik dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) per 8 September 2025. Ia menjelaskan, pembentukan dapur SPPG telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 7.000 titik. Adapun pada September 2025, BGN menargetkan akan memiliki 14.000 SPPG dengan menjangkau 42 juta penerima manfaat. Artinya ada 40 juta penerima yang harus kejar hingga akhir September 2025.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa jumlah SPPG merupakan hal yang penting. Sebab, penyerapan MBG identik dengan jumlah SPPG yang beroperasi. Pasalnya, ungkap dia, setiap 1 SPPG yang berjalan, maka dapur tersebut akan menyerap sekitar Rp1 miliar setiap bulan.

"Setiap 1 SPPG operasional, maka di bulan itu 1 SPG akan menyerap kurang lebih Rp1 miliar. Jadi kalau ada 7.000 SPPG itu artinya akan ada Rp7 triliun yang terserap di bulan itu. Jadi kalau ada 14.000 SPPG, maka akan ada Rp14 triliun di bulan bersangkutan akan terserap," terangnya.

BGN menargetkan anggaran yang bakal diserap pada September 2025 akan mencapai Rp19,63 triliun. Namun, Dadan berharap, realisasinya akan melampaui target yang telah ditetapkan BGN.

Pada Oktober 2025, BGN membidik anggaran yang bakal diserap mencapai Rp37,86 triliun. Pada periode ini, sebanyak 21.000 SPPG akan terbentuk dan menjangkau 63 juta penerima manfaat.

Berlanjut pada November, anggaran MBG yang bakal diserap adalah Rp59,55 triliun dengan target 25.000 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sebanyak 82,9 juta penerima manfaat mendapatkan program ini.

Sedangkan proyeksi pada Desember 2025, BGN menargetkan penyerapan anggaran MBG dapat mencapai Rp76,42 triliun. Jadi, MBG akan jalan terus dan seharusnya akan lebih baik lagi pelaksanaannya. ● Editor: GE

# info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



**INFO  
PASANG  
IKLAN  
NUR AISAH  
0815-1157-6312**

IKLAN BACK COVER

**RP 75.000.000**

IKLAN DISPLAY/HAL

**RP 50.000.000**

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

**RP 65.000.000**

CENTER SPREAD

**RP 80.000.000**

*Kami Hadir  
Memberikan  
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



INOVASI UNTUK NEGERI  
**info indonesia**

<https://infoindonesia.id>

●●● EDISI #59 SEPTEMBER 2025



**PRABOWO  
HARUS PECAT  
MENTERI MANTAN  
JOKOWI**